

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

- Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,000 (empat miliar rupiah).







INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA 2017











INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA 2017

© 2017 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas:

Subandi Sardjoko

Ketua Tim Pelaksana

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas: Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Anggota

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas:

Mahendra Arfan Azhar | Sri Rahayu | Rati Handayani

Didukung oleh

Tim Badan Pusat Statistik

UNFPA Indonesia: Margaretha Sitanggang | Milliana Endah Wardani | Angga Dwi Martha Konsultan: Gemma Wood | Helmi | Dodi Devianto | I Dewa Gede Wisana | Harry Seldadyo Ilustrasi dan Layout: House of Infographics

Email:

kpapo@bappenas.go.id

DAFTAR ISI

Sa	mbutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS	ix
Sa	mbutan Menteri Pemuda dan Olahraga	X
Ka	ta Pengantar	xi
Da	ftar Singkatan	xiii
	ntisar Eksekutif	
I.	Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Pemuda	
	I.1 Mendefinisikan Pemuda dan Pembangunan Pemuda	
	I.2 Mengukur Pembangunan Pemuda	
II.		
	II.1 Capaian Umum	
	II.2 Capaian Domain	
	Capaian Daerah: Dinamika dan Perbandingan	
	III.1 Provinsi Aceh	33
	III.2 Provinsi Sumatera Utara	
	III.3 Provinsi Sumatera Barat	
	III.4 Provinsi Riau	
	III.5 Provinsi Jambi	
	III.6 Provinsi Sumatera Selatan	40
	III.7 Provinsi Bengkulu	41
	III.8 Provinsi Lampung	42
	III.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)	
	III.10 Provinsi Kepulauan Riau	
	III.11 Provinsi DKI Jakarta	
	III.12 Provinsi Jawa Barat	
	III.13 Provinsi Jawa Tengah	
	III.14 Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta	
	III.15 Provinsi Jawa Timur	
	III.16 Provinsi Bali	
	III.17 Provinsi Bau	
	III.19 Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	III.20 Provinsi Kalimantan Barat	
	III.21 Provinsi Kalimantan Tengah	
	III.22 Provinsi Kalimantan Selatan	
	III.23 Provinsi Kalimantan Timur	
	III.24 Provinsi Kalimantan Utara	
	III.25 Provinsi Sulawesi Utara	
	III.26 Provinsi Sulawesi Tengah	60

	III.27 Provinsi Sulawesi Selatan	61
	III.28 Provinsi Sulawesi Tenggara	62
	III.29 Provinsi Gorontalo	63
	III.30 Provinsi Sulawesi Barat	64
	III.31 Provinsi Maluku	65
	III.32 Provinsi Maluku Utara	66
	III.33 Provinsi Papua	67
	III.34 Provinsi Papua Barat	
IV.	Penutup: Kerangka Kerja bagi Agenda Pembangunan Pemuda	70
	IV.1 Penguatan dan Percepatan Pembangunan Pemuda	71
	IV.2 Penyempurnaan IPP	
	IV.3 Penelitian Berbasis IPP	
	ftar Pustaka	
Lan	mpiran l	76
	Perbandingan Domain dan Indikator IPP Internasional	
Lan	mpiran II	87
	Proses Perhitungan IPP	87
	Keterbatasan dalam Data dan Metode Imputasi	87
	Penentuan Batas Maksimal dan Batas Minimum	
	Standardisasi Data	90
	Pembobotan Indikator	
	Ringkasan Proses Penghitungan IPP Indonesia	94
Lan	mpiran III	
	Data Penyusun IPP 2015-2016	

DAFTAR ISI

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Laporan IPP	9
Gambar 2.1 Rata-Rata Skor Domain IPP Nasional	18
Gambar 2.2 Perbandingan IPP 2015-2016	22
Gambar 2.3 Perubahan Peringkat IPP Provinsi	
Gambar 3.1 Kinerja Pembangunan Pemuda Aceh 2016	35
Gambar 3.2 Kinerja Pembangunan Pemuda Sumatera Utara 2016	
Gambar 3.3 Kinerja Pembangunan Pemuda Sumatera Barat 2016	
Gambar 3.4 Kinerja Pembangunan Pemuda Riau 2016	
Gambar 3.5 Kinerja Pembangunan Pemuda Jambi 2016	
Gambar 3.6 Kinerja Pembangunan Pemuda Sumatera Selatan 2016	
Gambar 3.7 Kinerja Pembangunan Pemuda Bengkulu 2016	
Gambar 3.8 Kinerja Pembangunan Pemuda Lampung 2016	42
Gambar 3.9 Kinerja Pembangunan Pemuda Kepulauan Bangka Belitung 2016	
Gambar 3.10 Kinerja Pembangunan Pemuda Kepulauan Riau 2016	
Gambar 3.11 Kinerja Pembangunan Pemuda DKI Jakarta 2016	45
Gambar 3.12 Kinerja Pembangunan Pemuda Jawa Barat 2016	
Gambar 3.13 Kinerja Pembangunan Pemuda Jawa Tengah 2016	
Gambar 3.14 Kinerja Pembangunan Pemuda DI Yogyakarta 2016	
Gambar 3.15 Kinerja Pembangunan Pemuda Jawa Timur 2016 2016	
Gambar 3.16 Kinerja Pembangunan Pemuda Banten 2016	
Gambar 3.17 Kinerja Pembangunan Pemuda Bali 2016	
Gambar 3.18 Kinerja Pembangunan Pemuda NTB 2016	52
Gambar 3.19 Kinerja Pembangunan Pemuda NTT 2016	
Gambar 3.20 Kinerja Pembangunan Pemuda Kalimantan Barat 2016	
Gambar 3.21 Kinerja Pembangunan Pemuda Kalimantan Tengah 2016	55
Gambar 3.22 Kinerja Pembangunan Pemuda Kalimantan Selatan 2016	
Gambar 3.23 Kinerja Pembangunan Pemuda Kalimantan Timur 2016 2016	
Gambar 3.24 Kinerja Pembangunan Pemuda Kalimantan Utara 2016 2016	58
Gambar 3.25 Kinerja Pembangunan Pemuda Sulawesi Utara 2016 2016	
Gambar 3.26 Kinerja Pembangunan Pemuda Sulawesi Tengah 2016	60
Gambar 3.27 Kinerja Pembangunan Pemuda Sulawesi Selatan 2016	61
Gambar 3.28 Kinerja Pembangunan Pemuda Sulawesi Tenggara 2016 2016	
Gambar 3.29 Kinerja Pembangunan Pemuda Gorontalo 2016	63
Gambar 3.30 Kinerja Pembangunan Pemuda Sulawesi Barat 2016	
Gambar 3.31 Kinerja Pembangunan Pemuda Maluku 2016	
Gambar 3.32 Kinerja Pembangunan Pemuda Maluku Utara 2016	
Gambar 3.33 Kinerja Pembangunan Pemuda Papua 2016	
Gambar 3.34 Kinerja Pembangunan Pemuda Papua Barat 2016	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Usia Pemuda Menurut Beberapa Organisasi	3
Tabel 1.2 UUD 1945 dan Bab dan Pasal Berkorelasi dengan IPP	10
Tabel 1.3 Daftar Indikator, Definisi, dan Sumber Data IPP	12
Tabel 2.1 Capaian IPP dan Peringkat Provinsi 2015-2016	17
Tabel 2.2 IPP Provinsi dan Nasional	19
Tabel 2.3 Provinsi dan Perubahan Peringkat IPP	21
Tabel 2.4 Sebaran Nilai IPP Provinsi di Indonesia 2015-2016	24
Tabel 2.5 Domain IPP Indonesia 2015-2016	26
Tabel 2.6 Sebaran Nilai Domain Pendidikan pada IPP 2015-2016	27
Tabel 2.7 Sebaran Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan pada IPP 2015-2016	27
Tabel 2.8 Sebaran Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan pada IPP 2015-2016	28
Tabel 2.9 Sebaran Nilai Domain Gender dan Diskriminasi pada IPP 2015-2016	29
Tabel 2.10 Sebaran Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja pada IPP 2015-2016	29
Tabel 2.11 Provinsi Teratas dan Terbawah dalam Domain Gender dan Diskriminasi pada 2015-2016	
Tabel 2.12 Provinsi Teratas dan Terbawah dalam Domain Lapangan dan Kesempatan Kerpada IPP 2015-2016	_
Tabel 2.13 Provinsi Teratas dan Terbawah dalam Domain Kesehatan dan Kesejahteraan _I	
Tabel 2.14 Provinsi Teratas dan Terbawah dalam Domain Pendidikan	
Tabel Lampiran I.1 Domain dan Indikator IPP di Asia	77
Tabel Lampiran I.2 Domain dan Indikator IPP di Luar Asia	81
Tabel Lampiran I.3 Domain dan Indikator IPP Organisasi Internasional	
Tabel Lampiran II.1 Metode Imputasi Statistik	
Tabel Lampiran II.2 Batas Maksimum dan Minimum serta Dasar Penentuan Batas Tiap	
Indikator	
Tabel Lampiran II.3 Pembobotan Domain untuk Mengukur IPP	
Tabel Lampiran III.1A Data Awal Penyusun IPP 2015: Domain 1-2	
Tabel Lampiran III.1B Data Awal Penyusun IPP 2015: Domain 3-5	
Tabel Lampiran III.2A Data Awal Penyusun IPP 2016: Domain 1-2	
Tabel Lampiran III.2B Data Awal Penyusun IPP 2016: Domain 3-5	
Tabel Lampiran III.3A Data Transformasi Penyusun IPP 2015	
Tabel Lampiran III.3B Data Transformasi Penyusun IPP 2016	
Tabel III.4 Indeks Domain IPP Provinsi 2015-2016	102



SAMBUTAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS



embangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa, serta memanfaatkan peluang demografi. Pembangunan Pemuda adalah sebuah instrumen memberikan gambaran pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran buku IPP Indonesia tahun 2017 ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia. Sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, buku IPP Indonesia tahun 2017 dapat pula menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam penyelenggaraan layanan kepemudaan yang menjadi bagian dari pembangunan, peran pemuda menjadi sangat penting. Pemuda tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari suatu pembangunan, tetapi juga sebagai pengendali dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan berpengaruh bagi Indonesia yang damai, negara yang menjadi tempat mereka tinggal, akan mereka warisi dan akan mereka pimpin. Untuk itu, upaya-upaya telah dan akan dilakukan untuk memastikan keterwakilan pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan. Beberapa daerah telah menempatkan beberapa wakil pemuda dalam proses perencanaan pembangunan mereka. Beberapa forum juga telah dikembangkan untuk mengatasi tema-tema spesifik seperti antinarkoba dan pencegahan HIV/AIDS. Berbagai program pelatihan dan kewirausahaan telah dilaksanakan pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kapasitas pemuda. Semua ini dilaksanakan agar pemuda bisa ikut berperan aktif dalam pembangunan. Untuk mengoptimalkan upaya penyelenggaraan layanan kepemudaan tersebut, IPP diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembangunan kepemudaan di masa mendatang.

Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia tahun 2017 memuat capaian 15 indikator pembangunan kepemudaan pada tahun 2015 dan 2016 yang dituangkan dalam lima domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi. Secara umum IPP Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu dari 47,33 menjadi 50,17. Adapun domain yang memperoleh skor tertinggi adalah domain pendidikan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh tingkat partisipasi di jenjang pendidikan menengah yang relatif tinggi. Namun demikian, apabila dilihat lebih rinci, tingkat partisipasi pemuda di jenjang perguruan tinggi di seluruh provinsi justru mengalami penurunan. Sementara itu, domain kesehatan dan kesejahteraan berada di peringkat kedua dalam perolehan skor. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemuda yang mendapatkan akses layanan kesehatan semakin baik di tingkat daerah.

Di sisi lain, meskipun domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi berada pada peringkat terendah, antara tahun 2015 dan 2016 kedua domain ini telah menunjukkan peningkatan karena tingkat pemuda menganggur dan perkawinan usia anak menurun.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku IPP Indonesia tahun 2017 ini. Semoga buku IPP ini mengilhami kita semua untuk memperkuat komitmen dalam berinvestasi pada pemuda dan menciptakan masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

Jakarta, Mei 2018 Menteri PPN/Kepala Bappenas

PROF. DR. BAMBANG BRODJONEGORO

SAMBUTAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA



ahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menandai era baru pembangunan kepemudaan yang bersifat cross-cutting. Salah satu amanat Perpres itu adalah penyusunan Indeks Pelayanan Kepemudaan atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP). Sebagai bagian dari strategi pengarusutamaan pemuda, indeks ini merupakan instrumen yang sangat penting. Ia dapat menggambarkan dan memetakan kemajuan pembangunan kepemudaan berbasis outcome (hasil) tingkat daerah dan nasional.

Kami menyambut baik terbitnya laporan IPP karena ini dapat menopang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan kepemudaan yang lebih tepat sasaran, efektif, terukur, dan berkelanjutan, baik dari sisi lokus maupun dari sisi individu pemuda. Dengan demikian, IPP diharapkan dapat turut mewarnai tolok ukur keberhasilan yang sejatinya melekat pada beragam format pembangunan, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, grand design atau peta jalan pembangunan kepemudaan, bahkan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs).

Kami berpandangan bahwa lima dimensi IPP, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi memiliki relevansi dengan lima hak setiap pemuda sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kepemudaan. Kelima hak itu adalah perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi; advokasi; akses untuk pengembangan diri; serta kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. evaluasi. dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Ini semua tentu tidak menafikkan kemungkinan penyempurnaan dimensi dan indikator sejalan dengan perkembangan ketersediaan data, metode pengukuran, dinamika kepemudaan, dan perluasan partisipasi pemuda sebagai subyek pembangunan.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggitingginya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi erat dalam menemukenali rumusan IPP khas Indonesia. Penghargaan setulusnya disampaikan kepada para konsultan pengkaji formulasi indeks: Profesor Helmi dan Dr Dodi Devianto dari Universitas Andalas, Dewa Wisana dari Universitas Indonesia. Gemma Wood dari Australia dan Harry Seldadyo.

Semoga indeks ini bermanfaat dalam mempercepat peningkatan kinerja kita semua dalam pembangunan bidang kepemudaan secara komprehensif, selaras dengan visi dan misi negara Indonesia sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jakarta, Mei 2018 Menteri Pemuda dan Olahraga

IMAM NAHRAWI

KATA PENGANTAR



adan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Population Fund (UNFPA) mengembangkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia tahun 2017. Penyusunan IPP ini turut melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kehadiran IPP 2017 diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam membentuk dan mengembangkan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional.

IPP Indonesia tahun 2017 ini dikembangkan dalam dua tahap. Tahap pertama telah dilakukan tahun 2016, adalah tahap pengembangan kerangka kerja dan metodologi. Tahap ini dibantu oleh tim konsultan, yaitu Bapak Helmi (Universitas Andalas, Sumatera Barat) dan Ibu Gemma Wood (Numbers and People Synergy, Australia). Selanjutnya, tahap kedua dilakukan sejak tahun 2017, adalah tahap pengumpulan, penghitungan dan analisis data serta penyajian IPP. Tahap ini dibantu oleh tim konsultan, yaitu Ibu Gemma Wood dan Bapak I Dewa Gede Wisana, serta Bapak Harry Seldadyo. Pelaksanaan kedua tahap tersebut didanai oleh UNFPA.

Seluruh data untuk IPP Indonesia 2017 disediakan oleh BPS di bawah arahan Deputi Bidang Statistik Sosial, Bapak M. Sairi Hasbullah, serta dikoordinasikan secara teknis oleh Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Bapak Gantjang Amanullah. Proses konsultasi dan kesepakatan dengan beberapa kementerian dan organisasi atau jejaring pemuda telah dilakukan Bappenas, di bawah koordinasi teknis Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Ibu Woro Srihastuti Sulistyaningrum.

Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan IPP 2017 ini, termasuk Kementerian

Kesehatan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta beberapa organisasi/ jaringan pemuda seperti AIESEC Indonesia, Aliansi Remaja Independen (ARI), Center for Indonesia's Strategic Development *lnitiatives* (CISDI), Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Indonesian Future Leaders (IFL), Karang Taruna, Komunitas Indorelawan. OKP Kemenpora, PAMFLET, Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Young Voices Indonesia dan Youth Advisory Panel UNFPA.

Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ditampilkan dalam dokumen ini dapat mencakup pandangan dan rekomendasi dari berbagai pihak, yang bukan merupakan pendapat pribadi dari para konsultan. Untuk itu, kritik dan saran diharapkan dalam rangka perbaikan publikasi di masa datang.

Jakarta, Mei 2018

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bappenas

DR. IR. SUBANDI SARDJOKO, M.SC

xiii

DAFTAR SINGKATAN

APK Angka Partisipasi Kasar

AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

BPS Badan Pusat Statistik

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

DI Daerah Istimewa

DKI Daerah Khusus Ibukota

HIV Human Immunodeficiency Virus

IDI Indeks Demokrasi Indonesia

IPM Indeks Pembangunan Manusia

IPP Indeks Pembangunan Pemuda

IQR Interguartile Range

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

MSBP Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan

NEET Not In Employment, Education or Training

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

PCA Principle Component Analysis

Perpres Peraturan Presiden

RI 4.0 Revolusi Industri 4.0

RKP Rencana Kerja Pemerintah

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SD Standar Deviasi

SMA Sekolah Menengah Atas

SMP Sekolah Menengah Pertama

TPB Tujuan Pembangunan Berkelanjutar

TPT Tingkat Pengangguran Terbuka

UU Undang-undang

UUD Undang-undang Dasar

UNFPA United Nations Population Fund

YDI Youth Development Index



IKHTISAR EKSEKUTIF

embangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam mempersiapkan rangka generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Nilai penting ini semakin terasa kuat apabila hal ini dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau the Sustainable Development Goals (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan pemuda sendiri perlu ditopang oleh beragam kebijakan yang berbasis data dan informasi. Kerangka kerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) telah disusun sejalan dengan TPB, sehingga IPP berperan penting dalam pelaporan pencapaian TPB di Indonesia. Indeks Pembangunan Pemuda berperan penting dalam membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional dan propinsi untuk meninjau keefektifan kebijakan dan program saat ini yang berkaitan dengan pemuda, terutama yang sejalan dengan pelaksanaan TPB di Indonesia. Indeks Pembangunan Pemuda atau Youth Development Index (YDI) mencakup lima domain, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP memberikan informasi berharga tentang sebaran demografi suatu negara, dan menjadi suatu tolak ukur untuk berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan pemuda yang selama ini telah dimulai oleh pemerintah. Lebih lanjut, laporan IPP perlu dilihat sebagai suatu hasil dari kolaborasi berbagai kementerian dan kerjasama antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemuda sendiri sebagai bagian terpenting.

Laporan ini menggambarkan bahwa pembangunan pemuda mengalami sejumlah kemajuan, tetapi kerja keras masih dibutuhkan untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam rentang nilai 0-100, tingkat IPP tahun 2016 mencapai 50,17. Tahun sebelumnya IPP baru sebesar 47,33 poin. Domain pendidikan memiliki nilai indeks terbaik di antara lima domain IPP dalam dua tahun berturutturut, karena sumbangan kuat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah dan rata-rata lama sekolah. Domain ini meraih nilai 63.30 selama 2015-2016. Dari sisi perubahan nilai indeks, domain gender dan diskriminasi mengalami peningkatan yang terbesar. Peningkatan ini berasal dari kenaikan indeks dari 36,67 menjadi 43,33 sepanjang tahun 2015-2016. Hal ini terjadi karena perbaikan indikator perkawinan usia anak dan pemuda perempuan bekerja di sektor formal. Meskipun domain lapangan dan kesempatan kerja tercatat sebagai domain dengan perbaikan terbesar kedua, domain ini masih membutuhkan perhatian khusus karena domain ini adalah domain terlemah dengan indeks 35 dan 40 sepanjang dua tahun.

Secara keseluruhan, sebagian besar provinsi mengalami kemajuan, dimana dalam IPP ini tercatat ada 30 provinsi yang mengalami perubahan positif. Pada tahun 2016, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama untuk IPP secara keseluruhan dan mendapatkan indeks tertinggi pada domain pendidikan, domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi. Setidaknya ada enam provinsi yang melakukan lompatan besar, termasuk Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami lompatan terbesar dari tahun 2015 ke 2016 karena menurunnya tingkat kesakitan pemuda dan kehamilan remaja. Di bagian lain, ada beberapa provinsi yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kebijakan dan program pembangunan pemuda, seperti Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah yang mengalami penurunan IPP. Kepulauan Riau mengalami penurunan terbesar, karena meningkatnya kehamilan remaja, perkawinan usia anak dan tingkat kesakitan pemuda, disertai dengan menurunnya partisipasi pemuda di sekolah menengah. Kalimantan Tengah juga membutuhkan pendekatan khusus karena provinsi ini mengalami penurunan IPP dan terus menduduki peringkat terbawah IPP, bersama Kalimantan Selatan pada tahun 2016. Oleh karena itu, provinsi-provinsi tersebut membutuhkan perhatian khusus untuk mempercepat pembangunan pemuda di kedua daerahnya masing-masing.

Dalam IPP 2017 ini tergambar jelas bahwa capaian nasional pembangunan pemuda ditopang oleh capaian provinsi-provinsi. Provinsi-provinsi dengan perubahan IPP yang besar memperbaiki peringkat relatifnya terhadap provinsi-provinsi lain. Pada saat yang sama, perubahan IPP yang besar juga menunjukkan adanya akselerasi pembangunan pemuda di dalam provinsiprovinsi itu. Dalam akselerasi ini, provinsiprovinsi yang tertinggal dapat menyusul provinsi-provinsi yang lebih dahulu maju. Dalam proses ini, provinsi-provinsi dengan nilai IPP 2015 yang rendah mengalami perubahan IPP 2015-2016 yang besar. Sebaliknya, provinsi-provinsi dengan IPP 2015 yang tinggi bertendensi tumbuh dengan tingkat yang rendah. Gejala semacam ini lazim ditemui dalam dinamika pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Saat ini tandatanda yang serupa tengah dirasakan dalam pembangunan pemuda.

Perubahan-perubahan IPP dan lompatanlompatan peringkat provinsi tidak lain mencerminkan adanya gerak dinamis pembangunan pemuda di provinsiprovinsi. Dinamika tersebut telah membuat kesenjangan antarprovinsi dalam pembangunan pemuda semakin mengecil. Saat ini ketidakmerataan IPP antara satu provinsi dengan provinsi lain cenderung berkurang. Ini juga berarti ada pergerakan pembangunan pemuda yang lebih dinamis di provinsi-provinsi yang sebelumnya relatif tertinggal dalam IPP. Provinsi-provinsi ini dapat menjadi tempat pembelajaran penting untuk berbagi kiat-kiat kebijakan pembangunan pemuda. Praktik-praktik terbaik tampaknya perlu dijelajahi lebih jauh dan bukti-bukti perlu disajikan, karena fenomena 'lompatan besar' (leap-frogging) bukan terjadi tanpa sebab.

Laporan IPP diharapkan tidak hanya dipandang sebagai suatu tinjauan yang rinci tentang situasi pemuda di Indonesia, namun juga sebagai titik awal untuk mengukur keadaan saat ini dan dampak berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan pembangunan pemuda. Para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah perlu menarik pelajaran dan pengalaman dari provinsi-provinsi yang berkinerja mengesankan. Provinsi-provinsi yang tertinggal dapat melakukan adopsi, adaptasi, dan implementasi pengalaman dan pelajaran dari provinsi-provinsi yang

berkinerja mengesankan dengan lebih cepat. Para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah perlu melakukan evaluasi dan refleksi pada indikator-indikator yang tidak berkinerja, baik karena tingkat capaian yang rendah maupun perubahan yang kurang progresif. Penyebab-penyebab pokok perlu ditelusuri agar kemudian targettarget baru dan cara-cara yang lebih inovatif dapat ditetapkan. Hal ini berarti pula penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memantau perkembangan IPP melalui penerbitan laporan IPP secara berkala.

Akhirnya, capaian-capaian yang telah diraih ini patut disyukuri, walau tentu saja harus diakui masih banyak agenda yang perlu dijalankan agar indikator-indikator yang ada berkinerja lebih baik. Ini semua membutuhkan intervensi kebijakan dan keterlibatan para pemangku kepentingan yang luas. Dalam intervensi dan keterlibatan pemangku kepentingan ini, selalu penting untuk menempatkan pemuda sebagai subyek dan aktor utama, agar pemuda memainkan peran bagi dirinya—juga bagi bangsanya kini dan nanti.



I. PEMBANGUNAN PEMUDA DAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA





ari depan suatu bangsa dapat diprakirakan dengan melihat kondisi pemuda dan usaha-usaha yang dibuat untuk membangun pemuda hari ini. Saat ini komposisi penduduk Indonesia diwarnai oleh porsi penduduk muda yang besar. Pemuda pada rentang usia 16-30 tahun, mengikuti batasan Undang-Undang 40/2009, meliputi kira-kira seperempat dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk pemuda yang berjumlah sekitar 60 juta jiwa ini merupakan jumlah yang terbesar dalam sejarah demografi Indonesia, meskipun tingkat fertilitas dan pertumbuhan penduduk tahunan terus menurun. Jumlah penduduk pemuda Indonesia ini sekitar dua kali lebih besar daripada jumlah keseluruhan penduduk negara-negara tetangga seperti Australia dan Malaysia—masing-masing 25 dan 30 juta jiwa. Tidak banyak negara memiliki kapasitas kuantitas kaum muda seperti ini. Selain Brazil, India, dan Tiongkok, Indonesia merupakan satu di antara sedikit negara itu.

Jumlah penduduk pemuda yang besar dapat menjadi potensi kekuatan, tetapi dapat juga menjadi sumber kelemahan. Hal ini bergantung pada bagaimana penduduk pemuda ini dipandang, diperlakukan, dan dipersiapkan. Bonus demografi, di mana proporsi jumlah pemuda lebih besar, misalnya, akan membawa dampak positif bila kelompok pemuda dikembangkan dari segala aspek, utamanya pendidikan, kesehatan, pasar kerja, partisipasi ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Dalam kalimat lain, manfaat bonus demografi akan tergantung pada apa dan seberapa besar investasi ditanamkan pada generasi ini. Hal yang sebaliknya terjadi bila investasi tidak ditanam dan ditumbuhkan pada penduduk pemuda ini.

Dalam pandangan itu, tak sulit dipahami bahwa membangun pemuda adalah juga membangun masa depan. Membangun pemuda tidak lain merupakan upaya untuk memperbesar kapabilitas pemuda dalam mengambil peran dalam setiap kesempatan. Dalam perjalanan sejarah, pemuda sudah membuktikan bahwa hampir tidak ada episode sejarah berlangsung tanpa peran pemuda. Begitu pula dengan masa depan. Kelak, hanya dalam satu periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), pemudalah yang akan menjadi pemegang kendali perjalanan bangsa. Oleh sebab itu, status dan dinamika penduduk muda dari masa ke masa perlu dicermati dan dipahami. Status dan dinamika kehidupan penduduk muda ini dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pembangunan yang telah, sedang, serta akan dikembangkan dan dilaksanakan.

Laporan ini berbicara tentang pembangunan pemuda dengan tema sentral Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks ini memotret situasi pembangunan pemuda dalam disagregasi data yang memadai, baik dari segi tema maupun wilayah administrasi yang dicakup. Disagregasi yang pertama merujuk pada lima domain IPP, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Sementara itu, disagregasi yang kedua merujuk pada cakupan 34 provinsi. Laporan ini menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lain untuk dapat memantau pergerakan data dari waktu ke waktu, mengambil manfaat, serta memproduksi inisiatif-inisiatif yang mengakselerasi capaian dan mengejar indikator-indikator yang tertinggal.

I.1 Mendefinisikan Pemuda dan Pembangunan Pemuda

'Pemuda' dalam pengertian awal merujuk pada kelompok usia demografi. Namun demikian, kelompok usia demografi ini oleh lembaga dan organisasi yang berbeda didefinisikan secara berbeda. Dalam tabel 1.1, tercantum beragam definisi pemuda di tingkat global yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam usaha untuk memperjelas definisi pemuda. Indonesia sendiri, sebagaimana disebut di awal, secara formal menetapkan batasan pemuda seperti dinyatakan oleh Undang-Undang 40/2009 tentang kepemudaan, yakni 16-30 tahun. Sementara itu dalam pencatatan dan analisis statistik yang lazim, sebagaimana pula dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lebih sering disajikan kelompok usia 15-29 tahun—yang terbagi menjadi 15-19, 20-24, dan 25-29 tahun—sebagai garis batas demografi konvensi umum. Namun demikian,

dalam rangka mengulas kondisi pemuda Indonesia, BPS juga menerbitkan secara berkala publikasi Statistik Pemuda yang secara khusus merujuk pada ketetapan UU 40/2009 itu.

Tentu saja "muda" tidak hanya dapat dilihat dalam makna batas usia demografis. Di luar itu, "muda" mencakup ruang yang luas. "Muda" juga dapat dipahami dari perspektif maturitas organ tubuh dan emosi, identitas adolescence, new entries pada pasar kerja, entrepreneurial startups, young voters, hingga ke ruang-ruang perspektif lain. Dalam konteks inilah pembangunan pemuda diletakkan sebagai perluasan kapabilitas pemuda—makna yang setara "pembangunan manusia" oleh Amartya Sen. Perluasan kapabilitas ini tak lain adalah usaha untuk meningkatkan keleluasaan dalam melakukan pilihan-pilihan, yakni meningkatkan akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memilih apa yang dipandang bernilai.

Tabel 1.1 Usia Pemuda Menurut Beberapa Organisasi

Organisasi	Batasan Usia Pemuda
United Nations (Adolescent: 10-19; Youth: 15-24; Young People: 10-24)*]	10–24
The Commonwealth	15–29
European Union (EU)	15–29
UN Habitat (Youth Fund)	15–32
World Bank (WB)	15–34
African Union (AU)	15–35

Sumber: Tabel 1.1 halaman 8, Global Youth Development Index and Report 2016. The Commonwealth. *] Secretary-General's Report to the General Assembly, A/40/256, 1985.

Catatan: Sumber-sumber lain menyajikan batasan usia yang berbeda mengenai definisi pemuda. Lihat, misalnya, Definition of Youth, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejalan dengan perluasan kapabilitas ini, UU 40/2009 tentang Kepemudaan—Bab I Pasal 1—mengkategorikan pembangunan pemuda sebagai pelayanan kepemudaan dalam tiga bentuk besar, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Selain itu, terdapat enam istilah turunan yang mengikutinya, yakni pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, kemitraan (dengan pemuda), organisasi kepemudaan, penghargaan pada pemuda. Semua istilah di atas terbentang dari usaha aktif untuk menyediakan kesempatan hingga wadah pengembangan diri pemuda. Istilah-istilah itu sendiri merujuk pada 10 asas norma (Bab I Pasal 2), yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis. keadilan. partisipatif. kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Undang-undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Presiden (Perpres) 66/2017 tentang "Koordinasi Lintas-sektor Penyelenggaraan Strategis Pelayanan Kepemudaan" (Kotak 1.1).

Kepustakaan pembangunan juga menyediakan banyak pandangan mengenai pembangunan pemuda. Community Network for Youth Development (2001), misalnya, menyebut bahwa pembangunan pemuda ialah "proses di mana semua pemuda mencari cara untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosial dasar mereka dan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan di masa remaja dan dewasa muda". Sementara itu, Pitmann (1993, seperti dikutip Butt and Mehmood, 2010) mendefinisikannya secara lebih spesifik, yaitu "proses perkembangan yang terus berlanjut di mana semua pemuda terlibat untuk (1) memenuhi kebutuhan

dasar pribadi dan sosial mereka agar diperhatikan, merasa dihargai. berguna dan berpijak pada spiritual, dan (2) membangun keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan mereka berfungsi dan berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. The Commonwealth (2013)mendefinisikan pembangunan pemuda sebagai usaha "meningkatkan status pemuda, memberdayakan mereka untuk membangun kompetensi dan kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan. Hal ini akan memungkinkan pemuda untuk berkontribusi dan mendapatkan keuntungan dari situasi politik yang stabil, situasi ekonomi yang layak, dan situasi hukum yang mendukung, yang memungkinkan pemuda dapat berpartisipasi penuh sebagai warga negara yang aktif di negaranya masing-masing."

Definisi-definisi itu memperlihatkan bahwa pembangunan pemuda mencakup berbagai domain atau dimensi yang perlu ditangani secara memadai oleh kebijakan sektor atau kementerian yang relevan di negara. Berbagai kebijakan publik dan programprogram turunannya sangat berperan dalam mencapai tujuan pembangunan pemuda yang diinginkan. Semua kebijakan itu memberi arahan kepada para pemangku kepentingan tentang peran masing-masing dan ikut menyediakan sumber daya yang diperlukan. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, data pembangunan, termasuk IPP, memainkan peran kunci sebagai sumber daya informasi bagi pengambilan keputusan kebijakan.

Kotak 1.1 Peraturan Presiden 66/2017

Tercatat dalam Lembaran Negara No. 163 tahun 2017, Perpres tentang "Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan" ini diterbitkan dalam tujuh bab dan 26 pasal, dan ditandatangani Presiden pada tanggal 19 Juli 2017. Peraturan ini mengganti Keputusan Presiden No. 23 tahun 1979 tentang "Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda" yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini.

Di luar Ketentutan Umum dan Ketentuan Penutup, lima bab pokok dalam Perpres ini adalah (1) Lingkup Koordinasi Strategis Lintas Sektor, (2) Strategi dan Pelaksanaan, (3) Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan, (4) Mekanisme Kerja, serta (5) Pendanaan. Koordinasi strategis lintas sektor meliputi (a) program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; (b) kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan (c) kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dalam hal strategi dan pelaksanaan, Pemerintah Pusat (a) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antar kementerian/lembaga; (b) meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (c) mengidentifikasi peran masingmasing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan (d) membangun komunikasi dan kemitraan antar kementerian/lembaga.

Selanjutnya, guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dibentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan yang dipimpin oleh Presiden, yang juga berperan sebagai ketua pembina pengarah, sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai ketua pelaksana. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kemitraan kepemudaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan. Dalam pelaksanaan di daerah Tim Koordinasi tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, sedangkan Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/Walikota.

Tentang mekanisme kerja, hubungan kerja Tim Koordinasi bersifat koordinatif dan konsultatif dengan masing-masing kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, sebagaimana juga hubungan kerja Tim Koordinasi, Tim Koordinasi tingkat provinsi, dan Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota.

Akhirnya, dalam hal pendanaan, pendanaan penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

I.2 Mengukur Pembangunan Pemuda

Prosedur

Dalam laporan ini, pembangunan pemuda diukur melalui IPP. Indeks ini memiliki lima fungsi. Pertama. IPP akan memberikan indikasi secara keseluruhan — lintas wilayah dan lintas sektor — tentang kemajuan pembangunan pemuda. Kedua, IPP juga berfungsi sebagai pengarah dan insentif bagi domain atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus para pemangku kepentingan—pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, serta kelompok pemuda sendiri. Ketiga, IPP berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan pemuda yang dibandingkan antarwaktu antarwilayah serta menunjukkan dampak yang telah disepakati bersama di antara para pemangku kepentingan. Keempat, IPP dapat pula memberikan arah penelitian mengenai berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan pemuda yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan kebijakan dan program pemuda yang berbasis data. Kelima, IPP dapat mengukur dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam proses metodologinya, IPP dibangun dengan memperhatikan aspekaspek akademis, teknokratis, dan juga berbasis legitimasi. Secara akademis, IPP mengikuti aturan metodologi yang ketat dan terstandardisasi. Prosedur statistika melalui serangkaian uji telah dijalankan untuk memenuhi kebutuhan metodologi ini.¹ Selanjutnya, secara teknokratis, indeks

ini mempertimbangkan target-target pemerintah dalam pembangunan pemuda. Hal ini sejalan dengan kebutuhan koordinasi dan integrasi pembangunan pemuda dalam pembangunan secara keseluruhan. Sementara itu, untuk memberi basis legitimasi pada indeks ini, IPP disusun juga melalui serangkaian konsultasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pemerintah dan nonpemerintah—utamanya pemuda (Kotak 1.2).

keseluruhan, proses merancang IPP terdiri dari beberapa tahap. Pertama, melakukan tinjauan literatur tentang pembangunan pemuda dan beberapa pengalaman dalam menyusun indeks digunakan sebagai dasar untuk memilih domain, indikator, dan formula penghitungan. Kedua, konsultasi dengan para pakar dan para pemangku kepentingan untuk menetapkan domain, indikator, bobot indikator, dan hal-hal lain yang relavan dari sudut pandang kebutuhan dan tujuan para pemangku kepentingan. Ketiga, eksplorasi, kalkulasi, dan analisis data yang bersifat teknis. Keempat, memasukkan umpan balik dan tanggapan yang relevan dari para pakar mengenai hasil Indeks ke dalam laporan IPP. Kelima, diseminasi laporan melalui beragam media untuk memperkuat prakarsa pembangunan dan kebijakan publik berbasis bukti mengenai pemuda (Gambar 1.1).

¹ Termasuk di antaranya adalah uji kolinieritas ganda, yakni apakah indikator-indikator terpilih berkorelasi satu sama lain, sehingga uji ini dapat memeriksa informasi yang redudαnt.

Kotak 1.2 Konsultasi dengan Pemuda

Konsultasi dengan perwakilan organisasi pemuda dilakukan untuk mendapatkan sejumlah masukan. Keterlibatan pemuda dalam merancang IPP Indonesia telah menjadi prioritas Pemerintah Indonesia dan UNFPA. Sebuah lokakarya bersama pemuda diadakan untuk meninjau IPP dari negara atau organisasi lain dan mempertimbangkan kesesuaiannya bagi Indonesia.

Perwakilan jaringan-jaringan pemuda meninjau indikator IPP yang digunakan oleh beberapa negara tetangga dan membahas masalah yang mendesak di kalangan pemuda. Dalam pertemuan itu disepakati pentingnya pemilahan berdasarkan provinsi dan jenis kelamin untuk melokalkan isu-isu yang diukur dalam IPP. Usia dan definisi pemuda dibahas secara rinci, sekaligus disadari pula bahwa isu dan hambatan utama yang dihadapi oleh "remaja"—pemuda yang lebih muda— berbeda dengan apa yang dihadapi oleh pemuda yang lebih tua.

Sejumlah isu diangkat dalam proses konsultasi dengan pemuda. Beberapa di antaranya adalah penyandang disabilitas, baik yang terlihat dan tersembunyi, yang membutuhkan kesetaraan akses dan dukungan. Suatu survei nasional tentang disabilitas kelak dapat menjadi sumber informasi bagi kepentingan ini. Ada pula diskusi tentang beragam tantangan pemuda minoritas, maupun pemuda umumnya, dalam mengakses beragam sumber untuk peningkatan kapabilitas.

Hambatan ekonomi merupakan isu penting dan kompleks yang dihadapi pemuda, termasuk hambatan di pasar kerja bagi perempuan dan minoritas. Ibu-ibu muda menghadapi keterbatasan waktu dan akses pada pendidikan dan pekerjaan. Tentang pekerjaan informal dan pelanggaran batas jam kerja pada pemuda yang bekerja, konsultasi sampai pada kesimpulan bahwa situasi ini merupakan penghalang bagi pemuda untuk melanjutkan pendidikan dan menjebak mereka dalam eksploitasi. Upah yang adil sesuai dengan jam kerja dan beban kerja yang wajar dipandang sebagai norma yang dibutuhkan agar pemuda dapat berkembang dalam pekerjaan. Kewirausahaan masih sulit untuk dikembangkan, karena sistem yang ada belum mendukung pemuda untuk mendapatkan pinjaman modal memulai usaha, selain pengurusan status hukum yang tak mudah untuk membangun usaha. Ada juga diskusi tentang beberapa jenis usaha yang sudah gagal pada saat mulai dijalankan sehingga mematahkan semangat pemuda lain yang ingin memulai usaha.

Selanjutnya, ada pula diskusi tentang pernikahan usia muda yang mengarah pada hubungan yang disertai dengan tindakan kekerasan dan kesulitan untuk keluar dari hubungan yang seperti ini. Ada juga diskusi seputar norma budaya yang beragam di Indonesia, yang dalam beberapa kasus, telah menyebabkan terjadinya perkawinan anak dan penolakan untuk melanjutkan pendidikan atau pekerjaan. Para pemuda peserta diskusi juga mendiskusi kebutuhan informasi dan layanan kesehatan reproduksi, misalnya informasi tentang pubertas dan seksualitas. Meskipun isu kesehatan reproduksi masih dianggap tabu dan tidak mudah, isu ini perlu dipahami dan diatasi dengan lebih baik.

Kesetaraan dalam mengakses ruang publik, termasuk gedung pemerintah dan ruang untuk mengadakan pertemuan juga mendapat perhatian oleh para pemuda peserta konsultasi IPP. Akses terhadap ruang publik ini dibutuhkan untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif dengan sesama pemuda. Selain itu ada juga diskusi bahwa pemuda membutuhkan kepercayaan dan kesempatan dari orang dewasa, termasuk pula kebutuhan akan layanan program yang dipersiapkan bagi pemuda.

Konsultasi dengan pemuda dalam penyusunan IPP telah menghasilkan usulan beberapa domain dan indikator yang selaras dengan IPP global seperti ditampilkan berikut:

Pendidikan	Kesehatan dan Kesejahteraan
 Lama rata-rata sekolah Partisipasi sekolah di tingkat menengah Tingkat partisipasi di perguruan tinggi Pelatihan vokasi (partisipasi dalam pelatihan) Tingkat akses internet (digital natives) 	 Angka kematian pemuda Angka kesakitan pemuda Persentase pemuda dengan pengetahuan HIV/AIDS yang komprehensif Penyalahgunaan obat Pemuda sebagai korban kejahatan Aktivitas olahraga
Kewirausahaan	Lapangan dan Kesempatan Kerja
 Keterlibatan pemuda dalam kegiatan kewirausahaan Keluarga dengan pemuda yang memiliki pin- jaman dari lembaga keuangan Sumber pendapatan keluarga dengan pemuda 	 Tingkat pengangguran pemuda Pemuda yang tidak bekerja, sekolah atau mengikuti pelatihan (NEET) Angka fertilitas remaja
Pendapatan dan Kesejahteraan	Partisipasi dan Kepemimpinan
 Persentase pemuda yang hidup di bawah garis kemiskinan Pengeluaran belanja keluarga Akses kepada beasiswa 	 Partisipasi dalam kegiatan kesukarelawanan Pemuda yang aktif dalam organisasi Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan budaya Mengemukakan pendapat politik
Gender dan Diskriminasi	
 Angka perkawinan anak Akses pendidikan bagi pemuda perempuan Pemuda perempuan yang memimpin di masyarakat Akses pekerjaan bagi pemuda perempuan 	
 Kekerasan dan kekerasan seksual Akses pendidikan bagi pemuda penyandang disabilitas Adanya kebijakan tentang akses terhadap transportasi umum bagi pemuda penyandang disabilitas 	

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Laporan IPP

Tinjauan Literatur:
Domain, Indikator,
dan Formula

Konsultasi
Pemangku
Kepentingan

Eksplorasi,
Kalkulasi,
dan Analisis Data

Umpan Balik
dan
Tanggapan

Diseminasi
Laporan

Domain dan Indikator

Pemuda, sebagaimana telah disebutkan, telah dan akan terus mengambil bagian dalam sejarah, dan bahkan menentukan pergerakan arah sejarah. Sumpah Pemuda 1928 adalah satu di antara episode sejarah—setelah episode pendahulunya, Kebangkitan Nasional 1908—yang di dalamnya pemuda menjadi aktor utamanya. Bahkan, hingga Proklamasi 1945 dan penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum dasar negara, jejak peran pemuda dapat teridentifikasi jelas, baik dalam aksi maupun substansi.

Substansi UUD 1945 sendiri amat relevan dengan IPP, utamanya dalam hal yang berhubungan dengan hak warga negara, keadilan dan akses terhadap sumber daya, kekayaan dan aset nasional, khususnya yang tercantum dalam Bab X, XA, XIII, dan XIV. Ketentuan dalam konstitusi telah direfleksikan di dalam UU yang terkait dengan hak warga negara, termasuk UU 40/2009 tentang Kepemudaan dan turunannya yaitu Perpres 66/2017 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan. Semua hal tersebut meniadi acuan dalam memilih domain dan indikator IPP. Hal ini menunjukkan bahwa IPP disusun seusai dengan amanat UUD dan UU, serta aturan turunannya dan tersusun dalam satu kesatuan kerangka regulasi. Tabel 1.2 memperlihatkan relevansi UUD 1945 dan IPP.

Selanjutnya, setelah IPP dibingkai dalam kerangka regulasi yang ada, penting pula bagi proses penyusunan IPP ini untuk melihat pengalaman pelbagai negara dan organisasi internasional dalam merumuskan serta mengembangkan domain dan indikator IPP. Seri konsultasi pakar dan pemuda juga berada dalam lingkup ini. Ini semua akan berhadapan dengan ketersediaan data di setiap domain dan indikator yang dapat dipilah menurut umur, jenis kelamin (bila diperlukan), dan provinsi. Secara keseluruhan, indikator-indikator IPP dinilai dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang pembangunan pemuda.

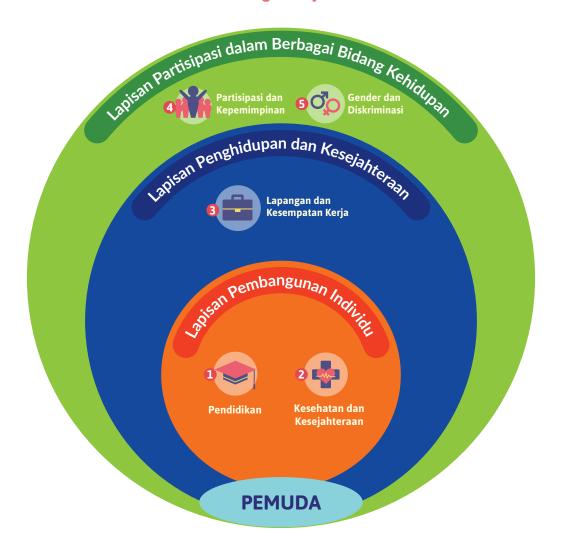
Pembangunan pemuda sendiri dapat ditelisik melalui tiga lapisan, yakni pengembangan individu, pengembangan penghidupan, serta pengembangan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam lapisan pengembangan individu, **IPP** menyertakan 'pendidikan' serta 'kesehatan dan kesejahteraan' sebagai domainnya. Sementara itu, dalam lapisan pengembangan penghidupan, **IPP** memasukkan 'lapangan dan kesempatan kerja' sebagai domain berikutnya. Selanjutnya adalah pengembangan partisipasi, yang di dalamnya IPP mempertimbangkan 'partisipasi dan kepemimpinan' serta 'gender dan diskriminasi' sebagai dua domain terakhir.

Secara keseluruhan, lapisan pembangunan pemuda dengan domain dan indikator terkaitnya digambarkan seperti berikut (Gambar 1.2):

Tabel 1.2 UUD 1945 dan Bab dan Pasal Berkorelasi dengan IPP

No.	Bab dan Pasal	Ketentuan	Domain dan Indikator IPP Relevan
1	Bab X		
	Pasal 27 (2)	Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak	Pekerjaan dan kehidupan yang layak
	Pasal 28	Ruang untuk partisipasi politik	Partisipasi politik
2	Bab XA		
	Pasal 28B (2)	Hak anak untuk memiliki kehidupan, tumbuh, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi
	Pasal 28C (1) and Pasal 28F	Hak untuk pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (ditambahkan: kesehatan), pendidikan, dan mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni (ditambahkan: kewirausahaan, teknologi informatika dan penggunaannya)	Kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, teknologi informatika dan penggunaannya.
	Pasal 28C (2)	Hak berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan bangsa	Partisipasi masyarakat
	Pasal 28D (2)	Hak atas ketenagakerjaan dan yang terkait dengan keadilan dalam pemberian imbalan dan hubungan kerja (lihat juga Pasal 27 (2)).	Keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan
3	Bab XIII		
	Pasal (1), (2), dan (5)	Hak dan kewajiban untuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan (kewirausahaan dan teknologi informatika/penggunaannya)	Pendidikan, inovasi, kewirausahaan, teknologi informatika dan penggunaannya
4	Bab XIV		
	Pasal 33 (3) dan Pasal 34 (1) dan (3)	Akses pemuda terhadap aset ekonomi; Hak anak yatim dan anak-anak miskin untuk mendapatkan layanan perawatan dari negara; dan penyediaan layanan kesehatan	Akses terhadap aset ekonomi; merawat anak yatim dan anak- anak miskin, dan layanan kesehatan

Gambar 1.2 Kerangka Kerja IPP Indonesia



Domain dan indikator yang terpilih dalam IPP 2017 belum sepenuhnya mencakup seluruh mandat konstitusi, selain juga tidak persis setara dengan domain dan indikator IPP yang telah dikembangkan beberapa negara dan organisasi internasional. Isu-isu teknis di seputar ketiadaan data menjadi pertimbangan dasar untuk memasukkan dan tidak memasukkan domain dan indikator lain. Dalam jangka panjang, perluasan domain dan indikator amat mungkin dilakukan, sejalan dengan ketersediaan data. Kelak, IPP dapat mencakup indikator-indikator baru yang relevansinya kuat dengan pembangunan seperti pengembangan pemuda, kesehatan mental, dan inklusivitas.

Laporan IPP 2017 ini menggunakan indikator dengan data yang relatif tersedia secara berkala. Namun demikian, laporan ini terbuka bagi analisis atas indikator-indikator lain yang relevan untuk disandingkan. Pada saat yang sama, indikator proksi juga kelak perlu dikembalikan pada indikator rujukannya. Sebagai contoh, angka fertilitas remaja telah dipelajari dan disepakati sebagai indikator yang lebih kuat daripada kehamilan remaja. Namun demikian, indikator ini tidak dimasukkan sebagai indikator IPP karena ketiadaan data berkala. Menurut BPS. Susenas Kor, yang datanya tersedia setiap tahun, tidak dirancang sebagai survei kependudukan sehingga tidak dapat digunakan untuk

menghitung fertilitas remaja. Apabila kelak, data fertilitas remaja dapat tersedia dalam periode yang lebih rutin, indikator ini dapat dimasukkan dalam IPP. Indikator penyandang disabilitas juga belum dimasukkan ke dalam laporan ini. Kelak, setelah pengumpulan data

disabilitas Susenas tahun 2018 dilakukan, akan data yang lebih memadai sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan pada IPP tahun 2018. Tabel 1.3 menyajikan 15 indikator yang terkelompok dalam lima domain dengan sumber data rujukannya.

Tabel 1.3 Daftar Indikator, Definisi, dan Sumber Data IPP

No	Indikator IPP	Deskripsi Indikator	Sumber dan Ketersediaan Data	Keterpilahan Data		
D1	Domain Pendidikan					
X1	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 16-30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi	Umur dan Jenis Kelamin		
X2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok umur 13-18 tahun	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi	Umur dan Jenis Kelamin		
X3	APK Perguruan Tinggi Persentase mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D1 sampai S3) dalam kelompok umur 19-24 tahun Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi		setiap tahun, nasional dan	Umur dan Jenis Kelamin		
D2	Domain Kesehatan	dan Kesejahteraan				
X4	Angka Kesakitan Pemuda	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/ aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi	Umur dan Jenis Kelamin		
X5	Pemuda Korban Kejahatan	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi	Umur dan Jenis Kelamin		
X6	Pemuda Merokok			Umur dan Jenis Kelamin		
X7	Remaja Perempuan sedang Hamil ¹	Persentase remaja perempuan umur 15-18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin umur 15-18 tahun²	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi	Umur		

No	Indikator IPP	Deskripsi Indikator	Sumber dan Ketersediaan Data	Keterpilahan Data
D3	Domain Lapangan	dan Kesempatan Kerja		
X8	Pemuda Wirausaha Kerah Putih (white collar)	Persentase penduduk umur 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap, dan jenis jabatan white collar (tenaga professional atau teknisi; kepemimpinan atau ketatalaksanaan; pejabat pelaksana atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda umur 16-30 tahun	Sakernas, setiap tahun, nasional dan provinsi	Umur dan Jenis Kelamin
X9	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	Persentase jumlah pengangguran Saker pemuda umur 16-30 tahun terhadap setiap		Umur dan Jenis Kelamin
D4	Domain Partisipasi	dan Kepemimpinan³		
X10	Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Persentase pemuda umur 16 – 30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	Susenas MSBP ⁴ , setiap 3 tahun, nasional dan provinsi	Umur dan Jenis Kelamin
X11	Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	Persentase pemuda berumur 16- 30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	Susenas MSBP, setiap 3 tahun, nasional dan provinsi	Umur dan Jenis Kelamin
X12	Pemuda Berpendapat dalam Rapat Kemasyarakatan Kemasyarakatan Rapat Kemasyarakatan Rapat Kemasyarakatan Rapat Kemasyarakatan Kemasyarakatan Rapat Fersentase pemuda berumur 16 tahun yang pernah mengikuti ke pertemuan (rapat) di lingkungal sekitar dalam setahun terakhir memberikan saran/pendapat da rapat tersebut dalam kelompok		Susenas MSBP**, setiap 3 tahun, nasional dan provinsi	Umur dan Jenis Kelamin
D5	Domain Gender da	Domain Gender dan Diskriminasi ⁵		
X13	Perkawinan Usia Anak Persentase pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 tahun dalam kelompok perempuan umur 20-24 tahun		Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi	Umur

No	Indikator IPP	Deskripsi Indikator	Sumber dan Ketersediaan Data	Keterpilahan Data
X14	Pemuda Perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi	Persentase pemuda perempuan berumur 16-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi dalam kelompok perempuan umur 16-24 tahun	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi	Umur
X15	Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	Persentase pemuda perempuan berumur 16-30 tahun yang bekerja di sektor formal dalam kelompok perempuan umur 16-30 tahun	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi	Umur

Keterangan:

- 1) Ini adalah indikator proksi untuk angka fertilitas remaja yang saat ini belum tersedia setiap tahun.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 25/2014 tentang Kesehatan Anak mendefinisikan remaja sebagai kelompok demografi dalam usia 10-18 tahun. Karena data yang tersedia dimulai dari usia 15 tahun, maka kelompok umur untuk indikator ini adalah 15 sampai 18 tahun.
- 3) Data dalam semua indikator di domain ini belum tersedia setiap tahun.
- 4) MSBP adalah Modul Sosial, Budaya dan Pendidikan
- 5) Indikator tentang pemuda penyandang disabilitas dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan pada tahun 2018 dengan menggunakan data terbaru BPS.

II. PEMUDA INDONESIA KINI: PERSPEKTIF NASIONAL





embangunan pemuda adalah proses yang dinamis dengan cakupan dimensi yang luas. IPP mencoba memotret wajah dinamis pembangunan pemuda dan dimensi yang dicakupnya melalui 15 indikator yang dikelompokkan dalam lima domain (Kotak 2.1). Indeks ini, dalam skala 0-100, dihitung berdasarkan data 2015 dan 2016 yang dikumpulkan dari beragam instrumen pengumpul data BPS di seluruh provinsi Indonesia. Dua tahun pengamatan ini tidak dimaksudkan sebagai analisis dampak evaluasi (evaluation impact) atas suatu kebijakan atau program tertentu yang telah dijalankan, tetapi untuk menangkap perkembangan terkini dengan basis alasan teknis ketersediaan data, selain tentu basis yang lebih substantif.

Penulusuran capaian IPP berikut ini akan disajikan dalam dua bagian. Bagian pertama menampilkan capaian umum IPP yang dilihat dari dinamika provinsi-provinsi, sedangkan bagian kedua menunjukkan capaian setiap domain dan indikator-indikator (sub-indeks) pendukungnya. Dalam hubungan ini, hasilhasil perhitungan IPP akan dipaparkan dan diperbandingkan. Untuk mendapatkan gambaran pembuka, ringkasan hasil perhitungan IPP 2015-2016 disajikan dalam Tabel 2.1 (berbasis provinsi) dan Gambar 2.1 (berbasis domain).

Kotak 2.1 Data dan Interpretasi IPP

Untuk menelusuri IPP lebih jauh, beberapa hal mengenai intepretasinya disampaikan di sini:

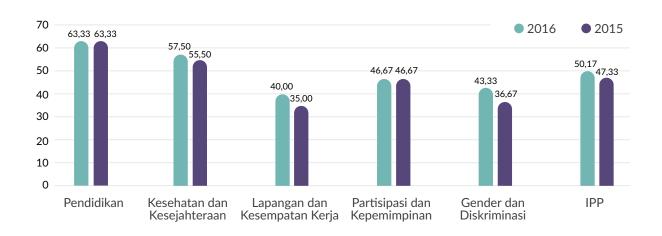
- Agregat. IPP secara keseluruhan berada dalam rentang nilai 0-100, dengan intepretasi positif: semakin suatu capaian menuju ke indeks 100, capaian semakin baik.
- Domαin. IPP terdiri dari lima domain: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Masing-masing domain diukur dalam skala indeks yang sama, 0-100, dan dengan intepretasi yang sama.
- Indikator. Indikator dicatat dalam dua bentuk:
 - O Data Awal. Data dari sumber BPS yang disajikan dalam persen, kecuali untuk rata-rata lama sekolah yang disajikan dalam tahun. Intepretasinya tergantung jenis data yang ditampilkan. Contoh: intepretasi data rata-rata lama sekolah bersifat positif: makin besar, makin baik. Ini berlawanan dengan, misalnya, intepretasi data tingkat pengangguran terbuka, pemuda merokok, atau yang semakna: makin kecil, makin baik.
 - O Data Transformasi. Perubahan data awal ke dalam rentang 0-10 untuk menjadi sub-indeks, dengan intepretasi positif: semakin besar nilai sub-indeks, capaian semakin baik. Indikator yang ditransformasi dalam bagian ini dinyatakan sebagai sub-indeks.

Tabel 2.1 Capaian IPP dan Peringkat Provinsi 2015-2016

	IPP	Peringkat		IPP	Peringkat
Nama Provinsi	2015	2015	Nama Provinsi	2016	2016
DI Yogyakarta	63,50	1	DI Yogyakarta	64,67	1
Bali	60,00	2	Bali	59,67	2
Kalimantan Timur	50,83	6	Kalimantan Timur	56,33	3
Maluku Utara*	49,50	9	Maluku Utara	54,67	4
Maluku	46,00	23	Maluku	54,33	5
Bengkulu*	46,50	18	Bengkulu	53,83	6
Sulawesi Utara*	44,83	28	Sulawesi Utara	53,50	7
DKI Jakarta	51,50	4	DKI Jakarta	52,00	8
Aceh	50,50	7	Aceh	51,83	9
Sumatera Barat	48,00	11	Sumatera Barat*	51,17	10
Kalimantan Utara*	49,50	8	Kalimantan Utara*	51,17	11
Kepulauan Riau	55,83	3	Kepulauan Riau	50,83	12
Jawa Timur	47,17	14	Jawa Timur	50,67	13
Jawa Tengah	47,67	12	Jawa Tengah*	50,17	14
Gorontalo*	46,50	19	Gorontalo*	50,17	15
Sumatera Selatan	41,50	34	Sumatera Selatan	50,00	16
Sumatera Utara	51,33	5	Sumatera Utara*	49,67	17
Riau	46,83	17	Riau*	49,67	18
Jambi	49,33	10	Jambi*	49,67	19
Kepulauan Bangka Belitung	45,50	25	Kepulauan Bangka Belitung*	49,50	20
Sulawesi Barat*	47,00	16	Sulawesi Barat*	49,50	21
Banten	45,83	24	Banten	49,17	22
Sulawesi Tengah*	44,83	29	Sulawesi Tengah	49,00	23
Papua	47,33	13	Papua	48,83	24
Papua Barat*	46,50	20	Papua Barat	48,67	25
Nusa Tenggara Timur*	44,83	27	Nusa Tenggara Timur	47,83	26
Sulawesi Tenggara*	47,00	15	Sulawesi Tenggara	47,67	27
Kalimantan Barat	45,17	26	Kalimantan Barat	47,50	28
Nusa Tenggara Barat	43,50	32	Nusa Tenggara Barat	47,33	29
Sulawesi Selatan*	46,17	22	Sulawesi Selatan	46,67	30
Jawa Barat	44,50	30	Jawa Barat	46,33	31
Lampung	43,17	33	Lampung	46,00	32
Kalimantan Tengah*	46,17	21	Kalimantan Tengah*	45,83	33
Kalimantan Selatan	43,83	31	Kalimantan Selatan*	45,83	34
Indonesia	47,33		Indonesia	50,17	

^{*)} Provinsi yang memiliki skor indeks yang sama dengan satu atau lebih provinsi lain. Pada situasi ini, provinsi-provinsi tersebut diurutkan berdasarkan kode dan data wilayah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (http://www.kemendagri.go.id/pages/data-wilayah)

Gambar 2.1 Rata-Rata Skor Domain IPP Nasional



II.1 Capaian Umum

Indonesia telah menunjukkan kinerja dalam pembangunan pemuda, tetapi amat jelas bahwa tantangan membangun pemuda Indonesia masih sangat besar. Melalui Laporan IPP 2017, kinerja ini secara umum ditangkap dalam lima pola dinamika. Pertama, secara keseluruhan sejumlah hasil dapat ditunjukkan, tetapi pembangunan pemuda masih membutuhkan upaya lebih giat lagi. Kedua, kinerja nasional ditopang oleh kinerja provinsi, dan provinsi-provinsi di luar Jawa-Bali juga telah bergerak dan ikut mewarnai capaian keseluruhan pembangunan pemuda. Ketiga, capaian pembangunan pemuda terekam melalui perubahan IPP tahunan, dan di tingkat provinsi perubahan ini menentukan peringkat relatif satu provinsi dengan lainnya. Keempat, provinsi-provinsi dengan nilai IPP 2015 yang relatif rendah mulai menyusul provinsi-provinsi dengan nilai indeks yang lebih tinggi, sejalan dengan pertambahan IPP pada periode 2015-2016 yang lebih besar. Kelima, ketidakmerataan dalam IPP cenderung menurun, seiring dengan berkurangnya kesenjangan capaian antarprovinsi. Bagian berikut berturut-turut

akan menyajikan rincian lima pola dinamika itu.

Pembangunan pemuda mengalami sejumlah kemajuan, tetapi masih membutuhkan upaya yang lebih giat lagi untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam rentang nilai 0-100, tingkat IPP tahun 2016 mencapai 50,17, sedangkan tahun sebelumnya IPP baru sebesar 47,33 poin. Ini berarti terjadi perubahan positif 2,8 poin, atau pertumbuhan 5,9 persen setahun. Memberi arti atau kualifikasi atas capaian setingkat ini tidaklah mudah. Perbandingan antarnegara, misalnya, tidak dapat dilakukan adanya perbedaan metodologi dan data IPP. Namun demikian, jika dilihat dari rentang indeks yang ada dengan nilai tertinggi 100, IPP ini membawa pesan jelas, yakni dibutuhkan kerja keras untuk mengakselerasi pembangunan Tanpa akselerasi, yaitu dengan membiarkan pertumbuhan indeks itu konstan, Indonesia memerlukan waktu lebih dari satu dasawarsa untuk mencapai nilai tertinggi.

Kerja keras merupakan kata kunci penting. Hingga saat ini beberapa provinsi telah menampilkan kinerja positifnya. Pada tahun 2015, tak kurang dari 13 provinsi—38 persen dari keseluruhan provinsi—mampu berada di atas indeks nasional. Dari jumlah ini berturutturut terdapat tiga dari tujuh provinsi di Jawa-Bali, lima dari 10 provinsi di Sumatera, dua dari lima provinsi di Kalimantan, serta satu dari dua provinsi di Papua yang berada di atas capaian nasional. Tahun selanjutnya, jumlah provinsi dengan IPP yang berada di atas IPP nasional meningkat menjadi 15

provinsi, atau 44 persen dari total 34 provinsi. Dari jumlah ini, Jawa-Bali menyumbang lima provinsi, Sumatera empat provinsi, Kalimantan dua provinsi, Sulawesi dua dari enam provinsi, serta Maluku dengan dua provinsi secara keseluruhan di kepulauan ini. Bengkulu, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku di tahun 2016 adalah provinsi baru yang menambah sekaligus menggantikan tiga provinsi sebelumnya, yakni Sumatera Utara, Jambi, dan Papua yang di tahun sebelumnya berada di atas IPP nasional (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 IPP Provinsi dan Nasional

Drovinci		2015	- Provinsi		2016	Perubahan
Provinsi	IPP	Peringkat IPP		IPP	Peringkat	IPP 2015-16
DI Yogyakarta	63,50	1	DI Yogyakarta	64,67	1	1,17
Bali	60,00	2	Bali	59,67	2	-0,33
Kepulauan Riau	55,83	3	Kalimantan Timur	56,33	3	0,50
DKI Jakarta	51,50	4	Maluku Utara	54,67	4	3,17
Sumatera Utara	51,33	5	Maluku	54,33	5	3,00
Jawa Barat	44,50	30	Sulawesi Selatan	46,67	30	2,17
Kalimantan Selatan	43,83	31	Jawa Barat	46,33	31	2,50
Nusa Tenggara Barat	43,50	32	Lampung	46,00	32	2,50
Lampung	43,17	33	Kalimantan Tengah	45,83	33	2,67
Sumatera Selatan	41,50	34	Kalimantan Selatan	45,83	34	4,33
Indonesia	47,33			50,17		2,83
Jumlah Provinsi d	li mana		Jumlah Provinsi	di mana		

Jumlah Provinsi di mana IPP_{Provinsi} > IPP_{Nasional}

Jumlah Provinsi di mana IPP_{Provinsi} > IPP_{Nasional}

15

Jawa-Bali: DIY, Bali, DKI, Jateng

13

- Sumatera: Kepri, Sumut, Aceh, Jambi, Sumbar
- Kalimantan: Kaltim, Kaltara
- Maluku: Maluku Utara
- · Papua: Papua

- Jawa-Bali: DIY, Bali, DKI, Jatim, Jateng
- Sumatera: Bengkulu, Aceh, Sumbar, Kepri
- Sulawesi: Sulut, Gorontalo
- · Kalimantan: Kaltim, Kaltara
- Maluku: Maluku, Maluku Utara

Pada tabel 2.2 juga jelas tergambar bahwa capaian nasional pembangunan pemuda ditopang oleh capaian provinsi-provinsi. Sejumlah provinsi di luar Jawa-Bali menunjukkan kinerja yang membaik. Tahun 2015, DI Yogyakarta dan Bali memang menempati peringkat pertama dan kedua, masing-masing dengan IPP 63,5 dan 60 diikuti Jakarta di peringkat keempat dengan IPP 51,5. Namun, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara juga tergolong dalam 'lima besar provinsi' dengan IPP tertinggi pada tahun itu sebesar, berturut-turut, 55,8 dan 51,3. Pada tahun berikutnya, komposisi 'lima besar provinsi' secara keseluruhan berubah. DI Yogyakarta (64,7) dan Bali (59,7) tetap di dua peringkat atas, namun Kalimantan Timur (56,3), Maluku Utara (54,7), serta Maluku (54,3) sudah mampu menduduki peringkatperingkat berikutnya di tahun 2016 dalam kelompok ini. Apabila rentang peringkat ini diperpanjang hingga menjadi 'sepuluh teratas', provinsi-provinsi di Sumatera dan Kalimantan termasuk dalam daftar itu.

Pada sisi yang berlawanan, masih ditemui provinsi-provinsi yang masih harus berkinerja lebih baik lagi. Dalam kelompok 'lima terbawah IPP', misalnya, keadaan yang terjadi justru kurang dinamis, bahkan cenderung persisten. Kalimantan Selatan, Lampung, dan Jawa Barat, tetap berada di dalam kelompok ini selama dua tahun berturut-turut (2015-2016). Pertukaran peringkat memang terjadi. Nusa Tenggara Barat dapat keluar dari 'lima terbawah', tapi provinsi ini belum bergerak jauh. Pada tahun 2016 NTB masih berada di peringkat ke-29, yang berarti berada di enam provinsi terbawah pembangunan pemuda. Pengecualian terjadi pada Sumatera Selatan yang melakukan lompatan besar dengan amat mengesankan, sebagaimana akan didiskusikan nanti.

Namun demikian, dalam gambaran yang lebih menyeluruh, sebagian besar provinsi mengalami kemajuan dengan melakukan lompatan besar (leap frogging). Ini adalah kenyataan penting sebagaimana dapat ditelusuri dalam Gambar 2.2. Gambar ini menerangkan dengan jelas fenomena lompatan besar yang dibuat oleh sejumlah provinsi. Terdapat enam provinsi yang bergerak jauh ke arah atas dengan meninggalkan garis diagonal merah (Lihat keterangan gambar tentang makna garis diagonal merah). Sulawesi Utara mengalami perubahan IPP positif terbesar 8,7 poin, sementara Sumatera Selatan meningkat 8,5 poin, Maluku (8,3), Bengkulu (7,3), Kalimantan Timur (5,5), dan Maluku Utara (5,2). Ini adalah provinsi-provinsi yang dalam tahun 2015 berada di kelompok bawah dengan IPP antara 41-51. Di luar enam provinsi dengan lompatan besar itu, 24 provinsi lain juga berada di atas garis diagonal merah. Ini adalah sejumlah besar provinsi dengan IPP antara 43-51 di tahun 2015, yang naik beberapa poin di tahun berikutnya ke nilai 46-52. Dengan demikian, secara keseluruhan 30 provinsi terhitung mengalami perubahan positif dalam IPP.

Pada saat yang bersamaan, Bali, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah memerlukan perhatian dan kebijakan khusus, karena empat provinsi ini berada di bawah garis merah diagonal—penurunan dalam IPP. Bagi Bali penurunan IPP memang terhitung kecil; dan ini belum mampu menggeser Bali dari posisi kedua setelah DI Yogyakarta. Namun bagi Kepulauan Riau dan Sumatera Utara, terlebih lagi Kalimantan Tengah, penurunan ini memerlukan perhatian amat serius. Kepulauan Riau mengalami penurunan terbesar, lima poin; sedangkan Sumatera Utara lebih dari 1,5 poin. Kalimantan Tengah membutuhkan pendekatan tersendiri.

karena provinsi ini bukan hanya mengalami penurunan IPP, tetapi juga menduduki posisi terbawah dalam skor indeks pembangunan pemuda 2016, bersama dengan Kalimantan Selatan. Kecuali Kalimantan Tengah, provinsi-provinsi ini berada di kelompok tengah hingga atas untuk pembangunan pemuda 2015.

Perubahan-perubahan di atas mempengaruhi peringkat relatif provinsi secara keseluruhan. Provinsi-provinsi dengan perubahan IPP yang besar memperbaiki peringkat relatifnya terhadap provinsi-provinsi lain. Dari sisi peringkat ini, 15 provinsi mengalami kenaikan dan dua provinsi tetap di peringkat yang sama dalam tahun 2015-2016. Perbaikan peringkat umumnya dijelaskan oleh lompatan besar atau perubahan positif IPP yang besar dalam dua tahun itu. Dari 15 provinsi itu, lima provinsi

teratas mengalami perbaikan peringkat besar. Sulawesi Utara naik 21 peringkat dari peringkat di tahun 2015 dengan perubahan IPP 8,7 poin. Maluku dan Sumatera Selatan menanjak 18 peringkat, masing-masing dengan perubahan IPP 8,3 dan 8,5 poin. Bengkulu melompat 12 peringkat (7,3 poin perubahan IPP), sedangkan Sulawesi Tengah naik enam peringkat (4,2 poin). Pada tahun 2015, berturut-turut provinsi-provinsi ini umumnya berada di peringkat bawah, yakni peringkat ke-28 (Sulawesi Utara), 23 (Maluku), 34 (Sumatera Selatan), 18 (Bengkulu), dan 29 (Sulawesi Tengah). Secara khusus, apresiasi harus diberikan kepada Sumatera Selatan dengan lompatan besar (8,5 poin perubahan IPP) yang dapat membawa provinsi ini keluar dari kelompok provinsi dengan IPP terbawah di tahun 2015 (Tabel 2.3, segmen pertama).

Tabel 2.3 Provinsi dan Perubahan Peringkat IPP

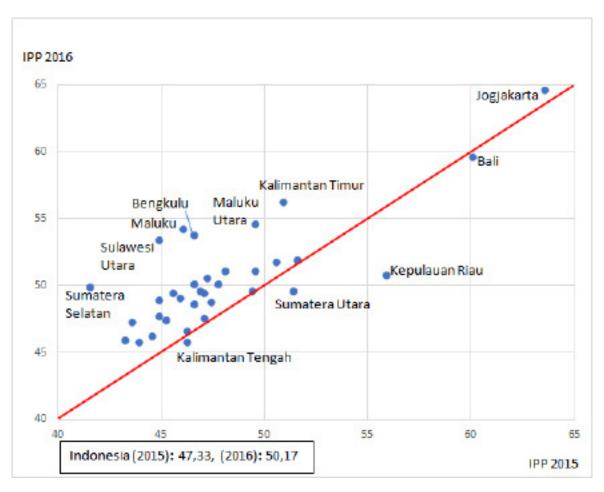
Provinsi -	2	015	2	016	Perubahan
Provinsi	IPP	Peringkat	IPP	Peringkat	Peringkat*]
Sulawesi Utara	44,83	28	53,50	7	-21
Maluku	46,00	23	54,33	5	-18
Sumatera Selatan	41,50	34	50,00	16	-18
Bengkulu	46,50	18	53,83	6	-12
Sulawesi Tengah	44,83	29	49,00	23	-6
Kepulauan Riau	55,83	3	50,83	12	9
Jambi	49,33	10	49,67	19	9
Papua	47,33	13	48,83	24	11
Sumatera Utara	51,33	5	49,67	17	12
Sulawesi					
Tenggara	47,00	15	47,67	27	12
Kalimantan					
Tengah	46,17	21	45,83	33	12

Provinsi dengan Kenaikan Peringkat 2015-2016: 15

- Jawa-Bali: Jatim. Banten
- Kalimantan: Kaltim
- Maluku: Maluku, Maluku Utara
- Sumatera: Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung
- Sulawesi: Sulut, Sulteng, Gorontalo
- Nusa Tenggara: NTB, NTT

^{*]} Perubahan Peringkat: Nilai negatif berarti perbaikan peringkat, dan sebaliknya

Gambar 2.2 Perbandingan IPP 2015-2016

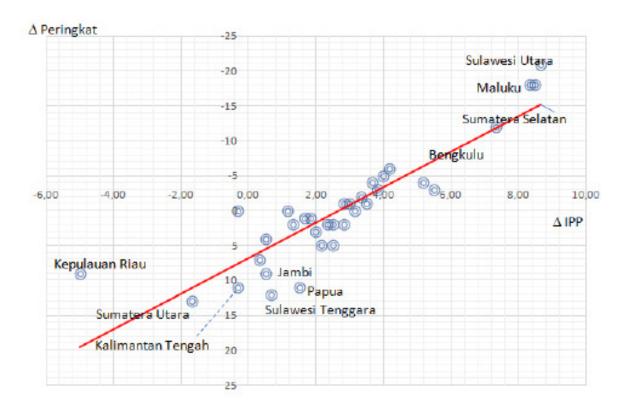


Keterangan: Sumbu horizontal mewakili capaian IPP tahun 2015 dan sumbu vertikal mewakili IPP tahun 2016. Garis diagonal merah menunjukkan capaian tahun 2015 sama persis dengan capaian 2016. Provinsi-provinsi yang berada di atas (di bawah) garis diagonal ini adalah provinsi yang mengalami kemajuan (kemunduran) IPP 2016 dibandingkan dengan IPP 2015. Berlawanan dengan dinamika positif ini, terdapat enam provinsi yang termasuk dalam kelompok terbawah dengan penurunan peringkat yang relatif besar. Sumatera tercatat sebagai pulau dengan tiga provinsi di kelompok bawah, yakni Kepulauan Riau, Jambi dan Sumatera Utara. Dari pulau-pulau lain—Papua, Sulawesi dan Kalimantan—masing-masing tercatat satu provinsi (tabel 2.3, segmen kedua), yakni Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah.

Penurunan peringkat ini diterangkan oleh empat hal sekaligus yang bergerak secara simultan. Pertama, lompatan besar provinsi lain yang membuat posisi relatif provinsi yang bersangkutan tertinggal sebagaimana telah didiskusikan di atas. Kedua, pertambahan terbatas IPP provinsi yang bersangkutan. Ketiga, penurunan IPP provinsi yang bersangkutan. Keempat, nilai IPP suatu provinsi yang statis—tidak berubah—di tengah lompatan besar provinsi lain. Dengan demikian, semakin besar suatu provinsi mengalami perubahan IPP, semakin besar pula lompatan peringkat yang dibuatnya; sebagaimana juga sebaliknya.

Gambar 2.3 dengan jelas memperlihatkan hubungan searah antara perubahan peringkat dan perubahan IPP 2015-2016. Kepulauan Riau dan Jambi turun sembilan peringkat dan Papua turun 11 peringkat. Sementara itu, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah masingmasing mengalami penurunan 12 peringkat. Kecuali Kepulauan Riau dan Sumatera Utara yang sebelumnya berada dalam 'lima besar', provinsi-provinsi yang peringkatnya turun ini umumnya berasal dari kelompok tengah.

Gambar 2.3 Perubahan Peringkat IPP Provinsi



Keterangan: Sumbu horizontal mewakili perubahan IPP 2015-2016; delta (Δ) IPP. Sumbu vertikal mewakili perubahan peringkat (Δ Peringkat) provinsi 2015-2016. Sumbu vertikal ditampilkan dalam urutan yang terbalik (*reverse order*) untuk menunjukkan bahwa nilai negatif pada sumbu itu berarti perbaikan peringkat. Garis merah miring adalah garis estimasi hubungan antara perubahan peringkat (Δ Peringkat) dan perubahan IPP (Δ IPP). Dalam gambar terlihat ada hubungan positif antara perubahan peringkat dan perubahan IPP.

Jelas terlihat, perubahan IPP menentukan perubahan peringkat. Pada saat yang sama, perubahan IPP yang besar juga menunjukkan adanya akselerasi pembangunan pemuda. Dalam akselerasi ini, provinsi-provinsi yang tertinggal dapat menyusul provinsi-provinsi yang lebih dahulu maju. Dalam proses konvergensi ini, provinsi-provinsi dengan nilai IPP 2015 yang rendah mengalami perubahan IPP 2015-2016 yang besar. Sebaliknya, provinsi-provinsi dengan IPP 2015 yang tinggi bertendensi tumbuh dengan tingkat yang rendah. Gejala ini lazim ditemui dalam dinamika pertumbuhan ekonomi antarwilayah, dan saat ini tandatanda yang serupa tengah dirasakan dalam pembangunan pemuda. Dalam ekonomika pertumbuhan, khususnya yang membahas pertumbuhan jangka panjang, fenomena ini disebut sebagai 'konvergensi'. Konvergensi menangkap fenomena gerak negara-negara berkembang yang cenderung tumbuh lebih cepat daripada negara-negara maju. Pertumbuhan yang lebih cepat ini membuat ekonomi negara-negara berkembang dapat mendekati dan mengejar ekonomi negaranegara maju.

Perubahan-perubahan IPP dan lompatan-lompatan peringkat provinsi tidak lain mencerminkan adanya gerak dinamis pembangunan pemuda di provinsi-provinsi. Dinamika ini telah membuat **kesenjangan antarprovinsi dalam pembangunan pemuda semakin mengecil**. Saat ini ketidakmerataan IPP antara satu provinsi dengan provinsi lain cenderung berkurang. Ini juga berarti ada pergerakan pembangunan pemuda yang lebih dinamis di provinsi-provinsi yang sebelumnya relatif tertinggal dalam IPP.

Provinsi-provinsi ini dapat menjadi tempat pembelajaran penting untuk berbagi kiat-kiat kebijakan pembangunan pemuda. Praktik-praktik terbaik tampaknya perlu dijelajahi lebih jauh dan bukti-bukti perlu disajikan, karena fenomena *leap-frogging* bukan terjadi tanpa sebab.

Melalui beberapa ukuran, Tabel 2.4 memberikan bukti tentang kesenjangan yang menurun ini. Dalam nilai rata-rata provinsi yang meningkat selama 2015-2016, perbedaan kinerja antara provinsi dengan IPP tertinggi dan terendah menyusut 14 persen. Pada 2015, jarak antara IPP tertinggi (DI Yogyakarta) dan terendah (Sumatera Selatan) masih sebesar 22 poin, sedangkan tahun berikutnya rentang antara nilai IPP tertinggi (DI Yogyakarta) dan terendah (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan) telah berkurang menjadi sekitar 19 poin. Dinyatakan dengan cara lain, perbedaan prestasi pembangunan pemuda antara provinsi termaju dan provinsi tertinggal telah mengecil. Penyusutan ini utamanya didorong peningkatan nilai IPP terendah (4,3 poin) yang lebih besar daripada peningkatan IPP tertinggi (1,2 poin).

Sejajar dengan penurunan perbedaan itu terlihat pula bahwa pada tahun 2016 kinerja satu provinsi dengan kinerja provinsi lain cenderung lebih berdekatan dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya. Ini artinya perbedaan kinerja antarprovinsi mengalami perbaikan dalam dua tahun pengamatan. Dua ukuran persebaran (dispersion), yakni simpangan baku dan koefisien variasi, dapat memberi konfirmasi atas hal ini. Simpangan baku 2016 terhitung 13 persen lebih kecil daripada simpangan baku tahun sebelumnya, yakni dibandingkan dengan 4,5. Begitu pula dengan koefisien variasi atau yang juga dikenal sebagai simpangan baku relatif. Pada tahun 2016 koefisien variasi terhitung sebesar 7,9 sebelum turun 17 persen dari 9,5 di tahun 2015.

Lebih jauh lagi, sejalan dengan penyusutan dalam persebaran IPP, Interquartile Range (IQR) juga memberikan informasi serupa. Nilai IQR sendiri menjelaskan selisih antara IPP di kelompok kuartil ketiga (Q3) dengan IPP di kelompok kuartil pertama (Q1). Penyajian perbedaan IPP antara Q1 dan Q3 ini memberikan tambahan informasi pada penyajian perbedaan di dua 'titik ekstrem' yakni IPP 'tertinggi' dan 'terendah' sebagaimana ditampilkan di atas. Pada tahun 2016 IQR terhitung hampir delapan persen lebih rendah dari pada IQR tahun sebelumnya, atau telah terjadi penyusutan IQR sebesar 0,3 dari 4,3 ke 4,0. Pada tahun 2015, IPP di kelompok Q3 dan Q1 berturutturut tercatat sebesar sebesar 49,5 dan 45,2

Tabel 2.4 Sebaran Nilai IPP Provinsi di Indonesia 2015-2016

Pembanding	IPP 2015	IPP 2016	Pembanding	IPP 2015	IPP 2016
Rata-rata Provinsi	47.89	50.58	Q1	45.17	47.83
IPP Tertinggi	63.50	64.67	Median	46.67	49.67
IPP Terendah	41.50	45.83	Q3	49.50	51.83
IPP Tertinggi – IPP			Interquartile		
Terendah	22.00	18.83	Range	4.33	4.00
Simpangan Baku	4.53	3.97			
Koefisien Variasi	9.45	7.85			

(berselisih 4,3 poin), sedangkan pada tahun 2016 sebesar 47,8 dan 51,8 (berbeda empat poin). Penyusutan IQR ini menunjukkan variasi dalam IPP provinsi di tahun 2016 telah berkurang dibandingkan dengan variasi IPP provinsi pada tahun sebelumnya. Akhirnya, keseluruhan gambaran ini memperlihatkan bahwa di antara dua titik ekstrim perbedaan IPP mengecil, sedangkan di antara dua titik di 'dalam sebaran' perbedaan itu juga menyusut.

II.2 Capaian Domain

Jika secara regional capaian IPP nasional ditopang oleh capaian-capaian provinsi, secara sektoral capaian IPP tidak lain adalah capaian agregasi lima domain. Dalam capaian domain ini dua pola terbentuk. Pertama, dari sisi tingkat (nilai) indeks, domain pendidikan adalah domain terkuat. Urutan berikutnya adalah domain kesehatan dan kesejahteraan, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi, serta lapangan dan kesempatan kerja. Kedua, dari sisi perubahan indeksdengan melepas domain partisipasi dan kepemimpinan dari analisis akibat ketiadaan data 2016 yang terbanding—domain gender dan diskriminasi mengalami perubahan indeks paling besar. Urutan berikutnya adalah domain lapangan dan kesempatan kerja, kesehatan dan kesejahteraan, serta pendidikan. Bagian berikut berturut-turut akan menyajikan rincian dua pola itu.

Domain pendidikan memiliki nilai indeks terbaik di antara lima domain IPP dalam dua tahun berturut-turut. Domain ini meraih nilai 63,3 selama 2015-2016, sementara domaindomain lain berada jauh di bawah nilai ini. Domain kesehatan dan kesejahteraan dengan kinerja terdekat tidak dapat melampaui indeks 60. Domain ini hanya mampu meraih indeks 55 dan 57,5 dalam dua

tahun yang sama. Domain berikutnya, yakni partisipasi dan kemimpinan bahkan berada di bawah nilai 50. Sampai dengan data yang dapat disediakan (2015), domain ini hanya mencapai indeks 46,7. Selanjutnya adalah dua domain dengan nilai indeks yang agak berdekatan, yakni gender dan diskriminasi serta lapangan dan kesempatan kerja. Pada tahun 2015 dan 2016, kedua domain ini berturut-turut mencapai 36,7 dan 43,3 serta 35 dan 40 (Tabel 2.5).

Sumbangan kuat domain pendidikan utamanya berasal dari Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah dan rata-rata lama sekolah. Dalam dua tahun berturutturut APK telah melebihi 85 persen. Capaian ini bermakna bahwa delapan hingga sembilan anak dari 10 anak pada usia sekolah menengah menjalani pendidikan sekolah menengah. Dengan capaian ini APK membentuk nilai sub-indeks sembilan. Bersama dengan indikator partisipasi dalam kegiatan sosial, nilai sub-indeks partisipasi sekolah menengah ini merupakan capaian antara indikator-indikator tertinggi di lain—mendekati nilai tertinggi, 10. Namun demikian, APK perguruan tinggi di domain ini membutuhkan perhatian, karena dalam 2015-2016 baru 21-23 persen pemuda yang berpartisipasi dalam perguruan tinggi. Dengan capaian itu, indikator ini menjadi indikator dengan nilai sub-indeks terendah, yakni tiga poin.

Nilai tertinggi domain pendidikan dicapai oleh DI Yogyakarta dengan indeks 80, sedangkan yang terendah diraih oleh Papua dengan indeks 50 (Lihat Lampiran Tabel III.4 Indeks Domain IPP Provinsi 2015-2016). Dalam dua tahun data tersaji, tidak terlihat perubahan dalam perbedaan capaian indeks tertinggi dan terendah, sebagaimana juga dalam IQR. Masing-masing tetap pada angka 30 dan

Tabel 2.5 Domain IPP Indonesia 2015-2016

	20	15	201	L6	Peru	bahan
Domain dan Indikator	Α	Т	Α	Т	Α	Т
	(%)*	(0-10)	(%)*	(0-10)	(%)*	(0-10)
D1: Pendidikan		63,33		63,33		0,00
Rata-rata lama sekolah	10,01	7	10,21	7	0,20	0
APK sekolah menengah	85,15	9	85,79	9	0,64	0
APK perguruan tinggi	20,89	3	23,44	3	2,55	0
D2: Kesehatan dan Kesejahteraan		55,00		57,50		2,50
Angka kesakitan pemuda**	9,34	6	8,54	6	-0,80	0
Pemuda korban kejahatan**	1,09	7	1,04	7	-0,05	0
Pemuda merokok**	27,04	3	25,51	3	-1,52	0
Remaja perempuan sedang hamil**	18,92	6	17,16	7	-1,76	1
D3: Lapangan dan Kesempatan Kerja		35,00		40,00		5,00
Pemuda wirausaha (white collαr)***	0,28	2	0,30	2	0,02	0
Tingkat pengangguran terbuka pemuda**	15,38	5	13,44	6	-1,94	1
D4: Partisipasi dan Kepemimpinan****		46,67		46,67		
Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	81,97	9	81,97	9		
Partisipasi pemuda dalam organisasi	5,86	2	5,86	2		
Pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan	5,88	3	5,88	3		
D5: Gender dan Diskriminasi		36,67		43,33		6,67
Perkawinan Usia Anak**	22,82	5	22,35	6	-0,47	1
Pemuda perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi	36,61	2	37,71	2	1,10	0
Pemuda perempuan bekerja di sektor formal	22,99	4	24,07	5	1,08	1
IPP		47,33		50,17		2,83

Keterangan:

6,7. Namun demikian, dalam persebaran data—melalui simpangan baku dan koefisien variasi—dapat dikatakan ada tanda-tanda penurunan kesenjangan antarprovinsi dalam domain ini, karena IPP di tahun 2016 lebih cenderung memusat mendekati nilai ratarata provinsi. Simpangan baku turun empat persen dari 5,7 menjadi 5,5, sedangkan

koefisien variasi turun hampir enam persen dari 8,9 menjadi 8,4 (Tabel 2.6).

Peringkat selanjutnya adalah domain kesehatan dan kesejahteraan sebagai domain kedua terbesar dengan indeks 55 dan 57,5 poin dalam 2015-2016. Capaian indikator-indikator dalam domain ini cenderung moderat, tanpa indikator yang melesat dengan nilai tinggi. Sub-indeks

^{*} Data Awal (A) adalah data yang berasal dari BPS yang digunakan sebagai sumber (rαw dαtα) untuk penghitungan IPP. Kecuali indikator rata-rata lama sekolah dengan satuan hitung tahun, satuan hitung indikator-indikator lainnya pada data awal adalah persen. Data Transformasi (T) adalah data hasil perubahan data awal (A) menjadi sub-indeks untuk mendapatkan interpretasi yang searah, yakni makin besar nilai, makin baik capaian indikator. Data Transformasi ini berada dalam rentang 1-10.

^{&#}x27;** Perubahan negatif pada data awal (A) indikator-indikator ini berarti perbaikan capaian.

^{****}Kategori white collar terdiri dari beberapa jenis pekerjaan, yakni tenaga profesional, teknisi, dan tenaga lain yang berhubungan dengan itu; tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta pejabat pelaksana, tenaga tata usaha, dan tenaga yang berhubungan dengan itu.

^{&#}x27;**** Perubahan pada D4 tidak dihitung, karena penggunaan data yang konstan pada dua tahun pengamatan.

Tabel 2.6 Sebaran Nilai Domain Pendidikan pada IPP 2015-2016

Pembanding	IPP 2015	IPP 2016	Pembanding	IPP 2015	IPP 2016
Rata-rata Provinsi	63,53	65,29	Q1	60,00	63,30
Nilai Tertinggi	80,00	80,00	Median	63,30	63,30
Nilai Terendah	50,00	50,00	Q3	66,67	70,00
Nilai Tertinggi – Nilai			Interquartile		
Terendah	30,00	30,00	Range	6,67	6,67
Simpangan Baku	5,68	5,45			
Koefisien Variasi	8,94	8,35			

terbesar dicapai oleh indikator pemuda korban kejahatan yang pada tahun 2015 mencapai nilai tujuh, yang terulang kembali pada tahun berikutnya. Secara nasional, hal ini merujuk pada fakta bahwa terdapat sekitar satu persen pemuda korban kejahatan selama dua tahun berturut-turut. Berlawanan dengan indikator ini adalah indikator pemuda merokok. Meskipun terjadi penurunan dari 27 persen menjadi 25,5 persen, perubahan ini masih tidak cukup sensitif untuk mampu meningkatkan nilai sub-indeksnya—tetap bernilai tiga dalam 2015-2016.

Dalam domain kesehatan dan kesejahteraan ini, Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan nilai tertinggi (77,5) pada 2015, sedangkan Papua dan Kalimantan Utara meraih nilai tertinggi pada tahun 2016 dengan nilai sama, yakni 72,5. Sementara itu, NTB adalah provinsi dengan nilai domain terendah dalam dua tahun berturut-turut dengan 32,5 dan 40 poin. Dalam domain ini, kesenjangan antara nilai tertinggi dan terendah berkurang dari 45 ke 32,5. Hal ini

utamanya didorong oleh perbaikan nilai provinsi terendah. Secara keseluruhan, kesenjangan kinerja provinsi-provinsi dalam domain ini cenderung menurun, sebagaimana terlihat penurunan dalam simpangan baku dan koefisien variasi—sekalipun IQR tidak berubah (Tabel 2.7).

Domain ketiga penopang IPP agregat adalah partisipasi dan kepemimpinan dengan indeks 46,7. Domain ini mengandung capaian indikator yang berbeda tajam. Dalam indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, sub-indeks terhitung besar, yakni sembilan poin—mendekati nilai terbaik, 10. Namun, ini tidak serta merta berarti pemuda langsung terafiliasi dalam organisasi sosial tertentu atau ikut aktif mengeluarkan pendapatnya dalam ragam kegiatan pertemuan, karena kedua indikator yang terakhir memperlihatkan nilai indeks yang rendah. Sebaliknya, indikator partisipasi pemuda dalam organisasi hanya memiliki nilai sub-indeks dua poin. Sementara itu, pemuda

Tabel 2.7 Sebaran Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan pada IPP 2015-2016

Pembanding	IPP 2015	IPP 2016	Pembanding	IPP 2015	IPP 2016
Rata-rata Provinsi	56,25	59,41	Q1	50,00	52,50
Nilai Tertinggi	77,50	72,50	Median	55,00	60,00
Nilai Terendah	32,50	40,00	Q3	62,50	65,00
Nilai Tertinggi – Nilai			Inter Quartile		
Terendah	45,00	32,50	Range	12,50	12,50
Simpangan Baku	8,84	8,05			
Koefisien Variasi	15,71	13,55			

berpendapat dalam rapat kemasyarakatan hanya memiliki poin yang tidak jauh, tiga.

Dalam tahun 2015, nilai tertinggi dicapai oleh DI Yogyakarta dengan 70 poin, sedangkan nilai terendah oleh Sulawesi Selatan dengan 33 poin. Perbedaan keduanya sekitar 37 poin. Masih sukar untuk menelusuri apakah antartahun ada kecenderungan tertentu dalam kesenjangan antar provinsi pada domain ini, karena data yang tersedia adalah hanya data 2015—yang digunakan kembali pada tahun 2016. Namun, dibandingkan terhitung dengan apa yang domain pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan, kesenjangan dalam domain ini sedikit lebih besar. Simpangan baku dan koefisien variasi domain partisipasi dan kepemimpinan terhitung lebih besar (Tabel 2.8).

Gender dan diskriminasi merupakan domain penopang keempat IPP agregat. Domain ini hanya mencatat indeks 36,7 di tahun 2015, sebelum naik menjadi 43,3 di tahun berikutnya. Capaian moderat ditemui dalam indikator perkawinan usia anak dengan nilai indeks lima dan enam dalam dua tahun berturut-turut untuk mengakomodasi penurunan persentase perkawinan usia anak dari 22,8 menjadi 22,4 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa ada satu dari lima anak

di Indonesia yang menjalani pernikahan anak dalam 2015.

Perbaikan juga sudah terjadi dalam indikator pemuda perempuan bekerja di sektor formal, tetapi pemuda perempuan sedang bersekolah menengah dan perguruan tinggi dalam perspektif IPP tidak mengalami perubahan. Indikator yang terakhir ini tidak sejalan dengan APK sekolah menengah pada domain pendidikan. Keadaan ini memberikan pesan jelas bahwa masih dibutuhkan ruangruang belajar non-formal yang lebih luas bagi perempuan 16-24 tahun untuk mengakses pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi.

Capaian terbaik dalam domain ini diraih oleh DI Yogyakarta selama dua tahun berturutturut dengan 60 dan 63,3 poin. Sementara itu nilai indeks terendah ditemui pada Sulawesi Barat dan Papua pada tahun 2015 dan Papua pada tahun 2016—semuanya dengan nilai yang tidak berubah 26,7. Akibatnya, kesenjangan antara indeks tertinggi dan terendah meningkat dari 33,3 menjadi 36,7. Walau demikian, di dalam IQR yang konstan, persebaran antarprovinsi secara keseluruhan cenderung membaik, karena adanya penurunan dalam simpangan baku dan koefisien variasi—masing-masing dari

Tabel 2.8 Sebaran Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan pada IPP 2015-2016

Pembanding	IPP 2015	IPP 2016*	Pembanding	IPP 2015	IPP 2016*
Rata-rata Provinsi	45,20	45,20	Q1	40,00	40,00
Nilai Tertinggi	70,00	70,00	Median	43,00	43,00
Nilai Terendah	33,33	33,33	Q3	46,67	46,67
Nilai Tertinggi – Nilai			Interquartile		
Terendah	36,67	36,67	Range	6,67	6,67
Simpangan Baku	8,13	8,13			
Koefisien Variasi	17,99	17,99			

Tabel 2.9 Sebaran Nilai Domain Gender dan Diskriminasi pada IPP 2015-2016

Pembanding	IPP 2015	IPP 2016	Pembanding	IPP 2015	IPP 2016
Rata-rata Provinsi	38,43	39,61	Q1	33,33	33,33
Nilai Tertinggi	60,00	63,33	Median	33,67	38,34
Nilai Terendah	26,67	26,67	Q3	43,33	43,33
Nilai Tertinggi – Nilai			Interquartile		
Terendah	33,33	36,67	Range	10,00	10,00
Simpangan Baku	9,22	8,32			
Koefisien Variasi	23,99	21,00			

sembilan ke delapan serta dari 24 persen ke 21 persen (Tabel 2.9).

Domain lapangan dan kesempatan kerja membutuhkan perhatian tersendiri, karena domain ini adalah penopang terlemah dalam pembentukan IPP agregat dengan 35 dan 40 sepanjang dua tahun. Dari dua pilar indikator yang ada, sumbangan hanya diberikan oleh pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT), bukan wirausaha pemuda dalam perspektif white collar. Nilai-nilai sub-indeks indikatornya tercatat sebesar lima untuk tingkat pengangguran dan dua untuk pemuda wirausaha.

Di tingkat provinsi, pada 2015 DI Yogyakarta dan Bali adalah dua provinsi tertinggi dalam pencapaian indeks, yakni 55. Sementara itu, Maluku adalah yang terendah dengan 15 poin. Tahun 2016, Kalimantan Timur mengganti DI Yogyakarta untuk bersamasama Bali menjadi provinsi dengan indeks tertinggi, yaitu 65 poin. Sebaliknya, Jawa Barat dan Aceh menjadi yang terendah dalam

tahun berikutnya dengan indeks 25 poin. Selanjutnya, kecenderungan kesenjangan antarprovinsi dalam domain sukar dikualifikasi, karena empat indikatornya tidak bergerak ke arah yang sama. Perbedaan nilai tertinggi dan terendah relatif tetap dalam dua tahun pengamatan, tetapi koefisien variasi menurun, sedangkan simpangan baku dan IQR meningkat (Tabel 2.10).

Dari sisi perubahan nilai indeks, domain dan diskriminasi mengalami gender peningkatan yang terbesar. Peningkatan ini berasal dari kenaikan indeks sebesar 6,7 poin dari 36,7 menjadi 46,3 sepanjang tahun 2015-2016. Indikator perkawinan usia anak dan pemuda perempuan bekerja di sektor formal masing-masing menyumbang perbaikan ini dengan kenaikan sub-indeks satu poin. Subindeks perkawinan usia anak meningkat dari lima ke enam poin, sedangkan sub-indeks pemuda perempuan bekerja di sektor formal naik dari empat menjadi lima poin.

Tabel 2.10 Sebaran Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja pada IPP 2015-2016

Pembanding	IPP 2015	IPP 2016	Pembanding	IPP 2015	IPP 2016
Rata-rata Provinsi	38,43	39,61	Q1	33,33	33,33
Nilai Tertinggi	60,00	63,33	Median	33,67	38,34
Nilai Terendah	26,67	26,67	Q3	43,33	43,33
Nilai Tertinggi – Nilai			Interquartile		
Terendah	33,33	36,67	Range	10,00	10,00
Simpangan Baku	9,22	8,32			
Koefisien Variasi	23,99	21,00			

Tabel 2.11 Provinsi Teratas dan Terbawah dalam Domain Gender dan Diskriminasi pada IPP 2015-2016

Provinsi	2015	2016	Delta*	Provinsi	2015	2016	Delta*
Sulawesi Utara	30,00	40,00	10,00	Jambi	36,67	33,33	-3,33
				Kep. Bangka			
Sulawesi Barat	26,67	33,33	6,67	Belitung	33,33	30,00	-3,33
Lampung	33,33	40,00	6,67	Maluku Utara	40,00	36,67	-3,33
Jawa Timur	36,67	43,33	6,67	Bali	53,33	46,67	-6,67
Nusa Tenggara							
Barat	33,33	40,00	6,67	Kepulauan Riau	56,67	50,00	-6,67

Keterangan: *Delta adalah perubahan indeks tahun 2015-2016

Provinsi penyumbang kenaikan indeks dalam domain ini adalah Sulawesi Utara dengan 10 poin. Empat provinsi penyumbang perubahan terbesar lainnya adalah Sulawesi Barat, Lampung, Jawa Timur, dan NTB dengan nilai perubahan yang sama (6,7 poin), meski masing-masing berasal dari tingkat indeks yang berbeda pada tahun 2015. Di sisi yang berlawanan, Kepulauan Riau dan Bali adalah dua provinsi yang mengoreksi capaian perubahan domain ini, akibat perubahan negatif masing-masing sebesar 6,7 persen. Tiga provinsi lain—Jambi Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara—ikut mengoreksi masing-masing dengan penurunan indeks 3,3 poin (Tabel 2.11).

Domain lapangan dan kesempatan kerja tercatat sebagai domain dengan perubahan terbesar kedua. Dalam 2015-2016 domain ini berubah lima poin—dari 35 ke 40—akibat perbaikan dalam sub-indeks tingkat pengangguran terbuka yang naik dari lima ke enam poin. Sementara itu, pemuda wirausaha praktis tidak berubah dalam nilai sub-indeks, kendati ada kenaikan capaian indikator ini dari 0,28 persen ke 0,30 persen. Nilai sub-indeks yang terhitung dalam 2015 dan 2016, masing-masing, adalah dua poin.

Kalimantan Timur menjadi motor penggerak utama perubahan domain ini, sejalan dengan perubahan besar yang terjadi provinsi ini. Indeks provinsi ini meningkat tajam 35 poin dari poin 30 di tahun 2015, sehingga provinsi ini mencatat indeks 65 dalam domain lapangan dan kesempatan kerja di tahun 2016. Enam provinsi berikutnya (Tabel 2.12) juga menunjukkan perubahan indeks yang juga besar—antara 20 dan 30 poin—meskipun masing-masing berangkat dari nilai indeks domain yang berbeda pada

Tabel 2.12 Provinsi Teratas dan Terbawah dalam Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja pada IPP 2015-2016

Provinsi	2015	2016	Delta*	Provinsi	2015	2016	Delta*
Kalimantan Timur	30.00	65.00	35.00	Jambi	45.00	40.00	-5.00
Sumatera Selatan	30.00	60.00	30.00	Papua Barat	35.00	30.00	-5.00
Bengkulu	35.00	60.00	25.00	Kep. Riau	50.00	40.00	-10.00
				Kalimantan			
Kep. Bangka Belitung	35.00	60.00	25.00	Tengah	45.00	35.00	-10.00
Sulawesi Utara	15.00	35.00	20.00				
Maluku	15.00	35.00	20.00				
Maluku Utara	30.00	50.00	20.00				

Keterangan: *Delta adalah perubahan indeks tahun 2015-2016

tahun 2015. Di sisi sebaliknya, Kalimantan Tengah dan Kepulauan Riau menahan indeks di domain ini untuk berubah lebih besar lagi. Koreksi masing-masing 10 poin diberikan oleh dua provinsi ini, selain oleh Jambi dan Papua Barat dengan penurunan masing-masing lima poin.

Domain kesehatan dan kesejahteraan terhitung sebagai domain ketiga terbesar dalam perubahan indeks. Pada tahun 2015 domain ini mencatat indeks sebesar 55 poin untuk naik 2,5 sebesar poin menuju 57,5 poin. Perubahan ini disumbang hanya oleh indikator kehamilan remaja dengan subindeks yang meningkat satu poin, yakni dari lima ke enam. Indikator-indikator penopang lain dalam domain ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Secara khusus perhatian perlu diberikan dalam indikator pemuda merokok. Persentase pemuda merokok memang terhitung turun dari 27 persen ke 26 persen. Namun, ini masih terlalu kecil untuk mengangkat nilai subindeksnya—tetap tiga poin dalam 2015 dan 2016.

Maluku tercatat sebagai penopang penting perubahan indeks dalam domain ini, karena indeks provinsi ini berubah 15 poin, dari 55 di tahun 2015 menjadi 70 di tahun berikutnya. Tiga provinsi—Riau, Sumatera Selatan, dan Papua Barat—ikut memberi kontribusi

yang senilai, masing-masing dengan 12,5 poin. Meski demikian, kenaikan 15 poin oleh Maluku dikoreksi oleh Sumatera Utara dengan penurunan indeks dengan nilai yang sama, 15 poin. Koreksi melalui penurunan ini diikuti pula oleh Sulawesi Tenggara dengan 10 poin, dan empat provinsi lain dengan penurunan antara lima hingga 7,5 poin (Tabel 2.13).

Selanjutnya, meski terdapat sedikit perubahan di tingkat provinsi, di tingkat sektor domain pendidikan tidak mengalami perubahan indeks. Nilainya tetap dalam dua tahun berturut-turut, yakni 63 poin. Keadaan ini sejalan dengan tidak adanya perubahan nilai sub-indeks indikator-indikator yang terkait dalam dua tahun. Ada perubahan-perubahan sedikit dalam indikatornya, tetapi perubahan-perubahan tidak cukup untuk mengangkat nilai sub-indeks masing-masing dan nilai indeks domainnya (Tabel 2.14).

Akhirnya, dari segi perubahan, domain partisipasi dan kepemimpinan tidak dapat ditelusuri lebih jauh, mengingat indikator ini menggunakan data konstan antara tahun 2015 dan 2016. Dalam beberapa tahun ke depan, dengan frekuensi pengumpulan data yang lebih tinggi, perbandingan antartahun dalam domain ini diharapkan dapat dilakukan.

Tabel 2.13 Provinsi Teratas dan Terbawah dalam Domain Kesehatan dan Kesejahteraan pada IPP 2015-2016

Provinsi	2015	2016	Delta*	Provinsi	2015	2016	Delta*
Maluku	55,00	70,00	15,00	Bali	55,00	50,00	-5,00
Riau	47,50	60,00	12,50	Kalimantan Barat	67,50	62,50	-5,00
Sumatera				Kalimantan			
Selatan	47,50	60,00	12,50	Timur	77,50	70,00	-7,50
				Sulawesi			
Papua Barat	57,50	70,00	12,50	Tenggara	55,00	45,00	-10,00
Jambi	55,00	65,00	10,00	Sumatera Utara	65,00	50,00	-15,00

Keterangan: *Delta adalah perubahan indeks tahun 2015-2016

32

Tabel 2.14 Provinsi Teratas dan Terbawah dalam Domain Pendidikan

Provinsi	2015	2016	Delta*	Provinsi	2015	2016	Delta*
Bengkulu	63,33	70,00	6,67	Sulawesi Tengah	63,33	63,33	0,00
Maluku Utara	63,33	70,00	6,67	Sulawesi Selatan	66,67	66,67	0,00
Nusa Tenggara Timur	56,67	63,33	6,67	Maluku	73,33	73,33	0,00
Kalimantan Utara	63,33	66,67	3,33	Papua	50,00	50,00	0,00
Sulawesi Utara	63,33	66,67	3,33	Kepulauan Riau	66,67	63,33	-3,33
Papua Barat	63,33	66,67	3,33	•			

Keterangan: *Delta adalah perubahan indeks tahun 2015-2016 pada IPP 2015-2016

Dari seluruh gambaran ini jelas terlihat bahwa, dalam perspektif nasional, ada capaian-capaian yang patut disyukuri. Namun demikian, pada saat yang sama, masih banyak agenda yang perlu dijalankan agar terbentuk kinerja lebih baik. Intervensi kebijakan dan keterlibatan para pemangku kepentingan yang lebih luas amat dibutuhkan

untuk mencapai kinerja itu. Dalam intervensi dan keterlibatan pemangku kepentingan ini, selalu penting untuk menempatkan pemuda sebagai subyek dan aktor utama, untuk membuat pemuda memainkan peran bagi dirinya—juga bagi bangsanya kini dan nanti.

III. CAPAIAN DAERAH: DINAMIKA DAN PERBANDINGAN





alam format pembentukannya, selain disusun dengan basis lima domain, data IPP juga dikumpulkan dengan menggunakan beragam survei dan sensus atas penduduk Indonesia di seluruh provinsi dalam sampel dan populasi yang memadai. Hal ini memungkinkan IPP didisagregasi ke dalam unit-unit analisis tingkat provinsi. Untuk setiap yurisdiksi provinsi secara invidual, bagian ini menyajikan perbandingan antardomain dan antarwaktu. Hal ini dapat menolong pengambil kebijakan di setiap provinsi untuk melihat dan membandingkan capaian **IPP** antarwilayah, tepatnya antarprovinsi.

Secara keseluruhan bab ini menyajikan dinamika IPP di setiap provinsi dalam dua garis besar. Pertama, menampilkan capaian-capaian penting oleh provinsi, sebagai apresiasi atas segala usaha pembangunan pemuda yang telah dijalankan. Kedua, menyajikan domain-domain dan indikator-indikator yang membutuhkan perhatian untuk diambil tindakan kebijakan untuk memperbaikinya.

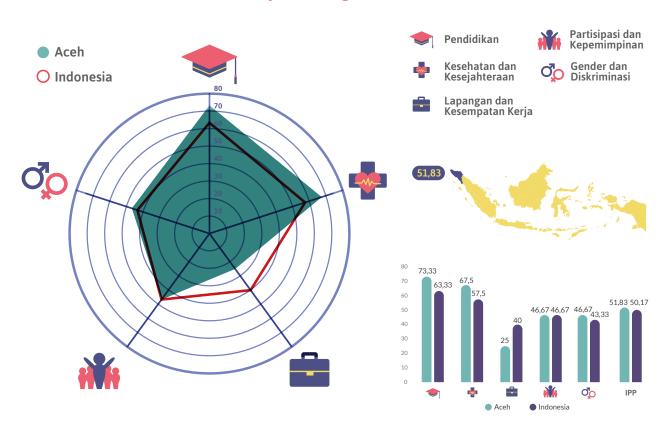


III.1 Provinsi Aceh

Dalam IPP, provinsi di ujung barat negeri ini mencatat nilai sebesar 51,8. Nilai ini meningkat sedikit dari 50,5 di tahun 2015. Secara relatif terhadap provinsi-provinsi lain, ini bukan capaian yang buruk. Walau begitu, dalam skala 0-100, sebagaimana juga di tingkat nasional, capaian senilai ini masih membutuhkan kerja yang lebih giat lagi. Tantangan-tantangan yang ada masih berat. Meskipun ada domain-domain yang berkinerja baik, tapi tentu ada domain yang memerlukan perhatian kebijakan tersendiri.

Domain pendidikan dan kesehatan memang terhitung tinggi dalam menyumbang IPP, bahkan melampaui apa yang dicapai di tingkat nasional. Namun begitu, dalam domain lapangan dan kesempatan kerja, provinsi ini praktis menghadapi tantangan yang tak ringan. Dalam domain ini, capaian Aceh sekitar 15 poin lebih rendah daripada capaian nasional (40 poin). Ini membawa implikasi kebijakan yang serius, karena perbaikan dalam pendidikan dan kesehatan pemuda tidak serta merta terpantulkan di pasar kerja penyerapnya. Pembentukan wirausaha muda dan penyusutan angka pengangguran menjadi satu paket agenda kebijakan bertaut yang amat dibutuhkan. Penting pula dicatat, dalam tujuh tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Aceh memang cenderung menurun, dari 5,9 persen (2010) dengan fluktuasi bergeirigi kecil menjadi 4,1 persen (2017; aceh.bps. go.id). Hingga derajat tertentu, keadaan ini melimitasi daya serap permintaan pekerja di sektor-sektor ekonomi.

Gambar 3.1 Kinerja Pembangunan Pemuda Aceh 2016



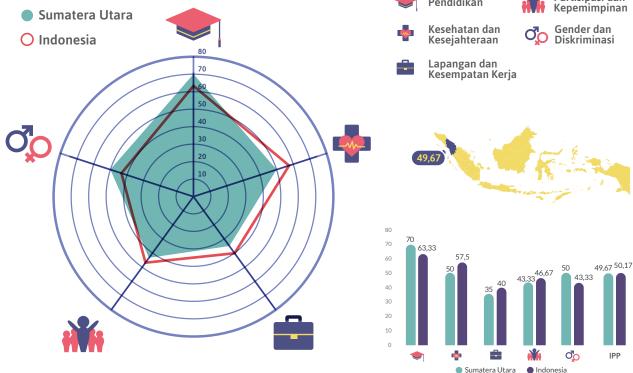
III.2 Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara mengalami kemunduran pembangunan pemuda, sebagaimana ditangkap melalui IPP. Dalam tahun 2015, IPP provinsi ini masih 51 poin. Pada tahun itu, indeks sebesar ini bahkan lebih besar tiga poin di atas indeks nasional. Namun, setahun kemudian keadaannya justru terbalik: IPP provinsi ini menurun hingga ke tingkat yang lebih rendah daripada 50, sedangkan IPP nasional naik melebihi indeks 50. Kebijakan yang agak khusus tampaknya diperlukan, karena adanya penurunan yang relatif dalam. Dari empat provinsi yang menghadapi penurunan kinerja pembangunan pemuda bersama-sama dengan Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, dan Bali—Sumatera Utara termasuk yang terdalam.

Dua domain—pendidikan serta gender dan diskriminasi—memang mengalami perbaikan, sementara domain lapangan dan kesempatan kerja tak berubah. Kendati demikian, domain kesehatan memperlihatkan kinerja yang memburuk. Indeks kesehatan turun amat besar, yakni 15 poin dari 65 ke 50. Keadaan ini bersumber dari peningkatan hampir tiga kali remaja perempuan yang mengalami kehamilan, dari 16 persen ke 43 persen. Dari perspektif nilai indikator yang ditransformasi, kenaikan ini menyebabkan penurunan sub-indeks kehamilan remaja yang amat tajam, dari tujuh menjadi satu poin. Dibandingkan dengan apa yang terjadi di seluruh provinsi Indonesia, keadaan ini dapat disebut ekstrim-bahkan jika dibandingkan penurunan yang dialami oleh Sulawesi Tenggara yang juga besar, dari tujuh ke empat poin. Penurunan ini menuntut penyelidikan lebih jauh, mengingat dalam laporan UNICEF yang menggunakan data BPS—Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause 2016-meski termasuk dalam '10 Besar', kecenderungan perkawinan usia anak di Sumatera Utara telah menurun dari 34,8 persen (2008) menjadi 28,7 (2015).

Partisipasi dan Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan

Gambar 3.2 Kinerja Pembangunan Pemuda Sumatera Utara 2016



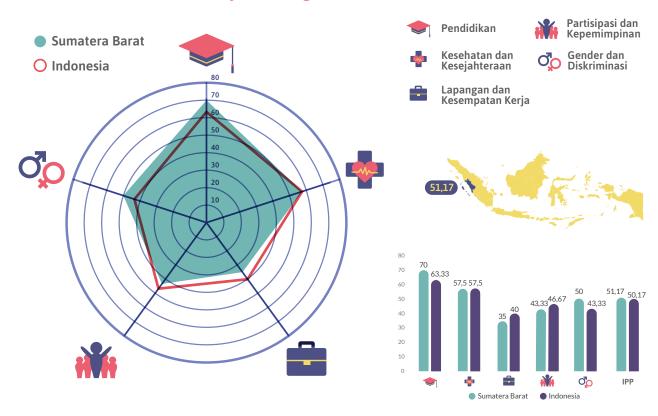
III.3 Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat mengikuti pola yang terjadi di tingkat nasional. IPP meningkat dari 48 ke 51—besaran indeksnya bahkan sedikit lebih besar daripada indeks nasional. Kenaikan ini tergolong modest, karena ini bukan perubahan yang terbesar di Sumatera, juga di seluruh Indonesia. Di Sumatera, tercatat ada Sumatera Selatan dan Bengkulu yang membuat lompatan lebih jauh. Sumatera Selatan bahkan membuat lompatan paling besar di seluruh Indonesia. Di luar Sumatera, Sulawesi Utara dan Maluku juga mencatat perubahan kinerja yang besar.

Meski demikian, ada dua kinerja yang patut mendapat apresiasi. Pertama, dalam indikator kehamilan remaja, Sumatera Barat berhasil menurunkan angka ini dengan amat baik.

Kehamilan remaja turun dari dari hampir 26 persen ke sekitar 11 persen. Dalam perspektif besaran indikator yang ditransformasi, kinerja ini membuat sub-indeks kehamilan remaja membaik dari lima poin di tahun 2015 menjadi tujuh poin pada tahun berikutnya. Kendati indikator lain di domain ini tidak impresif—bahkan sub-indeks korban kejahatan menurun—kenaikan ini cukup mampu mengangkat keseluruhan indeks di domain kesehatan dan kesejahteraan dari 50 ke 57,5. Kedua, Sumatera Barat mampu memperbaiki indeks domain pendidikan dari 67 ke 70. Penopangnya ialah indikator ratarata lama sekolah yang membaik dari 10,4 ke 10,7 tahun. Patut dicatat, walaupun tidak berubah, dalam perspektif besaran indikator yang ditransformasi, sub-indeks partisipasi sekolah menengah provinsi ini sudah tergolong tinggi, sebesar sembilan poin.

Gambar 3.3 Kinerja Pembangunan Pemuda Sumatera Barat 2016

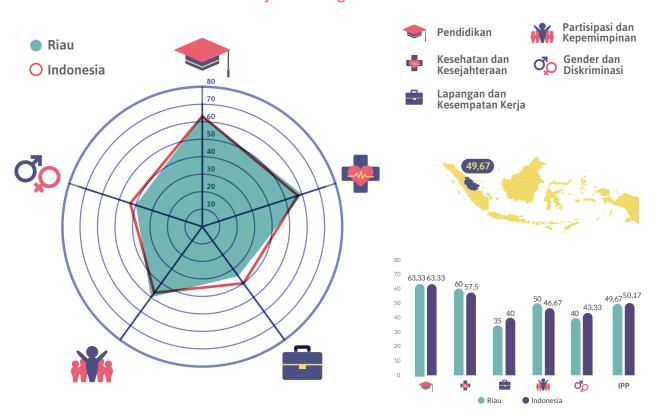


III.4 Provinsi Riau

Dalam IPP capaian Riau masih di bawah capaian nasional. Tahun 2015, IPP provinsi sekitar satu poin di bawah IPP nasional. Hingga setahun berikutnya, pertambahan tahunan IPP Riau persis sebesar apa yang dicapai secara nasional, hampir tiga poin. Ini membuat IPP Riau tetap berada di bawah IPP nasional pada tahun 2016. Beberapa sub-indeks terhitung rendah dan terlihat tidak bergerak naik-bahkan menurundalam dua tahun amatan. Ini memberikan pesan langsung bahwa indikator-indikator penjelasnya bertambah amat tipis atau menurun. Indikator pemuda wirausaha dan pemuda perempuan bersekolah menengah adalah contoh untuk itu. Indikator pemuda aktif dalam organisasi sosial juga terhitung rendah.

Tentu saja ada hal positif yang dicapai, karena provinsi ini juga membukukan dua prestasi penting. Dalam prestasi pertama, Riau mampu meraih APK hingga 86 dan 87 persen dalam dua tahun berturut-turut, sehingga membuat sub-indeks indikator ini menjadi sembilan. Itu pula yang terjadi pula pada indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebesar 84 persen—juga dengan sub-indeks sembilan. Ini sesungguhnya capaian yang lazim terjadi di beberapa provinsi lain. Namun demikian, ada prestasi kedua yang patut mendapat apresiasi tersendiri. Dalam hal ini Riau mampu menurunkan persentase remaja perempuan hamil dari 30 persen hingga sepertiganya, 11 persen. Ini prestasi yang agak jarang ditemui, karena sedikit sekali provinsi yang dapat menggerakan sub-indeks indikator ini hingga empat poin, dari empat (2015) menjadi delapan (2016).

Gambar 3.4 Kinerja Pembangunan Pemuda Riau 2016



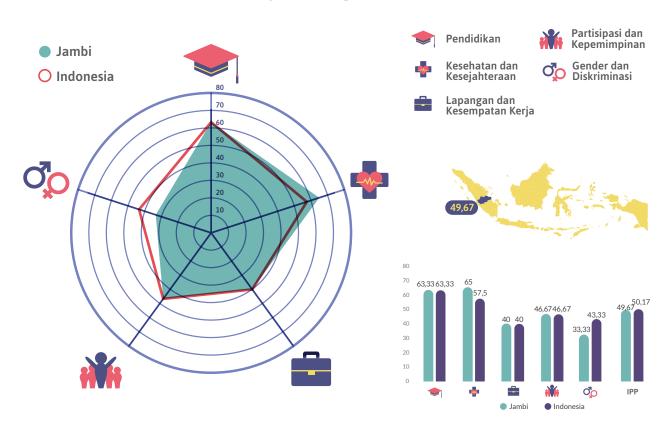
III.5 Provinsi Jambi

Dalam IPP, Jambi amat lambat bergerak. Perubahan indeks yang terjadi bahkan kurang dari 0,4 poin, yakni 49,3 di tahun 2015 menjadi 49,7 di tahun berikutnya. Ini karena pergerakan positif hanya terjadi pada domain kesehatan dan kesejahteraan. Itu pun tak seluruhnya—hanya tiga dari empat indikatornya yang mengalami perubahan. Pemuda korban kejahatan berkurang dari satu persen ke 0,9 persen, sehingga nilai sub-indeksnya membaik satu poin untuk mencapai delapan poin. Pemuda merokok juga menurun dari 27 ke 26 persen. Ini menyebabkan pertambahan poin dari tiga di tahun 2015 menjadi empat

setahun berikutnya. Sementara itu, remaja perempuan hamil juga berkurang dari 25 persen ke 17 persen, yang berarti sub-indeks melompat dua poin, dari lima ke tujuh.

Namun demikian, perbaikan dalam kinerja indikator remaja perempuan hamil ini tidak serta merta diikuti oleh perbaikan dalam kinerja indikator perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak justru meningkat dari 25 persen ke 30 persen. Ini membuat kinerja sub-indeks ini menurun dari lima menjadi empat poin. Penurunan kinerja juga terjadi pada pemuda wirausaha dari 0,3 persen menjadi 0,1 persen. Sementara itu, indikatorindikator lain terhitung stagnan dalam kinerjanya sebagai sub-indeks penyusun IPP.

Gambar 3.5 Kinerja Pembangunan Pemuda Jambi 2016



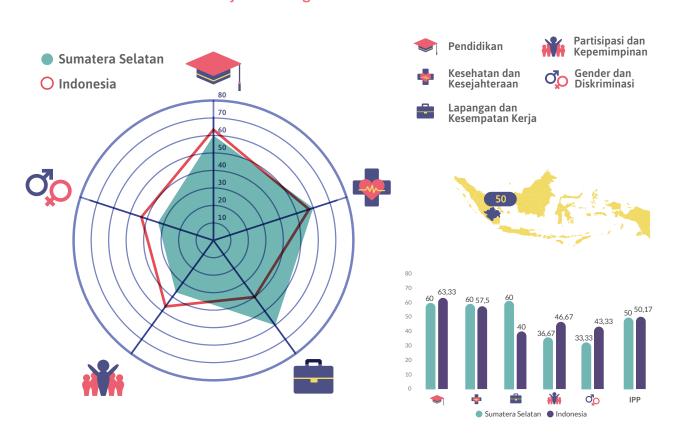
III.6 Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan melakukan lompatan IPP yang amat besar—terbesar di seluruh negeri. Dari segi perubahan IPP provinsi ini menduduki tempat teratas, karena berhasil meningkatkan IPP lebih dari delapan poin. Tahun 2015 Sumatera Selatan adalah provinsi dengan IPP yang bukan hanya jauh lebih kecil dari IPP nasional, tapi juga terkecil di antara seluruh provinsi, dengan nilai 41,5. Dengan lompatan itu, tahun 2016 Sumatera Selatan berada di kelompok tengah dengan IPP yang amat dekat dengan IPP nasional.

Perubahan besar di Sumatera Selatan sesungguhnya hanya didukung oleh dua domain. Penyumbang pertama adalah domain kesehatan dan kesejahteraan. Dalam domain ini indikator kehamilan remaja turun amat besar, dari 31 persen menjadi 11 persen.

Ini membuat sub-indeksnya bertambah besar, dari empat menjadi delapan. Bersamaan dengan penurunan dua persen pemuda merokok, indeks domain kesehatan dan kesejahteraan meningkat dari 48 menjadi 60 poin. Domain penyumbang kedua adalah lapangan dan kesempatan kerja. Dalam domain ini, sub-indeks pemuda wirausaha membesar dari satu menjadi lima, sedangkan sub-indeks pengangguran berubah dari enam menjadi tujuh. Masing-masing sub-indeks ini menangkap peningkatan pemuda wirausaha dari 0,2 persen menjadi 0,9 persen, serta penurunan tingkat pengangguran dari 15 persen menjadi 10 persen. Perubahan dalam IPP ini juga tampaknya sejalan dengan perubahan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)—Sumatera Selatan termasuk dalam 'lima teratas perubahan IPM' (bps. go.id).

Gambar 3.6 Kinerja Pembangunan Pemuda Sumatera Selatan 2016

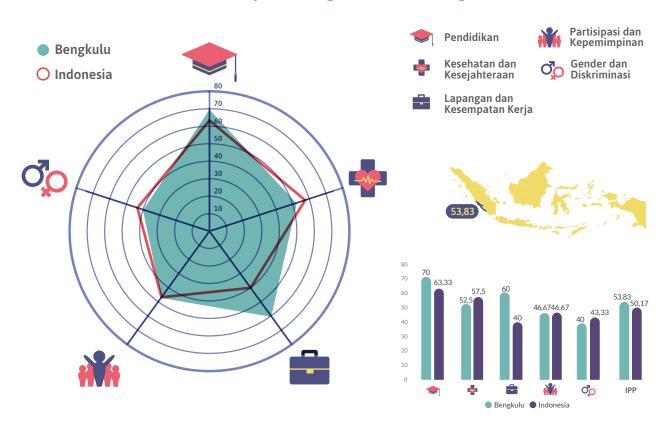


III.7 Provinsi Bengkulu

Bengkulu termasuk salah satu di antara empat top movers IPP dengan perubahan tahunan yang besar. Dalam IPP, provinsi ini bergerak maju tujuh poin dari sekitar 47 ke 54. Dengan IPP sebesar ini, Bengkulu bukan hanya berada hampir empat poin di atas IPP nasional, tetapi sekaligusnya juga membawa provinsi ini ke kedudukan keenam dalam IPP 2016. Bengkulu patut menjelajahi sumbersumber kemajuan ini, agar pertumbuhan pembangunan pemuda lebih terakselerasi.

Domain pendidikan adalah penjelas pertama pembentukan kinerja impresif ini. Kecuali indikator partisipasi dalam pendidikan tinggi, dua indikator lain—rata-rata lama sekolah dan partisipasi sekolah menengah—memang terhitung besar. Dalam perspektif besaran indikator yang ditransformasi, sub-indeks rata-rata lama sekolah naik satu poin, dari tujuh ke delapan. Ini merujuk pada indikator rata-rata lama sekolah yang berubah dari 10,3 tahun ke 10,6 tahun. Dalam APK perguruan tinggi, kenaikan juga terjadi dari 30 ke 34 persen, sehingga mengubah subindeks APK perguruan tinggi dari tiga menjadi empat poin. Namun demikian, perhatian agak khusus patut diberikan pada domain gender dan diskriminasi. Selain indeks yang terbentuk masih rendah, perubahan positif tidak terjadi antara tahun 2015-2016. Saat ini, indeks domain ini baru mencapai 40.

Gambar 3.7 Kinerja Pembangunan Pemuda Bengkulu 2016

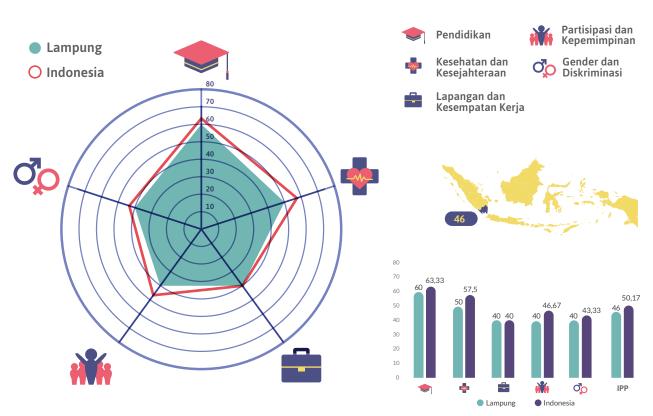


III.8 Provinsi Lampung

Dalam IPP, Lampung sedikit bergerak maju, meski provinsi ini tetap berada di kelompok terbawah pembangunan pemuda. Sayangnya, kemajuan ini hanya mengubah Lampung dari peringkat ke-33 di tahun 2015 menunju peringkat ke-32 di tahun 2016, karena IPP provinsi ini hanya berubah tiga poin dari indeks sebesar 43 ke 46. Namun demikian, provinsi ini tetap mencatat tanda-tanda kemajuan di beberapa hal. Hal-hal baik yang telah dicapai provinsi ini adalah dalam indikator rata-rata lama sekolah dan APK sekolah menengah, masing-masing dengan nilai sub-indeks tujuh dan sembilan. Selain itu, ada juga partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan perkawinan usia anak dengan nilai sub-indeks, berturut-turut, sembilan dan tujuh.

Di sisi yang berlawanan, masih ada serangkaian indikator dengan nilai indeks yang rendah dan membutuhkan perhatian perspektif kebijakan. Dalam besaran indikator yang ditransformasi, sub-indeks APK perguruan tinggi terhitung rendah, hanya dua poin di tahun 2016—tidak berubah dari tahun lalu. Selanjutnya adalah sub-indeks pemuda wirausaha (white collar) dan subindeks pemuda perempuan yang bersekolah menengah dan perguruan tinggi, masingmasing juga dengan nilai indeks dua. Indeks yang terburuk adalah sub-indeks partisipasi pemuda dalam organisasi. Lampung hanya mampu mencatat nilai sub-indeks satu nilai terendah—dalam indikator tersebut. Dalam perbandingannya dengan IPM, di seluruh Sumatera, Lampung memang yang paling kurang berkinerja. Dalam 2015 dan 2016, IPM Lampung tidak melampaui nilai 68, sementara indeks provinsi-provinsi lain di pulau ini mendekati indeks nasional, di sekitar 69 bahkan 70 (bps.go.id).

Gambar 3.8 Kinerja Pembangunan Pemuda Lampung 2016

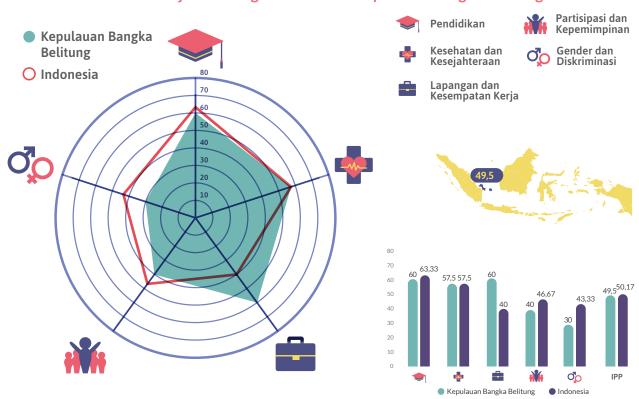


III.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)

Kepulauan Bangka Belitung mencatat kemajuan dalam IPP dengan kenaikan lima poin dari indeks 45,5 di tahun 2015. Dua domain mendorong perkembangan inipendidikan serta lapangan dan kesempatan kerja. Indeks domain pendidikan bergerak naik hampir empat poin, melalui dorongan indikator APK perguruan tinggi bergeser dari 9,2 persen ke 11,5 persen. Pemuda wirausaha (white collar), dalam domain lapangan dan kesempatan kerja, juga memperlihatkan kinerja positifnya. Kenaikannya amat impresif, dari 0,03 persen ke 0,67, yang selanjutnya membuat subindeks bagi indikator ini melompat tiga poin. Sejalan dengan itu, pengangguran juga menurun signifikan, dari 14 persen ke enam persen. Ini capaian yang patut dipuji, karena kinerja seperti ini jarang dijumpai.

Namun demikian, beberapa catatan penting perlu diberikan. Nilai IPP Babel selalu di bawah indeks nasional dalam tahun amatan 2015-2016. Hal ini diperburuk oleh tingginya kehamilan remaja remaja. Pada tahun 2015 terhitung delapan persen remaja hamil, tetapi setahun berikutnya indikator ini memperlihatkan angka 26 persen. Lonjakan tersebut amat besar—lebih dari tiga kali lipat sehingga membuat sub-indeks kehamilan remaja turun amat tajam. Keadaan ini diikuti juga oleh indikator perkawinan usia anak yang meningkat dari 25 persen ke 29 persen, yang berarti satu di antara 3-4 anak perempuan sudah menikah. Kombinasi kebijakan amat diperlukan untuk mengatasi situasi ini, sebab titik masuknya terbuka amat lebar. Sebagai contoh, sub-indeks partisipasi sekolah menengah dan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan terhitung amat tinggi, sembilan poin. Hal ini adalah titik masuk potensial untuk mengembangkan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan progresif mengenai perkawinan usia anak dan kehamilan remaja.

Gambar 3.9 Kinerja Pembangunan Pemuda Kepulauan Bangka Belitung 2016

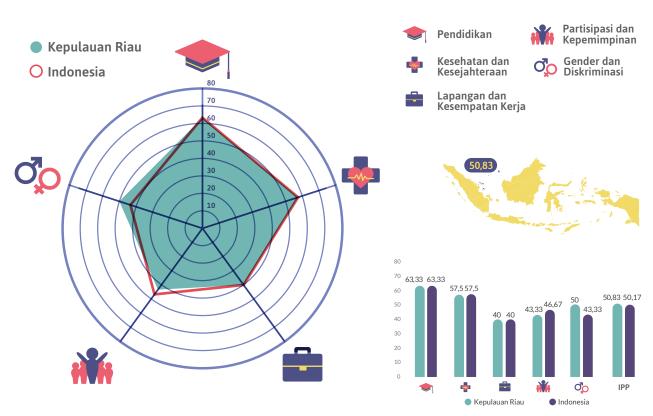


III.10 Provinsi Kepulauan Riau

Dari segi peringkat IPP, Kepulauan Riau sesungguhnya tidaklah buruk. Saat ini, Provinsi Kepulauan Riau memang bukan berada di 'lima teratas', tapi juga bukan bagian dari 'lima terbawah'. Walau begitu, provinsi ini mencatat kemunduran IPP yang paling jauh. Dalam IPP, indeks provinsi ini turun sekitar tujuh poin, dari 57 menjadi 50. Keadaan ini membuat indeks Kepulauan Riau yang sebelumnya berada di atas indeks nasional (2015) menjadi di bawahnya (2016). Padahal, pada tahun 2015 lalu, Kepulauan Riau adalah satu di antara tiga provinsi tertinggi dalam IPP.

Indeks Kepulauan Riau turun hampir di semua domain, bahkan hingga indikatorindikatornya. Dapat dikatakan, tidak ada satupun indikator yang memperlihatkan kemajuan, poin indikator tersebut hanya stagnan atau turun. Domain yang paling dalam turun adalah domain kesehatan dan keseiahteraan serta domain gender dan diskriminasi. Karakteristik indikatornya berdekatan, yakni kehamilan remaja dan perkawinan usia anak. Kehamilan remaja meningkat ganda, dari 13 persen menjadi 26 persen, sehingga membuat sub-indeksnya turun dari delapan ke lima poin. Sementara itu, perkawinan usia anak juga merambah naik dari 12 persen ke 20 persen, yang selaniutnya membuat sub-indeksnva menurun dari delapan menjadi enam poin. Pemuda wirausaha juga praktis hilang, karena tahun 2016 tidak ada lagi yang tercatat secara statistik. Hal ini diikuti oleh partisipasi sekolah menengah yang menurun dan tingkat kesakitan pemuda yang meningkat. Provinsi Kepulauan Riau patut segera melakukan evaluasi mendalam atas gerak pembangunan pemuda yang terjadi saat ini dan menyiapkan tindakan mitigasinya, lalu berbalik ke capaian baru yang lebih baik.

Gambar 3.10 Kinerja Pembangunan Pemuda Kepulauan Riau 2016



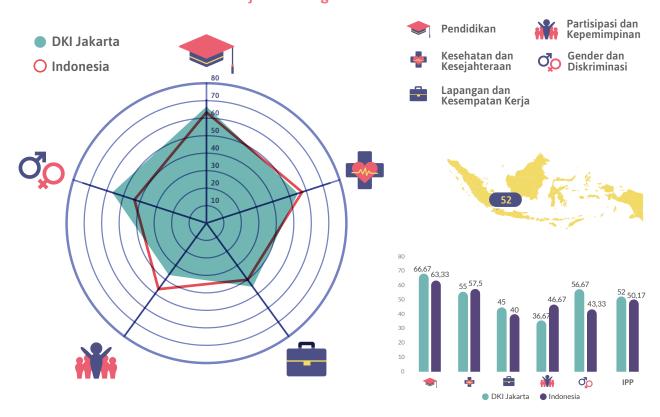
III.11 Provinsi DKI Jakarta

Dalam perannya sebagai ibu kota negara, ada ekspektasi umum terhadap Jakarta dalam IPP, yakni Jakarta sepatutnya menduduki peringkat utama. Hal ini benar untuk sebagian, tapi tidak untuk sebagian yang lain. Capaian tinggi ditemui dalam indikator ratarata lama sekolah dan partisipasi sekolah menengah di domain pendidikan, kehamilan remaja perempuan dalam domain kesehatan dan kesejahteraan, partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial di domain partisipasi dan kepemimpinan, serta perkawinan usia anak dan perempuan bekerja di sektor formal dalam domain gender dan diskrimasi. Nilai sub-indeks setiap indikator dalam domaindomain ini berkisar antara tujuh dan sembilan poin.

Berlawanan dengan itu, indikator-indikator lain cenderung berindeks rendah atau

sedang. Sub-indeks partisipasi pemuda dalam organisasi tercatat sebagai indikator dengan nilai terendah, satu poin. Selanjutnya, satu poin lagi di atas nilai sub-indeks ini —dua poin terdapat indikator pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan serta pemuda perempuan sedang menempuh sekolah menengah dan perguruan tinggi. Selanjutnya, tiga poin indeks tercatat untuk pemuda wirausaha (white collar) diikuti oleh pemuda korban kejahatan—empat poin indeks—yang merupakan khas kota besar. Dalam rentang 2015-2016, indikator-indikator juga terhitung stagnan dalam nilai sub-indeks, tanpa perubahan. Tahun 2015 keadaan ini masih menempatkan Jakarta sebagai satu di antara 'lima besar' provinsi yang berkinerja dalam pembangunan pemuda. Namun demikian, setahun berikutnya, Jakarta harus keluar dari 'lima besar' untuk menduduki peringkat ke-8, walau nilai IPP-nya tetap berada di atas IPP nasional.

Gambar 3.11 Kinerja Pembangunan Pemuda DKI Jakarta 2016

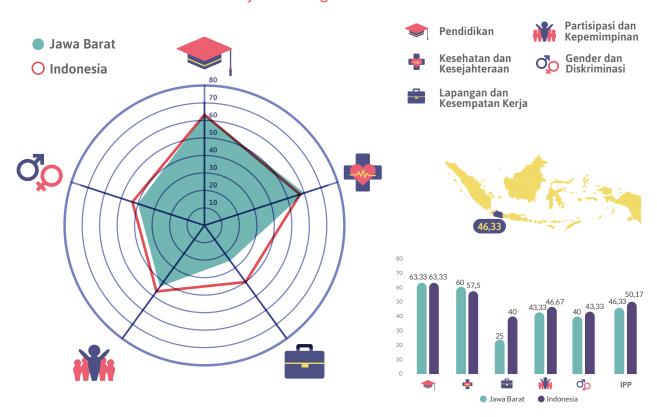


III.12 Provinsi Jawa Barat

Kinerja Jawa Barat dalam IPP mendapat tantangan yang amat serius. Dekat dengan ibukota negara, Jawa Barat bukan hanya dapat tumbuh dari kekuatan internal, tetapi juga dari kekuatan konektivitas dengan kekuatan eksternal melalui spillover pertumbuhan. Kendati demikian, keadaan yang terjadi justru terbalik. IPP Jawa Barat memang bertambah hampir dua poin, namun selama tahun 2015-2016 provinsi ini tergabung dalam kelompok 'Lima Terbawah' IPP. Pada tahun 2015, Jawa Barat berada di peringkat ke-30 dengan indeks 44,5. Di tahun 2016, meski IPP naik menjadi 46,3, Tanah Sunda memburuk satu peringkat dalam pembangunan pemuda. Ini artinya, relatif terhadap provinsi lain, akselerasi pembangunan pemuda kurang terjadi di Jawa Barat, sehingga pertambahan hampir dua poin IPP tidak bergerak searah dengan kedudukannya dalam keseluruhan peringkat provinsi.

Dalam domain-domain IPP yang beberapa indikator sesungguhnya mencatat capaian baik. Angka partisipasi sekolah menengah dalam domain pendidikan serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dalam domain partisipasi dan kepemimpinan mencatat nilai sub-indeks tertinggi, masingmasing sembilan poin. Beberapa sub-indeks lain—rata-rata lama sekolah, pemuda korban kejahatan, kehamilan remaja perempuan juga berada dalam rentang 7-8. Tantangan yang amat terasa adalah partisipasi pemuda dalam organisasi, karena nilai sub-indeksnya tercatat yang paling rendah, satu poin. Sementara itu, nilai sub-indeks dalam rentang dua dan tiga adalah pemuda wirausaha (white collar) dan pemuda perempuan bersekolah menengah dan perguruan tinggi (dua poin), serta APK perguruan tinggi, pemuda merokok dan pengangguran, juga pemuda yang berpendapat dalam rapat kemasyarakatan (tiga poin).

Gambar 3.12 Kinerja Pembangunan Pemuda Jawa Barat 2016

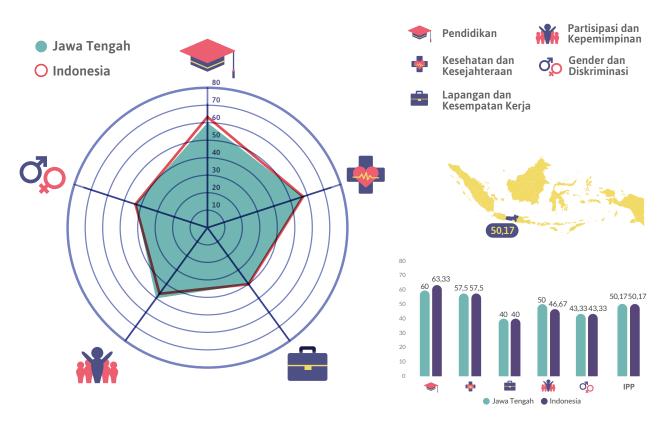


III.13 Provinsi Jawa Tengah

Secara agregat, kinerja pembangunan Jawa Tengah menyerupai kinerja nasional dengan nilai IPP pada tahun 2015 dan 2016 yang amat berimpit. Berada di peringkat tengah tahun 2016 provinsi ini mencatat IPP sebesar 50,2. Perkembangan ini berarti peningkatan tiga poin dari 47,7 di tahun 2015. Indikator APK sekolah menengah dalam domain pendidikan terhitung besar. Dalam dua tahun itu, APK mencapai 87 dan 88 persen, sehingga menjadikannya sebagai sub-indeks dengan nilai sembilan poin. Capaian setara juga diperlihatkan oleh indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dalam domain partisipasi dan kepemimpinan.

Seperti juga di tingkat nasional, di provinsi ini hampir di setiap domain terdapat paling sedikit satu indikator dengan nilai subindeks yang kecil, yakni dua. Sub-indeks senilai ini terbentuk dari relatif rendahnya capaian provinsi pada indikator-indikator itu. Tingkat APK perguruan tinggi dalam domain pendidikan baru 15-16 persen dalam dua tahun amatan. Pemuda wirausaha (white collar) dalam domain lapangan dan kesempatan kerja tercatat kurang dari 0,3 persen. Partisipasi pemuda dalam organisasi pada domain partisipasi dan kepemimpinan baru sekitar enam persen. Sementara itu, pemuda perempuan bersekolah menengah dan perguruan tinggi pada domain gender dan diskriminasi hanya tercatat 36 persen. Jawa Tengah masih perlu bergeliat dalam pembangunan pemuda.

Gambar 3.13 Kinerja Pembangunan Pemuda Jawa Tengah 2016

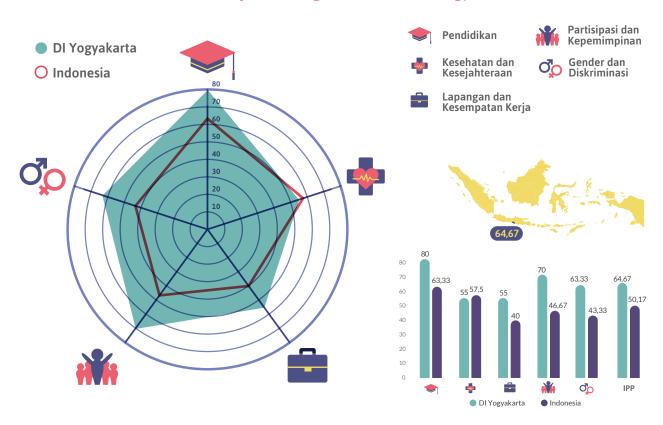


III.14 Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta

DI Yogyakarta berada di puncak tertinggi urutan pembangunan pemuda Indonesia. Selama 2015-2016 provinsi ini menduduki urutan pertama dengan IPP 64 dan 65. Capaian ini ditopang kuat oleh domain pendidikan—sehingga menegaskan identitasnya sebagai 'kota pelajar'. Dalam domain ini, DI Yogyakarta praktis berada di atas semua provinsi. Rata-rata lama sekolah tercatat mendekati 12 tahun. Ini artinya wajib belajar 12 tahun sudah dicapai. APK sekolah menengah sudah melebihi 90 persen, untuk mengimbangi rata-rata lama sekolah yang tinggi itu. Pada saat yang bersamaan, APK perguruan tinggi sekitar 55 persen. Dua indikator pertama ini membentuk nilai sub-indeks yang besar, yakni delapan dan sepuluh, sedangkan indikator yang terakhir bernilai enam. Semuanya menjadikan domain pendidikan memiliki nilai 80—nilai domain tertinggi dari seluruh provinsi.

Hal yang paling impresif adalah penurunan hingga ke nol persen kehamilan remaja di tahun 2016 dari empat persen di tahun sebelumnya. Provinsi-provinsi lain amat perlu menarik pelajaran dari sini, sedangkan DI Yogyakarta amat patut membagi pengalaman tentang hal ini. Nol persen kehamilan remaja adalah kinerja tertinggi yang dapat diraih. Dengan capaian-capaian ini, sub-indeks kehamilan remaja mencapai nilai tertinggi, 10 poin. Namun demikian, catatan perbaikan perlu diberikan pada indikator pemuda korban kejahatan dan pemuda wirausaha (white collar) yang kurang berkinerja. Pemuda korban kejahatan praktis stagnan, sementara pemuda wirausaha menurun dari 0,9 persen ke 0,5 persen. Pada tahun 2016, kedua indikator merupakan sub-indeks terkecil bagi DI Yogyakarta dengan tiga poin.

Gambar 3.14 Kinerja Pembangunan Pemuda DI Yogyakarta 2016



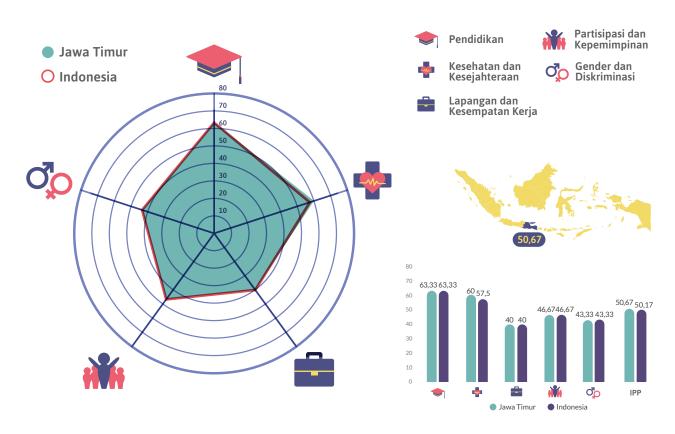
III.15 Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana kinerja Jawa Tengah yang menyerupai kinerja Indonesia, Jawa Timur pun tak jauh berbeda. Nilai IPP total hanya 0,5 poin lebih besar daripada IPP Indonesia. Struktur domain penopang IPP juga serupaseperti struktur indikator penyusunnya. Dalam pola yang seperti ini, rata-rata lama sekolah dan APK sekolah menengah cenderung baik, sebagaimana juga partisipasi dalam kegiatan sosial. Sub-indeksnya berkisar 7-9 poin. Hal ini merujuk pada rata-rata lama sekolah pada kisaran sepuluh tahunan, partisipasi sekolah menengah 85-87 persen, serta partisipasi dalam kegiatan sosial 87 persen pada tahun 2015 dan 2016.

Dalam mayoritas fenomena antar provinsi, capaian indikator pemuda wirausaha (white

collar) dan perempuan usia 16-24 tahun bersekolah menengah dan perguruan tinggi cenderung bukan merupakan capaian yang baik. Keadaan di provinsi ini juga demikian, bahkan keduanya merupakan terendah, masing-masing dengan nilai subindeks dua. Dalam kedua indikator ini Jawa Timur hanya meraih, berturut-turut, 0,35 persen dan 37 persen pada 2016-hanya bertambah sedikit saja dari capaian di 2015. Sementara itu, partisipasi perguruan tinggi, pemuda merokok, serta pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan, masing-masing memiliki nilai sub-indeks tiga. Ini merupakan nilai terendah kedua setelah pemuda wirausaha (white collar) serta perempuan 16-24 tahun bersekolah menengah dan perguruan tinggi.

Gambar 3.15 Kinerja Pembangunan Pemuda Jawa Timur 2016

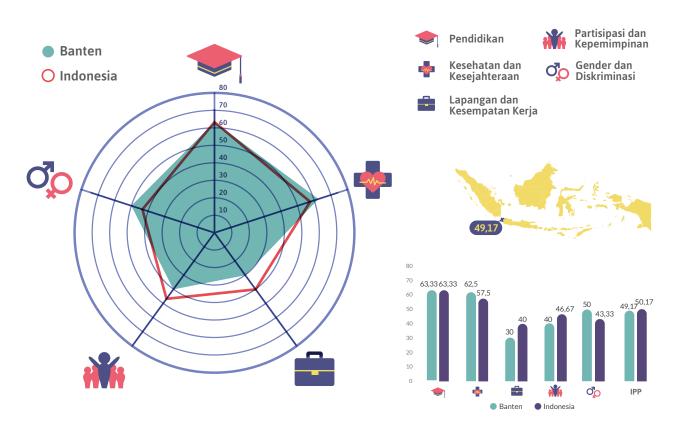


III.16 Provinsi Banten

Kecuali DKI Jakarta, besaran dan struktur IPP provinsi-provinsi di Jawa cenderung berpola serupa dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Banten juga mengalami hal itu. Dengan IPP 49,17-satu poin di bawah IPP nasional-di tahun 2016, provinsi ini memperoleh pertambahan tiga poin IPP dibandingkan dengan IPP tahun lalu. Sebagaimana provinsi-provinsi Jawa rata-rata lama sekolah lainnya, dan partisipasi sekolah menengah cenderung baik-begitu pula partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Nilai subindeks indikator-indikator ini berada pada kisaran 7-9 poin.

Capain terendah provinsi ini ditemui dalam partisipasi pemuda dalam organisasi, kurang dari empat persen. Ini membuat nilai subindeksnya berada di nilai terendah, satu poin. Tiga indikator berikutnya mencatat nilai sub-indeks dua poin, masing-masing adalah pemuda wirausaha (white collar), pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan, serta pemuda perempuan 16-24 tahun bersekolah menengah dan perguruan tinggi. Tahun 2016 pemuda wirausaha tidak cukup banyak, kurang dari 0,3 persen. Angka ini turun dari angka tahun sebelumnya sebesar 0,4 persen. Sementara itu, perempuan 16-24 bersekolah menengah dan perguruan tinggi hanya naik kurang dari tiga persen dari capaian 33 persen di tahun lalu, sehingga membuat sub-indeksnya tidak berubah.

Gambar 3.16 Kinerja Pembangunan Pemuda Banten 2016



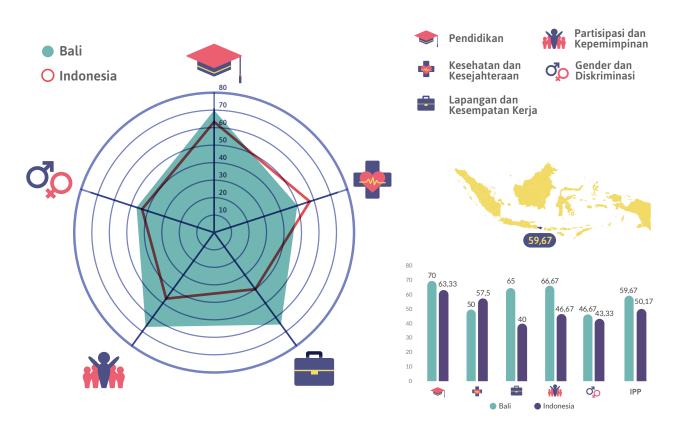
III.17 Provinsi Bali

Bali menempati peringkat kedua dalam pembangunan pemuda. Dengan IPP sekitar 60, hampir di setiap domain provinsi ini mencatat capaian yang impresif. Dalam domain pendidikan, dua indikatornya-ratarata lama sekolah dan partisipasi sekolah menengah-mempunyai nilai sub-indeks tinggi, yakni delapan dan sepuluh. Hal ini merujuk pada rata-rata lama sekolah yang telah melebihi 11 tahun dan partisipasi sekolah menengah yang berada di sekitar 92 persen. Dalam domain lapangan dan kesempatan kerja, relatif terhadap provinsiprovinsi lain, tingkat pengangguran pemuda di Bali juga terhitung rendah, bahkan termasuk yang paling rendah, yakni kurang dari enam persen. Dalam domain partisipasi dan kepemimpinan, indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan organisasi tercatat berturut-turut mencapai 79 persen

dan 34 persen. Capaian ini menjadikan nilai sub-indeks masing-masing bernilai delapan poin, sebagaimana juga perbaikan dalam sub-indeks pemuda korban kejahatan.

Meski demikian, di balik capaian impresif ini, IPP Bali mengalami penurunan pada 2016. Hal ini bersumber dari meningkatnya kehamilan remaja lebih dari dua kali, dari 15 persen menjadi 37 persen, sehingga membuat nilai sub-indeks turun tajam dari tujuh menjadi dua poin. Akibatnya, kendati sub-indeks tiga indikator lainnya membaik, indeks domain kesehatan dan kesejahteraan turun cukup dalam, dari 55 poin ke 50 poin. Keadaan ini sejajar dengan memburuknya indikator pernikahan usia anak, dari 16 persen ke 23 persen, sekaligus menjadikan nilai sub-indeks indikator ini berkurang dari tujuh menjadi lima poin. Kendati dua indikator lainnya membaik, indeks domain gender dan diskriminansi tetap turun.

Gambar 3.17 Kinerja Pembangunan Pemuda Bali 2016

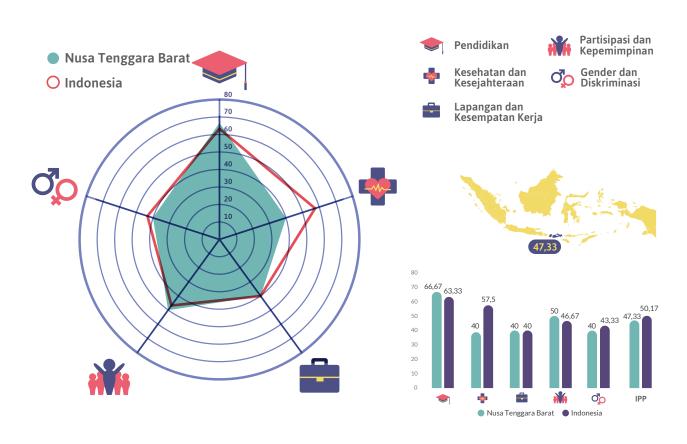


III.18 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan perubahan penting dalam pembangunan pemuda. Dengan IPP berada di indeks 47,3, provinsi ini berhasil keluar dari kelompok 'lima terbawah' —peringkat ke-32—di tahun 2015 dan menduduki peringkat ke-29 dengan hampir empat poin perubahan indeks. Sumbangan penting datang dari indikator tingkat pengangguran dan perempuan bekerja di sektor formal. Tingkat pengangguran turun dari 14 persen ke 10 persen, bergerak harmonis bersama dengan kenaikan perempuan bekerja dari 15 ke 22 persen. Keadaan ini membuat domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi bertambah, masingmasing, dari 35 dan 33 poin ke nilai indeks yang sama, yakni 40 poin.

Walaupun demikian, NTB masih memiliki agenda pembangunan pemuda yang besar. Pemudawirausaha(whitecollar)praktishilang dari provinsi ini. Data memperlihatkan, tahun 2015 masih terdapat 0,17 persen pemuda wirausaha, tapi setahun berikutnya pemuda wirausaha tidak lagi tercatat. Dalam keadaan ini, sub-indeks pemuda wirausaha hanya terhitung satu poin—nilai terendah dalam penghitungan sub-indeks. Pemuda merokok, partisipasi pemuda dalam organisasi, serta pemuda perempuan bersekolah menengah dan perguruan tinggi juga belum banyak. Nilai sub-indeks indikator-indikator ini di sekitar dua-tiga poin. Tantangannya masih besar, tapi—sebagaimana NTB telah keluar dari lima terbawah—provinsi ini telah membuktikan bahwa tantangan itu bisa terjawab.

Gambar 3.18 Kinerja Pembangunan Pemuda NTB 2016



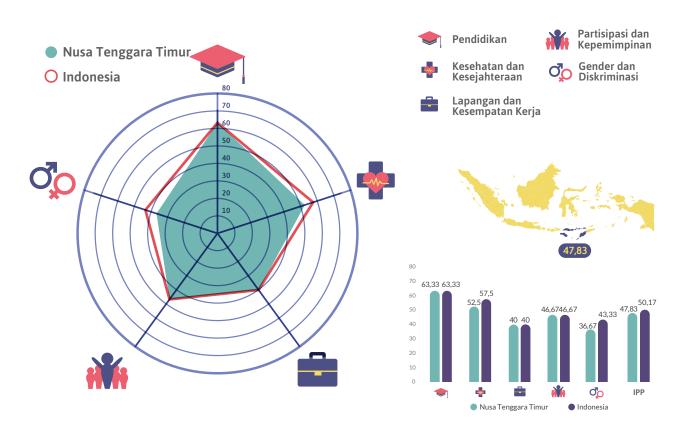
III.19 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan hanya bertetangga secara geografis dengan Nusa Tenggara Barat, tapi seringkali juga dekat dalam capaian-capaian pembangunannya. Tahun 2016 IPP NTT mencapai 47,8 poin—0,5 poin lebih tinggi daripada IPP NTB—untuk menduduki peringkat ke-26. Saat karakteristik sumber pembentukan IPP ini juga serupa. Domain pendidikan tercatat sebagai domain dengan indeks tertinggi, sekaligus sebagai domain yang mengalami pertambahan terbesar, yakni dari 57 ke 63 poin. Hal ini terutama didorong oleh APK perguruan tinggi yang naik dari 20 persen menjadi 23 persen. Domain berikutnya adalah kesehatan kesejahteraan—domain dan

terbesar kedua dalam tingkat dan perubahan nilai IPP, masing-masing dengan hampir 53 poin dan lima poin. Indikator kesakitan pemuda dalam domain ini turun dari 15 persen menjadi 11 persen, sehingga saat ini sub-indeks indikator ini senilai lima poin.

Hal yang perlu mendapat perhatian di NTT dalam pembangunan pemuda adalah pemuda wirusaha (white collar). Kendati ada kenaikan dari 0,1 ke 0,2 poin, perubahan ini terlalu tipis sehingga tidak dapat mengangkat nilai sub-indeks dari nilai satu. Partisipasi pemuda dalam organisasi serta pemuda perempuan bersekolah menengah dan perguruan tinggi juga masih relatif rendah. Nilai sub-indeks indikator ini hanya dua poin. Indikator-indikator lain praktis tidak berubah.

Gambar 3.19 Kinerja Pembangunan Pemuda NTT 2016

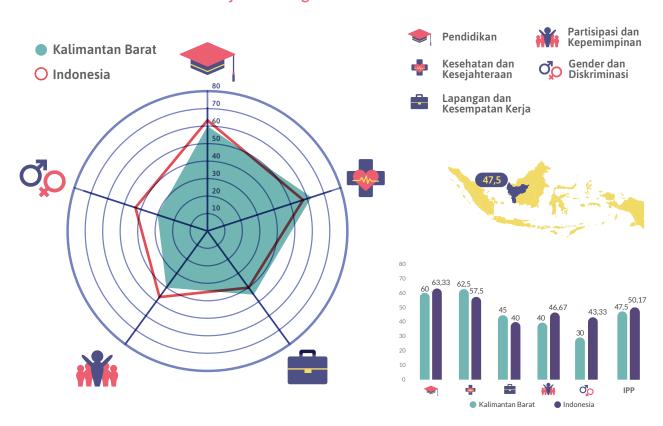


III.20 Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan Barat berada di peringkat ke-28 IPP, dengan indeks tahun 2016 sebesar 47,5 poin. Nilai ini merupakan kenaikan dua poin dari nilai tahun sebelumnya. Sepatutnya IPP provinsi ini dapat lebih besar lagi mengingat lima indikator mengalami perbaikan—peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan pemuda korban kejahatan, penurunan pemuda merokok, kenaikan pemuda wirausaha, dan penurunan perkawinan usia anak. Tidak banyak provinsi dengan kenaikan beberapa indikator sekaligus. Namun demikian, pergerakan capaian yang lebih besar terkoreksi oleh peningkatan kehamilan remaja. menunjukkan, kehamilan remaja meningkat amat besar dari lima persen menjadi 23 persen di tahun 2016. Keadaan ini menyebabkan penurunan tajam dalam nilai sub-indeks kehamilan remaja, yakni dari sembilan ke lima poin. Hal ini merupakan catatan penting bagi pelaku kepentingan di provinsi ini, karena keadaan ini berarti satu dari antara kuranglebih lima remaja mengalami kehamilan.

Walau begitu, Kalimantan Barat juga mencatat beberapa prestasi. Persentase pemuda korban kejahatan dan pemuda merokok berhasil diturunkan, sehingga indeks domain kesehatan dan kesejahteraan dapat diangkat dari 63 poin menjadi 68 poin. Sub-indeks pemuda wirausaha dan tingkat pengangguran juga mengalami perbaikan. Keadaan ini membuat indeks domain lapangan dan kesempatan kerja dapat bergerak naik dari 35 ke 45 poin. Sub-indeks perkawinan usia anak juga membaik dari tiga poin menjadi empat poin. Secara internal, Kalimantan Barat perlu menelusuri faktorfaktor pembentukan kinerja positif ini, untuk dapat memperbaiki indikator yang belum berkinerja, seperti kehamilan remaja yang diungkap di atas.

Gambar 3.20 Kinerja Pembangunan Pemuda Kalimantan Barat 2016

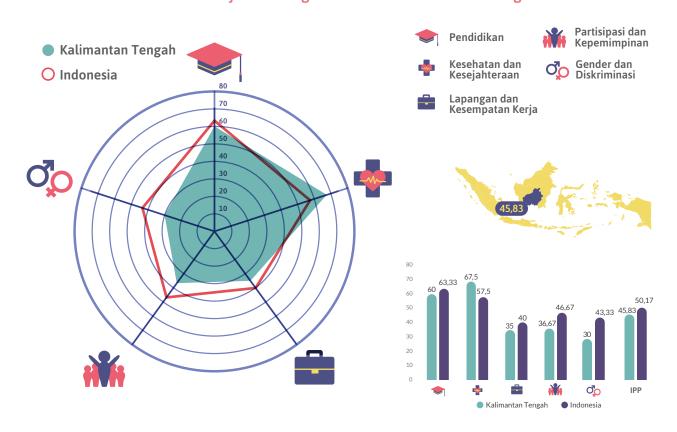


III.21 Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam kelompok terbawah yang sama dengan provinsi Kalimantan Selatan dalam IPP 2016. Ini keadaan yang lebih buruk dibandingkan keadaan tahun sebelumnya, yang saat itu bukan termasuk bagian dari 'lima terbawah'. Penurunan IPP yang terjadi sesungguhnya tidak terlalu besar, setara dengan penurunan IPP Bali, 0,33 poin. Namun, berbeda dengan Bali, Kalimantan Tengah memulainya dengan IPP 2015 yang lebih rendah, 46 poin. Pada saat yang sama, IPP provinsi-provinsi cenderung bertumbuh positif. Dalam keadaan ini, penurunan indeks sedikit saja telah membuat provinsi ini berdiri di urutan paling akhir pembangunan pemuda.

Dalam hal nilai indeks yang rendah, terdapat dua indikator bertanggung jawab atas keadaan Kalimantan Tengah, yakni pemuda wirausaha (white collar) dan partisipasi pemuda dalam organisasi. Kedua indikator ini memiliki nilai sub-indeks yang terendah, yakni satu poin. Dekat dengan itu, ada pula APK perguruan tinggi, pemuda memberikan pendapat dalam rapat kemasyarakatan, perempuan bersekolah pemuda menengah dan perguruan tinggi. Masingmasing indikator ini memiliki nilai sub-indeks yang juga rendah, yakni dua poin. Sementara itu, dalam hal penurunan indeks, tercatat dua indikator dengan karakteristik itu, yakni tingkat pengangguran dan perempuan bekerja di sektor formal. Sub-indeks tingkat mengalami pengangguran penurunan dari tujuh menjadi enam poin, sedangkan sub-indeks perempuan bekerja di sektor formal turun dari empat menjadi tiga poin. Kalimantan Tengah perlu melanjutkan lebih giat lagi upaya-upaya yang sudah dibuat, sebab tanda-tanda perbaikan bukan tidak ada. Ini terlihat dari perbaikan sub-indeks pemuda korban kejahatan, pemuda merokok, serta perkawinan usia anak.

Gambar 3.21 Kinerja Pembangunan Pemuda Kalimantan Tengah 2016



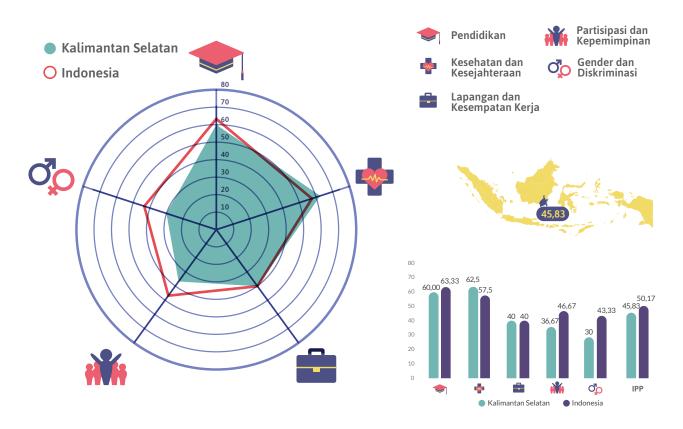
III.22 Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kelompok terbawah, bersama dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Meski telah indeks, mencatat dua poin kenaikan peringkat Kalimantan Selatan justru turun dari 31 ke 34. Hal ini sekali lagi menunjukkan peran penting akselerasi pembangunan. Dalam pertumbuhan yang terbatas—kurang terakselerasi—capaian relatif suatu provinsi dapat tertinggal dari provinsi lain dengan pertumbuhan yang lebih besar; apalagi jika titik pijak IPP awal juga tertinggal.

Kalimantan Selatan sesungguhnya membukukan juga perubahan impresif

hingga 10 poin dalam domain kesehatan dan kesejahteraan. Tiga dari empat indikator di dalamnya menunjukkan perbaikan. Walau demikian, domain-domain lain dan indikatorindikator penopangnya praktis berubah. Bahkan, indikator APK perguruan tinggi menurun, karena nilai sub-indeksnya turun dari tiga poin menjadi dua poin. Empat indikator lain yang terhitung rendah dan membutuhkan perhatian kebijakan adalah partisipasi pemuda dalam organisasi, pemuda memberikan pendapat rapat kemasyarakatan, pemuda perempuan bersekolah menengah dan perguruan tinggi, serta pemuda wirausaha (white collar).

Gambar 3.22 Kinerja Pembangunan Pemuda Kalimantan Selatan 2016

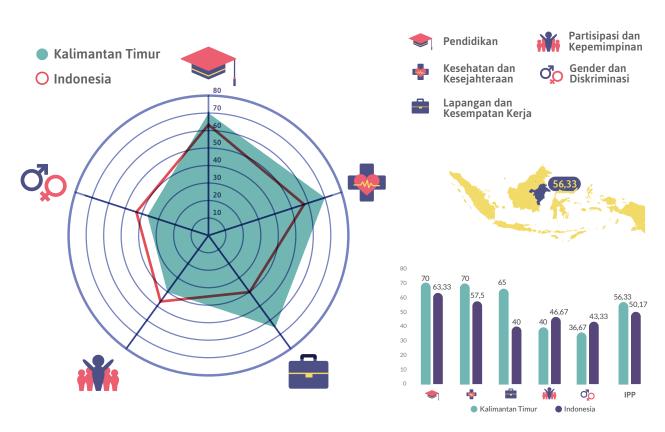


III.23 Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur, provinsi dengan sumber daya alam yang kaya, mencatat dua perubahan besar. Pertama, provinsi ini berhasil membuat pertambahan indeks yang besar, yakni 5,5 poin. Kedua, dengan capaian itu, Kalimantan Timur berhasil masuk ke dalam 'lima teratas' dengan menduduki posisi ketiga setelah DI Yogyakarta dan Bali dengan IPP 56—enam poin di atas IPP nasional. Sumbangan terbesar pada capaian ini berasal dari domain lapangan dan kesempatan kerja. pendukungnya—pemuda Dua indikator wirausaha (white collar) dan tingkat pengangguran—menunjukkan kinerja yang baik. Ini tercermin dari peningkatan subindeks, masing-masing, dari dua poin menjadi delapan poin, serta dari empat poin menjadi lima poin. Pemuda wirausaha tercatat meningkat cepat dari 0,2 persen menjadi 1,4 persen, sementara pengangguran turun dari 17 persen menjadi 16 persen. Indikator tersebut mendorong indeks domain lapangan dan kesempatan kerja untuk meningkat amat tinggi, dari 30 menjadi 65 poin—pertambahan tertinggi yang pernah ada.

Perbaikan kinerja ini, bukan tanpa catatan. Domain kesehatan dan kesejahteraan terhitung turun cukup dalam, yakni 7,5 poin. Penurunan ini bersumber dari kenaikan indikator pemuda korban kejahatan dari setengah persen menjadi satu persen. Selain itu, ada pula kenaikan indikator kehamilan remaja yang cukup besar, yakni dari di bawah satu persen menjadi hingga dekat dengan lima persen. Keadaan ini membuat nilai-nilai sub-indeks keduanya turun, berturut-turut, dari sembilan ke tujuh poin dan sepuluh ke sembilan poin.

Gambar 3.23 Kinerja Pembangunan Pemuda Kalimantan Timur 2016

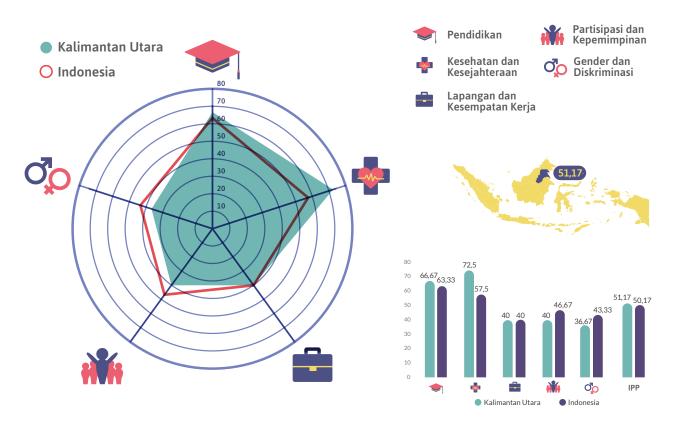


III.24 Provinsi Kalimantan Utara

Sebagai provinsi yang relatif baru, Kalimantan Utara sudah mampu menunjukkan kiprahnya dalam pembangunan pemuda. Ini ditunjukkan melalui kinerja IPP Kalimantan Utara yang melebihi IPP nasional pada tahun 2016, sebagaimana juga pada 2015. Saat ini IPP Kalimantan Utara sebesar 51 poin, naik hampir dua poin relatif terhadap tahun lalu.

Sumber-sumber pertambahan IPP berasal dari dua domain, yakni domain pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan. Domain pendidikan meningkat hampir empat poin dari nilai indeks 63, sedangkan domain kesehatan dan kesejahteraan terangkat lima poin menuju nilai indeks 57,5. Kenaikan indeks domain pendidikan disebabkan oleh indikator partisipasi perguruan tinggi, sedangkan kenaikan indeks domain kesehatan dan kesejahteraan oleh indikator pemuda merokok dan kehamilan remaja. Dalam indikator yang terakhir ini, kehamilan remaja, terdapat penurunan dari 13 persen menjadi enam persen. Walaupun demikian, keadaan ini tidak diikuti oleh perbaikan indikator perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak meningkat dari 30 menjadi 32 persen. Jelas terlihat, masih ada agenda yang perlu dijelajahi lebih jauh oleh provinsi baru ini.

Gambar 3.24 Kinerja Pembangunan Pemuda Kalimantan Utara 2016



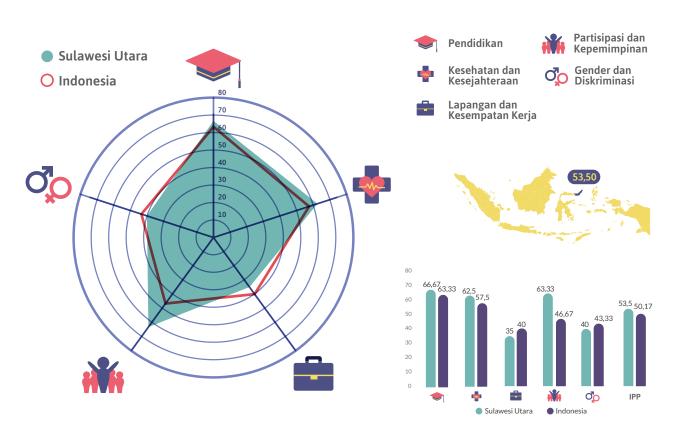
III.25 Provinsi Sulawesi Utara

Dalam IPP Sulawesi Utara tergolong naik cepat. Tidak mengherankan jika provinsi ini berada di barisan terdepan perubahan IPP terbesar bersama-sama dengan Sumatera Selatan. Sulawesi Utara saat ini mencatat IPP hampir 54 poin, naik lebih dari delapan poin dibandingkan dengan IPP tahun lalu. Kenaikan terjadi hampir di semua domain, kendati tidak selalu diikuti oleh indikator pendukungnya. Kenaikan terbesar berasal dari domain lapangang dan kesempatan kerja, dengan lompatan indeks 20 poin, yakni dari 15 ke 35 poin. Hal ini merujuk pada perubahan sub-indeks pemuda wirausaha yang naik dari satu menjadi tiga poin, serta

perbaikan indeks pengangguran dari dua menjadi empat poin.

Di antara domain dan indikator yang meningkat, domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain gender dan diskriminasi juga memperlihatkan kinerja yang baik. Secara khusus, di dalam domain kesehatan dan kesejahteraan, sub-indeks kehamilan remaja memperlihatkan kemajuan amat penting, yakni dari lima menjadi delapan poin. Hal ini merefleksikan penurunan indikator kehamilan remaja dari 25 persen menjadi 11 persen. Bersamaan dengan itu, sub-indeks perkawinan usia anak dalam domain gender dan diskriminasi juga membaik, yakni dari tiga poin ke lima poin sejajar dengan penurunan indikator ini dari 32 persen menjadi 25 persen.

Gambar 3.25 Kinerja Pembangunan Pemuda Sulawesi Utara 2016

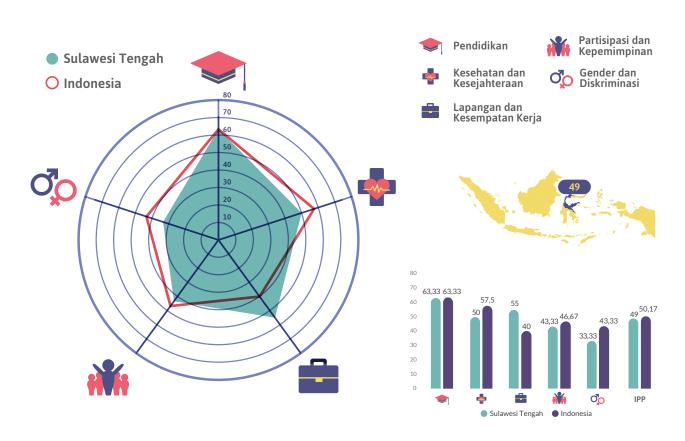


III.26 Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah berada di kelompok tengah IPP dengan indeks 49 poin tahun 2015. Masih di bawah indeks nasional, IPP ini meningkat dari IPP tahun sebelumnya yang hampir 45 poin. Ada pergerakan penting di provinsi ini dalam pembangunan pemuda. Dalam 2015-2016 indeks domain lapangan dan kesempatan kerja berubah positif 10 poin. Perubahan ini sejalan dengan peningkatan sub-indeks pemuda wirausaha dari dua ke tiga poin dan perbaikan subindeks pengangguran dari tujuh menjadi delapan poin. Perubahan positif berikutnya ditemukan dalam domain kesehatan dan kesejahteraan. Kecuali pemuda merokok, seluruh indikator mengalami kenaikan. Subindeks kesakitan pemuda membaik satu poin, pemuda merokok juga membaik satu poin, sedangkan kehamilan remaja naik dengan dua poin sepanjang tahun 2015-2016. Domain gender dan diskriminasi berada dalam kecenderungan yang sama. Di luar pemuda perempuan bersekolah menengah yang mengalami penurunan sub-indeks satu poin, sub-indeks perkawinan usia anak dan pemuda perempuan bekerja di sektor formal mengalami keadaan yang sebaliknya. Sub-indeks ini mengalami peningkatan satu poin.

Pada saat yang sama, stagnasi terlihat dalam domain pendidikan. Sebetulnya, dua indikator pendukung domain ini mengalami peningkatan. Namun demikian, besarannya tak cukup sensitif untuk mempengaruhi nilai sub-indeks. Kedua indikator itu adalah ratarata lama sekolah yang naik dari 9,7 ke 10, 3 tahun, serta partisipasi perguruan tinggi yang meningkat dari 26 persen untuk mendekati 30 persen. Kenaikan tipis ini tidak dapat mengangkat kedua sub-indeks, masingmasing dari poin tujuh dan poin tiga selama 2015-2016.

Gambar 3.26 Kinerja Pembangunan Pemuda Sulawesi Tengah 2016

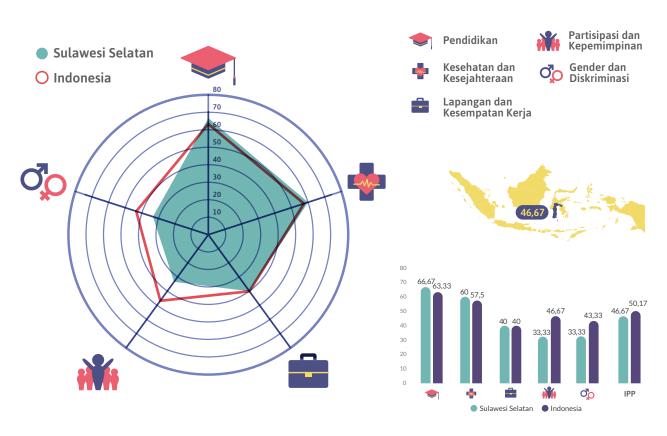


III.27 Provinsi Sulawesi Selatan

Hanya meningkat setengah poin Sulawesi Selatan tergolong dalam kelompok 'Lima Terbawah' pembangunan pemuda pada 2016. Keadaan ini menunjukkan, relatif terhadap di provinsi-provinsi lainnya, pembangunan pemuda di provinsi ini kurang terakselerasi. Domain pendidikan serta gender dan diskriminasi tidak menunjukkan perubahan indeks. Sementara itu, domain kesehatan dan kesejahteraan justru menurun kinerjanya dalam 2015-2016. Dalam domain ini, indikator pemuda korban kejahatan dan kehamilan remaja memburuk. Nilai subindeks indikator yang pertama turun satu poin dari poin delapan ke poin tujuh, sebagaimana juga nilai sub-indeks indikator yang kedua, dari poin tujuh ke poin enam.

Dalam domain lapangan dan kesempatan kerja terjadi kenaikan indeks. Kendati salah satu indikatornya—pemuda wirausaha (white collar)—mengalami penurunan kineria, indikator lainnya—tingkat pengangguran justru membaik. Pemuda wirausaha turun cukup dalam, dari 0,35 persen ke 0,04 persen. Keadaan ini dapat dikompensasi oleh penurunan pengangguran dari 15 persen menjadi 11 persen. Resultan dua keadaan ini membentuk perubahan positif indeks domain lapangan dan kesempatan kerja dari 35 menjadi 40 poin. Sulawesi Selatan sepatutnya dapat jauh lebih baik daripada keseluruhan capaian ini, mengingat dalam Indeks Pembangunan Manusia provinsi ini justru lebih berkinerja.

Gambar 3.27 Kinerja Pembangunan Pemuda Sulawesi Selatan 2016

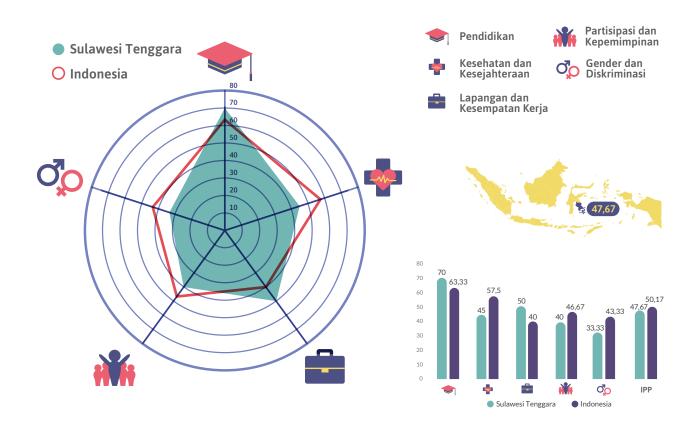


III.28 Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi ini berubah lambat dalam pembangunan pemuda. Dalam tahun 2015, IPP Sulawesi Tenggara sebesar 47, lalu naik sedikit setahun berikutnya menjadi 47,7. Perubahan indeks yang tak besar ini menempatkan Sulawesi Tenggara pada peringkat ke-27. Di seluruh Sulawesi, ini posisi terendah kedua setelah Sulawesi Selatan.

Penurunan kinerja amat terasa pada indikator kehamilan remaja. Tahun 2015 baru ada 15 persen kehamilan remaja—ini pun terbilang besar karena angka ini tak jauh dari angka nasional, 17 persen. Setahun kemudian, keadaannya memburuk, karena kehamilan remaja telah meningkat dua kali untuk mencapai 30 persen. Dalam keadaan ini, nilai sub-indeks turun dari tujuh poin menjadi empat poin. Dengan tiga indikator yang statis, indeks domain kesehatan dan kesejahteraan turun dalam, dari 55 poin menjadi 45 poin. Sulawesi Tenggara jelas perlu membangun agenda yang lebih komprehensif, untuk mengangkat profil provinsi ini dalam pembangunan pemuda.

Gambar 3.28 Kinerja Pembangunan Pemuda Sulawesi Tenggara 2016

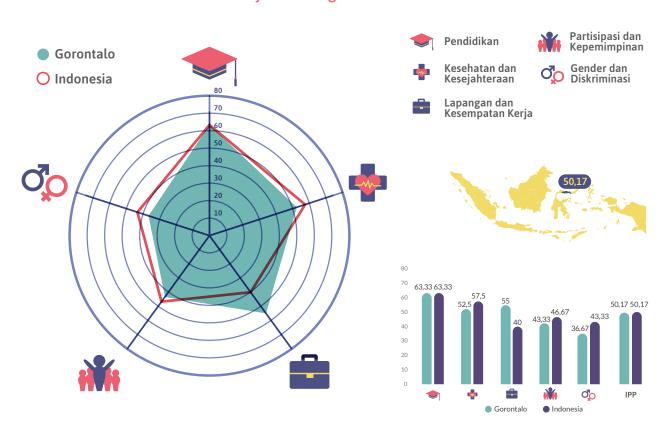


III.29 Provinsi Gorontalo

Kinerja pembangunan pemuda Gorontalo menyerupai kinerja nasional, setelah bertambah 3,7 poin IPP dari indeks 46,5. Sejumlah domain dan indikator-indikator penopangnya mengalami kemajuan. Memang, sub-indeks indikator partisipasi pemuda dalam organisasi adalah yang terendah, satu poin; tetapi ini adalah satusatunya indikator dengan nilai sub-indeks setingkat itu. Indikator-indikator lain paling sedikit mencatat nilai sub-indeks tiga poin; di antaranya ialah partisipasi pendidikan tinggi, pemuda merokok, pemuda wirausaha (white collar), pemuda memberikan saran dalam pertemuan, serta pemuda perempuan bersekolah menengah dan perguruan tinggi.

Meski demikian, Gorontalo juga mencatat penurunan dalam dua indikator di dua domain yang berbeda, yakni kesehatan dan kesejahteraan serta gender dan diskriminasi. Perhatian kebijakan perlu diarahkan pada dua indikator yang tak berkinerja dalam dua domain ini. Dalam kesehatan dan kesejahteraan, indikator kehamilan remaja meningkat dari sembilan persen menjadi 14 persen. Keadaan ini membuat nilai sub-indeks menyusut dua poin, dari sembilan menjadi tujuh poin. Perubahan negatif ini diikuti oleh penurunan kinerja pada perkawinan usia anak dalam domain gender dan diskriminasi. Indikator perkawinan usia anak meningkat dari 26 persen ke 28 persen, sehingga menurunkan nilai sub-indeksnya dari lima menjadi empat poin. Kendati penurunan kinerja indikator-indikator terjadi, ini tidak dapat mengurangi nilai indeks domaindomain induk masing-masing indikator, sebab pada saat yang sama indikator-indikator lain mengalami penguatan.

Gambar 3.29 Kinerja Pembangunan Pemuda Gorontalo 2016



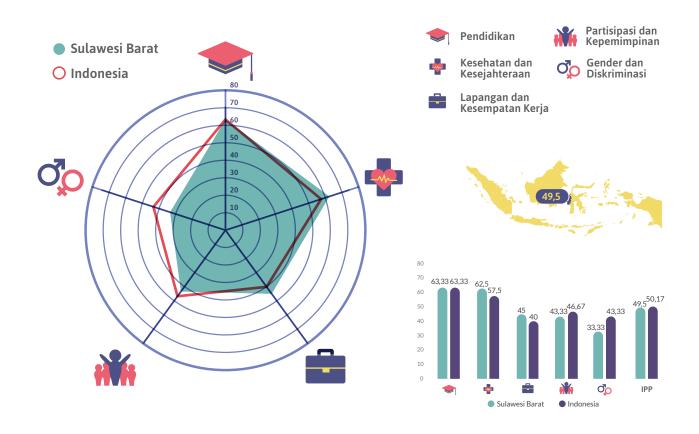
III.30 Provinsi Sulawesi Barat

IPP Sulawesi Barat berada dalam peringkat ke-21 di tahun 2016. Provinsi ini tercatat memiliki indeks mendekati 50 poin, naik 2,5 poindari indeks tahun sebelumnya. Ini capaian penting yang patut mendapat apresiasi. Selain itu, penting dicatat bahwa hanya satu indikator yang mengalami penurunan, sisanya tak berubah atau menaik. Dalam domain pendidikan pada 2016, nilai indeks domain ini sama dengan nilai indeks nasional, bahkan, pola kinerja IPP yang terbentuk di provinsi ini serupa dengan pola kinerja IPP nasional. Lebih jauh lagi, dalam dua domain lain—kesehatan dan kesejahteraan serta lapangan

dan kesempatan kerja—indeks Sulawesi Barat lima poin lebih unggul daripada indeks nasional.

Namun demikian, capaian ini belum membawa IPP Sulawesi Barat mampu secara keseluruhan berada di atas IPP nasional, karena masih ada selisih 0,7 poin. Penyebabnya berasal dari domain partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Sulawesi Barat tertinggal tiga sampai sepuluh poin dalam dua domain ini, biarpun sub-indeks perkawinan usia anak sudah mendorong naik dua poin dari tiga ke lima. Perlu kerja lebih keras dan lebih cermat lagi untuk membawa provinsi ini ke titik yang lebih maju dalam pembangunan pemuda.

Gambar 3.30 Kinerja Pembangunan Pemuda Sulawesi Barat 2016

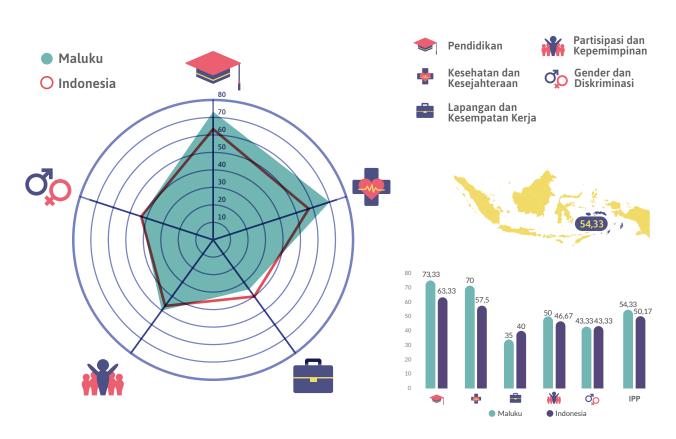


III.31 Provinsi Maluku

Maluku menunjukkan kinerja mengesankan. Dalam tahun 2016 provinsi ini menduduki peringkat ke-5 dalam 'lima teratas' IPP. Tanpa ada satupun indikator-indikator yang mengalami penurunan kinerja, Maluku memperbaiki IPP delapan poin dari tahun 2015, sehingga di tahun 2016 provinsi ini mencatat IPP hampir 55 poin. Lompatanlompatan kunci dibentuk oleh tiga domain, yakni kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, serta gender dan diskriminasi. Domain gender dan diskriminasi bergerak naik hampir tujuh poin dari 37 di tahun 2015. Domain kesehatan dan kesejahteraan meningkat lebih besar lagi, yakni 15 poin untuk menuju ke 70 di tahun 2016. Domain lapangan dan kesempatan kerja adalah domain yang mengalami peningkatan terbesar, yakni 20 poin dari indeks sebesar 15 di tahun 2015.

Dalam domain gender dan diskriminasi, pemuda perempuan bekerja di sektor formal naik dari 12 persen ke 19 persen. Ini sejajar dengan tingkat pengangguran yang menurun dari 24 persen ke 17 persen, serta diperkuat oleh peningkatan pemuda wirausaha (white collar) dari 0,1 ke 0,2 persen dalam domain lapangan dan kesempatan kerja. Di antara capaian ini, satu indikator yang mengalami impresif adalah perbaikan penurunan kehamilan remaja dalam domain kesehatan dan kesejahteraan. Indikator penurunan kehamilan remaja turun signifikan, dari 24 persen ke enam persen. Sub-indeks indikator ini meningkat pesat dari lima menjadi sembilan poin. Kinerja ini merupakan salah satu capaian terpenting. Lompatan 18 peringkat provinsi ini dalam setahun patut dipelajari dan dibagi kepada pemangku kepentingan yang luas.

Gambar 3.31 Kinerja Pembangunan Pemuda Maluku 2016



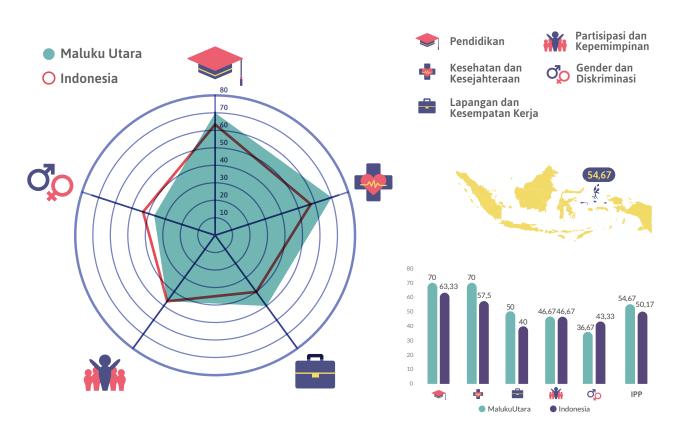
III.32 Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara mengimbangi provinsi Maluku dalam menunjukkan kinerja pembangunan pemuda. Provinsi ini bahkan berada satu tingkat di atas Maluku dalam 'lima teratas' provinsi dengan IPP tertinggi. Meningkat lima poin dari IPP di tahun 2015 menjadisekitar 50, Maluku Utara memperbaiki posisi lima peringkat di tahun 2016. Lapangan dan kesempatan kerja adalah domain yang menunjukkan perubahan besar IPP, yakni 20 poin. Sementara itu, domain pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan membuat perubahan IPP berturut-turut sebesar tujuh dan tiga poin.

Perbaikan kinerja domain lapangan dan kesempatan kerja ditopang oleh perubahan

positif dua sub-indeksnya, masing-masing dengan dua poin. Hal ini merujuk pada peningkatan indikator pemuda wirausaha (white collar) dari 0,2 persen menjadi persen, serta penurunan tingkat pengangguran dari 15 persen ke 11 persen; juga sejajar dengan peningkatan pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dalam domain gender dan diskriminasi. Secara keseluruhan, ekonomi agregat Maluku Utara tengah bertumbuh sekitar enam persen, dengan investasi yang bertumbuh di atas delapan persen pada periode itu (malut.bps.go.id). Meski demikian, Maluku Utara perlu memberi perhatian tersendiri pada perkawinan usia anak, karena ada peningkatan indikator ini dari 20 persen ke 23 persen, sementara kehamilan remaja telah turun tajam dari 11 persen ke empat persen.

Gambar 3.32 Kinerja Pembangunan Pemuda Maluku Utara 2016

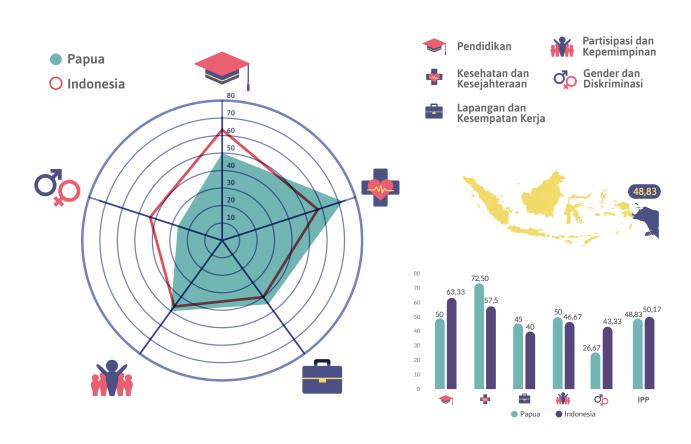


III.33 Provinsi Papua

Papua cenderung lambat bergerak dalam pembangunan pemuda. Perubahan IPP selama 2015-2016 hanya 1,5 poin dari indeks sekitar 47. Perubahan lambat ini menempatkan IPP Papua di bawah IPP nasional dan menduduki peringkat ke-24. Domain-domain pembangunan pemuda cenderung statis. Hanya kesehatan dan kesejahteraan yang meningkat lima poin menjadi 72,5. Keadaan ini ditopang oleh perubahan dalam tiga indikator pendukungnya, yakni penurunan kejahatan, pemuda korban penurunan pemuda merokok, dan perbaikan dalam kehamilan remaja. Sementara itu, domain pendidikan tidak berubah—tetap pada indeks 50 poin—karena peningkatan dalam ratarata lama sekolah dikoreksi oleh penurunan partisipasi sekolah menengah.

Papua patut memberi perhatian pada dua indikator yang kurang berkinerja. Pertama, pemuda wirausaha (white collar) dalam domain lapangan dan kesempatan kerja. Nilai sub-indeks indikator ini tercatat paling kecil, satu poin; dan nilai ini tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal ini, pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal juga membutuhkan kebijakan khusus. Penyebabnya serupa, yaitu sub-indeksnya juga terhitung paling rendah. Perubahanperubahan dalam indikator ini masih terhitung tipis. Kenaikan pemuda wirausaha (white collar) dari 0,04 ke 0,1 persen atau pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dari 27 ke 28 persen tidak mampu mengangkat nilai-nilai sub-indeksnya keluar dari tingkat terendah.

Gambar 3.33 Kinerja Pembangunan Pemuda Papua 2016



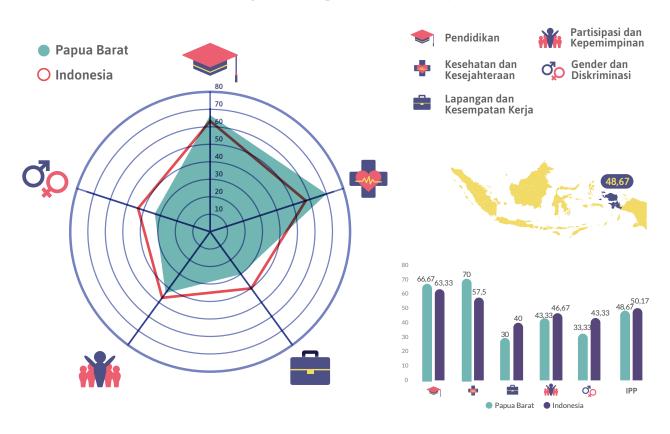
III.34 Provinsi Papua Barat

Papua Barat sedikit di bawah Papua dalam pembangunan pemuda. Secara agregat, IPP Papua Barat lebih kecil 0,2 poin daripada IPP Papua pada tahun 2016, walaupun dalam 2015-2016 Papua Barat naik lebih cepat dengan 2,2 poin. Di antara 15 indikator yang ada, tiga di antaranya patut mendapat perubahan apresiasi, karena positif yang dibuatnya. Pertama, dalam domain pendidikan, partisipasi sekolah menengah sudah melampaui angka 90 persen. Ini membuat sub-indeks indikator ini menuju nilai tertinggi, 10 poin. Kedua, dua indikator dalam kesehatan dan kesejahteraan juga membaik dalam kinerja. Kesakitan pemuda turun dari enam ke lima persen, sehingga nilai sub-indeksnya meningkat dari tujuh poin ke delapan poin. Capaian-capaian ini diikuti pula oleh penurunan pemuda korban

kejahatan dari 1,2 persen menjadi 0,8 persen, untuk diikuti oleh perubahan positif subindeks dari tujuh menjadi delapan poin.

Meski demikian, perhatian perlu diberikan pada pemuda wirausaha (white collar). Indikator ini mengalami penurunan cukup sehingga sub-indeksnya dalam, juga mengecil dari dua menjadi satu poin. Sementara itu, dalam domain yang samalapangan dan kesempatan kerja—sub-indeks tingkat pengangguran tidak menunjukkan perubahan. Perhatian lain perlu ditujukan pada perkawinan usia anak yang meningkat dari 28 persen di tahun 2015 menjadi 32 persen setahun berikutnya. Angka ini terhitung tinggi, karena itu berarti satu dari tiga anak perempuan di Papua Barat sudah menikah. Kebijakan khusus perlu dibuat agar indikator ini dapat mengimbangi perbaikan kinerja dalam kehamilan remaja, yang menurun dari 17 persen menjadi 10 persen.

Gambar 3.34 Kinerja Pembangunan Pemuda Papua Barat 2016



Akhirnya, dalam variasi capaian pembangunan pemuda di 34 provinsi ini, beberapa hal perlu dicatat. Pertama, penting bagi otoritas dan pemangku kepentingan daerah untuk menarik pelajaran dan pengalaman dari provinsi-provinsi yang berkinerja mengesankan. Langkah ini adalah jalan taktis, tetapi memiliki implikasi strategis. Provinsi-provinsi yang tertinggal dapat melakukan adopsi, adaptasi, dan implementasi pengalaman dan pelajaran

dari provinsi-provinsi yang berkinerja mengesankan dengan lebih cepat. Kedua, penting pula bagi otoritas dan pemangku kepentingan daerah melakukan evaluasi dan refleksi pada indikator-indikator yang tidak berkinerja, baik karena tingkat capaian yang rendah maupun perubahan yang kurang progresif. Penyebab-penyebab pokok perlu ditelusuri agar kemudian target-target baru dan cara-cara yang lebih inovatif dapat ditetapkan.



IV. PENUTUP: KERANGKA KERJA BAGI AGENDA PEMBANGUNAN PEMUDA





aporan ini dibuka dengan suatu cara pandang bahwa pemuda adalah masa depan bangsa; dan investasi dalam pembangunan pemuda adalah investasi yang amat berharga bagi bangsa. IPP berada dalam laras cara pandang ini. Indeks ini dapat menjadi alat pemandu investasi itu, karena IPP dapat mengarahkan sekaligus menunjukkan ke dan pada bagian mana pembangunan pemuda perlu digerakkan, ditingkatkan, dan diakselerasi. Pembangunan nasional sendiri telah dirumuskan dengan menetapkan pembangunan pemuda menjadi bagian integralnya. Ini artinya, pembangunan nasional telah memiliki agenda-agenda pembangunan pemuda yang terdefinisi.

Laporan ini menawarkan sumbangan pada pembentukan kerangka kerja bagi agendaagenda pembangunan yang telah ada itu. Merujuk pada presentasi dan diskusi yang telah disajikan dalam bab-bab terdahulu, kerangka kerja itu terbagi dalam tiga bagian. Pertama, bagian tentang penguatan dan akselerasi pembangunan pemuda. Kedua, bagian tentang penyempurnaan IPP dan metodologinya. Ketiga, bagian tentang riset kebijakan yang terkait. Dalam karakteristiknya, bagian-bagian ini saling bertaut, karena bagian yang satu dapat menjadi masukan untuk bagian yang lain. Dengan demikian, bagian manapun yang diinisiasi—jika tidak dapat dijalankan secara simultan—tetap dapat memberi kontribusi pada keseluruhan pembangunan pemuda.

IV.1 Penguatan dan Percepatan Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda berada dalam rumah besar pembangunan nasional. Melalui domain yang dicakupnya, IPP memusatkan perhatian pada pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Dalam perspektif pembangunan nasional, domain ini menjadi bagian dari sektor-sektor yang memang digerakkan oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Pemerintah, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan daerah, jelas menjadi bagian penting, karena pada saat yang bersamaan, IPP menyajikan pula satu gugus informasi yang terpilah menurut provinsi.

Merujuk pada data yang telah disajikan dalam IPP, pembangunan pemuda dapat dibawa ke arah empat ranah. Kombinasi keempatnya amat mungkin dilakukan untuk memperkuat dan mempercepat upaya-upaya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan pemuda. Pertama, ranah yang menjawab domain dan indikator IPP yang tertinggal, stagnan, dan menurun. Ranah ini sudah disajikan dengan lengkap dalam laporan ini, baik secara sektoral maupun regional. Setiap pemangku kepentingan dapat memeriksa kembali capaian-capaian yang telah terjadi, menelusuri faktor-faktor penyebabnya, dan menetapkan target-target baru.

Kedua, ranah yang menjalankan domain dan indikator yang beririsan dengan agenda pembangunan nasional dan daerah yang telah ada, seperti Rencana Aksi Nasional dan Daerah Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dinyatakan dalam Perpres 66/2017. Dalam hubungan ini adalah penting juga untuk mengintegrasikan ini semua dengan agenda besar RPJMN dan RPJMD dalam wujud rencana strategis kementerian/lembaga (renstra K/L) dan organisasi perangkat daerah (renstra OPD).

Ketiga, ranah yang merespon domain dan indikator IPP yang bersentuhan langsung dengan agenda global, utamanya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ada pula agenda-agenda sektoral dan regional, termasuk kesepakatan-kesepakatan bilateral dan multilateral. Sama seperti pada ranah kedua, adalah penting juga untuk mengintegrasikan ini semua dengan agenda besar RPJMN dan RPJMD sebagaimana diterjemahkan ke dalam rencana strategis kementerian/lembaga (renstra K/L) dan organisasi perangkat daerah (renstra OPD).

Ranah keempat ialah ranah yang memberi perhatian pada domain dan indikator dengan sasaran-sasaran khusus. Ilustrasi untuk sasaran-sasaran khusus, misalnya, kelompok pemuda termarjinalisasi dalam beragam aspek—perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama, migran, pengungsi, kaum miskin, masyarakat adat, dan lain-lain. Termasuk juga dalam hal ini adalah kelompok pemuda korban kekerasan, korban penyelundupan dan perdagangan manusia, korban stigmatisasi atas orientasi nilai tertentu, dan lain-lain korban yang menimbulkan kerentanan secara individual dan sosial.

IV.2 Penyempurnaan IPP

Penyusunan IPP saat ini adalah inisiatif pertama yang memotret perkembangan pemuda dalam bentuk indeks dalam suatu prosedur metodologi tertentu. Ke depan prosedur metodologi ini layak dibakukan sebagai sebuah standar proses penyusunan IPP. Hal ini karena bukan tidak mungkin IPP yang semula dijalankan dari tingkat nasional dengan provinsi sebagai unit analisisnya dijadikan inisiatif ke tingkat provinsi dengan

kabupaten/kota—bahkan kecamatan—sebagai unit analisisnya.

Prosedur metodologi itu sendiri di dalamnya terkandung tiga proses, yakni proses akademis, teknokratis, dan proses sosial untuk mendapatkan nilai legitimasinya. Proses akademis adalah usaha untuk membangun suatu landasan ilmiah bagi IPP dengan memadukan dan meramu konsep-konsep teoritis, pengalaman-pengalaman terdahulu di beragam tempat, dan kenyataan-kenyataan empiris di Indonesia. Rinciannya terdiri dari hal-hal teknis pendefinisian, pengukuran, formula, penghitungan, penetapan pengolahan, dan pemaknaan data (lihat Lampiran Laporan ini).

Dalam proses ini, data menjadi jantungnya. Ketersediaan data akan selalu menjadi isu penting yang dihadapkan pada kebutuhan domain dan indikator yang mewakili konsep teoritis pembangunan pemuda. Sampai sejauh ini, ketiadaan data diatasi dengan dua hal, yakni menggunakan data dari tahun yang terdekat dan menggunakan variabel proksi. Hal yang pertama terjadi pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang mau tak mau menggunakan data yang sama untuk digunakan pada dua tahun yang berbeda. Hal yang kedua terjadi pada indikator kehamilan untuk menggantikan indikator fertilitas remaja. Ke depan, data yang tepat akan semakin mendekatkan konsep IPP dengan fakta penjelasnya. Pada saat yang sama, domain dan indikator yang ada masih terbuka untuk terus disempurnakan.

Proses teknokratis memandang penetapan domain dan indikator dari perspektif kepentingan pembangunan dan target-target capaiannya. Proses ini mendekatkan IPP ke arah kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Ini untuk menegaskan bahwa IPP bukanlah semata sebuah laboratory exercise yang terisoloasi dari lingkungan pembangunan yang menaunginya. Bagaimanapun, batu uji IPP akan terletak pada daya guna indeks ini bagi para pelaku pembangunan dan proses pembangunan itu sendiri.

Pada saat yang sama, ke depan penting pula IPP ditautkan dengan tema-tema pembangunan tertentu yang dianggap relevan dalam konteks ruang dan waktu yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi, pemuda dalam Revolusi Industri (RI) 4.0 adalah tema yang penting untuk dijelajahi lebih jauh mengingat saat ini pemerintah juga telah mulai memberi perhatian pada revolusi industri ini. Sebagaimana diketahui, RI 4.0 ini sendiri telah dan akan menjadi bagian dari kehidupan pemuda yang terintegrasi amat kuat. Salah satu dimensi RI 4.0 adalah the internet of things, suatu jaringan pengumpulan dan pertukaran informasi serta pengambilan keputusan berbasis data. Dunia pendidikan, kesehatan, pasar kerja, bahkan juga politik dan agama, tidak dapat melepas diri dari jaringan ini, sementara pemuda juga justru telah berada dalam dunia ini. Ilustrasi lain, misalnya, adalah tema pembangunan berkelanjutan, green economic growth, green development practices, atau sejenisnya yang dikaitkan dengan peran pemuda. Masa depan planet bumi amat ditentukan oleh bagaimana warga bumi saat ini mengambil keputusan dan bertindak bagi keberlanjutan ekosistem bumi. Sementara itu, sebagaimana beberapa kali ditegaskan, masa depan adalah milik pemuda. Oleh sebab itu, melibatkan pemuda pada isu-isu keberlanjutan bukan hanya penting, tetapi juga strategis bagi masa depan. Jelas terlihat, tema-tema ini memiliki relevansi kuat dengan kehidupan pemuda. Penetapan tema ini adalah upaya untuk memperluas area diskusi IPP untuk mempercakapkan wacana di luar data dan metodologi penyusunannya.

Sementara itu, proses legitimasi sosial adalah upaya untuk melibatkan pemangku kepentingan luas—termasuk yang pemuda sendiri—dan mempertimbangkan pandangan-pandangan para pemangku ini dalam penyusunan IPP. Proses ini menghargai pelaku-pelaku pembangunan selain pemerintah yang juga memahami dan memikirkan serta mengalami dan menjalani proses pembangunan pemudajuga mempertukarkan itu semua satu sama lain. Dalam hal terakhir itu, penting dicatat, semakin banyak medium pertukaran pengalaman dan pengalaman pemangku kepentingan dibentuk, semakin tinggi intensitas interaksi antara kebijakan pembangunan dengan para pemangkunya. Hal ini berarti kebijakan dan pemangkunya berada di rel pembangunan dengan arah pandang yang sejalan. Bagi kepentingan ke depan, suatu 'daftar minimum pemangku kepentingan yang patut dilibatkan' dapat dijadikan sebagai bagian penting dari prosedur metodologi IPP.

IV.3 Penelitian Berbasis IPP

IPP telah membuka dan memperlebar wacana kebijakan dan penelitian. Wacana ini perlu terus diisi oleh beragam pemikiran, pengetahuan, dan pengalaman tentang pemuda dan pembangunan pemuda, serta relasinya dengan variabel yang lebih luas di dalam dan luar dunia kepemudaan. IPP semakin terasa fungsinya bila indeks ini berinteraksi dengan variabel-variabel lain.

Ada hal penting diperhatikan sehubungan dengan hal itu. Pertama, dari sisi teknis, alternatif-alternatif metode penghitungan baru perlu dipikirkan dan dikembangkan. Data dalam jenis dan jumlah juga amat mungkin dikembangkan lebih jauh. Pada saat yang sama, bukan tidak mungkin pandangan-pandangan baru mengenai pemuda dan pembangunan pemuda akan memperbaiki atau merevisi pandangan-pandangan yang ada saat ini. Semuanya masih sangat terbuka untuk dijelajahi.

Kedua, dari sisi substansi, beragam topik riset masih amat luas untuk dieksplorasi. Jika IPP disusun bersama-sama dengan para pemangku kepentingan, maka—dalam perspektif yang sama—IPP juga patut berada bersama-sama didudukkan fungsinya dengan indeks-indeks pembangunan yang lain. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu contohnya. Indeks ini memiliki kepentingan yang serupa dengan IPP dalam pembangunan bangsa. Studi-studi yang mengulas lebih jauh relasi IPP dan IPM akan memberikan informasi amat berharga bagi pengambilan keputusan kebijakan. Senafas dengan hal itu, bagaimana domain partisipasi dan kepemimpinan—atau bahkan secara keseluruahan—berkorelasi dengan demokrasi melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah ilustrasi lain dalam pengembangan wacana kebijakan dan penelitian. Sebagai contoh, bagaimana peran kelompok usia (cohort) muda dalam menopang kinerja demokrasi Indonesia amat relevan diketahui, karena masa depan demokrasi juga berada di tangan pemuda.

Tentu saja tidak tertutup kemungkinan untuk menelaah IPP dalam hubungannya dengan variabel-variabel lainnya, seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. Apa dan bagaimana IPP berinteraksi dengan variabel-variabel ini akan menjadi informasi penting bagi proses pengambilan kebijakan pembangunan pemuda dan pembangunan pada umumnya. Daftar gagasan semacam ini masih amat panjang dan terbuka. Oleh sebab itu, wacana penelitian—terlebih lagi kebijakan—masih amat mungkin untuk terus didiskusikan.

* * *

Akhirnya, sebagaimana indeks atau data pada umumnya, IPP adalah sebuah alat pengukur perjalanan pembangunan pencapaian pemuda. Sejauh mana alat ini dapat berguna dan digunakan amat tergantung pada para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah dan non-pemerintah, termasuk juga pemuda. IPP sini sendiri dan laporan yang menyertainya saat ini telah menjalankan salah satu tugasnya, yakni menyediakan informasi mengenai wajah perkembangan pemuda Indonesia terkini. Selanjutnya, seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah perlu mendapatkan informasi mengenai laporan IPP ini sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan dan program yang lebih terarah dan pengembangan strategi pembangunan pemuda di daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Butt, I.H. and Mehmood, S.A.. 2010. Public and Policy Imperatives for Youth Bulge in Pakistan. Bargad Published. Supported by UNFPA.
- Canadian Council of Learning (CCL). 2010. The 2010 Composite Learning Index: Five Years of Measuring Canada's Progress in Lifelong Learning. CCL, Ottawa.
- JRC European Commission. 2008. Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide
- Lee, J., Lamb, V.L., Land, K.C.. 2009. Composite Indices of Changes in Child and Youth Well-Being in the San Francisco Bay Area and the State of California 1995-2005. North Carolina Central University, Durham.
- Strijov, V. and Shakin, V. (2003). *Index construction: the expert-statistical method*. Environmental research, engineering and management. Vol. 4 (26), Page 51-55.
- The Commonwealth. 2016. *Global Youth Development Index*. Diunduh pada 20 April 2018 dari http://youthdevelopmentindex.org.
- The European Youth Forum. (2001). 11 Indicators of a (National) Youth Policy. The European Youth Forum, Rumania.
- The Foundation for Child Development (FCD). (2012). National Child and Youth Well-Being Index (CWI). FCD.
- UNICEF. 2016. Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause. Diunduh pada 20 April 2018 dari https://www.unicef.org/indonesia/UNICEF_Indonesia_Child_Marriage_Reserach_Brief_. pdf
- United Nations. *Definition of Youth*. Diunduh pada 20 April 2018 dari http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf.

LAMPIRANI

PERBANDINGAN DOMAIN DAN INDIKATOR IPP INTERNASIONAL

Peninjauan kembali domain dan indikator yang digunakan oleh sejumlah organisasi/ asosiasi internasional dan negara-negara dalam pengembangan IPP ini telah dilakukan. Berbagai domain dan indikator yang digunakan oleh organisasi dan negara internasional menunjukkan beberapa variasi tergantung pada fokus perhatian dan yang ingin ditampilkan¹. Tabel lampiran I.1, I.2, dan I.3 merangkum domain dan indikator yang digunakan pada berbagai IPP tersebut. Lampiran tersebut terbagi dalam tiga kategori: negara-negara di Asia, Non-Asia dan organisasi atau asosiasi internasional.

Dalam meninjau domain dan indikator yang dipilih oleh sejumlah negara di Asia, terlihat bahwa aspek yang mendapat perhatian adalah yang berkaitan dengan identitas, pengembangan karakter dan perilaku, interaksi sosial dan partisipasi. Domain pengembangan seperti hubungan sosial, identitas, potensi diri, dan perilaku menyimpang adalah beberapa domain penting, selain domain kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan². Untuk negaranegara non-Asia, domain dan indikator seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan ketenagakerjaan adalah domain yang dominan selain domain keselamatan dan kesejahteraan emosional, serta domain partisipasi. Domain kesejahteraan emosional dan perilaku mencakup, antara lain, perilaku bunuh diri, kekerasan dan perilaku yang aman. Bagi organisasi internasional, domain yang dominan adalah pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, dan partisipasi. Aspek seperti perilaku, emosional, hubungan sosial, dan kesejahteraan spiritual muncul dalam laporan penelitian tentang kesejahteraan anak dan remaja.

Tabel Lampiran I.1 Domain dan Indikator IPP di Asia

No	Negara	Domain IPP	Indikator	Rujukan
1	India (Versi 1)	Pengembangan diri	Harga diri, efisiensi diri, motivasi, emosi, asertif, stres, depresi dan kreativitas	Times Center for Youth Development and Research, SNDT Women's University
		Hubungan sosial	Hubungan interpersonal dengan orang tua, teman, saudara, rekan kerja, tetangga, dan lain lain	(nd)
		Identitas	Daya saing, kesukarelawanan, patriotisme, persatuan, keterlibatan politik	
		Kesehatan	Tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, gangguan jantung, gangguan ginjal, asma, HIV/AIDS, obesitas, dan anoreksia	
		Potensi diri	Kepemimpinan, kewirausahaan, keahlian, penemuan masalah, manajemen krisis	
		Penetrasi media	Televisi, radio, koran, majalah, buku, telepon genggam, komputer dan internet, CD, kamera, visual dan pertunjukan seni	
		Waktu luang	Olahraga, latihan, perkumpulan/klub pemuda, perpustakaan, musik, melukis	
		Perilaku berisiko	Merokok, konsumsi alkohol, narkoba, berjudi, membaca konten yang tidak sesuai umur, seks sebelum menikah, berkeliaran, vandalisme terhadap kejahatan cyber/ kerusakan properti umum/ kata-kata negatif di grafitti	

No	Negara	Domain IPP	Indikator	Rujukan
2	India (Versi 2)	Kesehatan	Persentase persalinan yang dibantu/ di instansi persalinan, harapan hidup pada umur 15, presentase pemuda yang tidak anemia, indeks massa tubuh	
		Pendidikan	Angka partisipasi kasar; jenjang pendidikan yang telah dicapai	
		Pekerjaan	Tingkat partisipasi kerja, hari kerja yang tersedia setiap tahun setiap pemuda	
		Fasilitas	Akses terhadap air bersih, tipe rumah, akses terhadap listrik, informasi, komunikasi dan teknologi	
		Partisipasi	Persentase pemuda berusia 18 tahun ke atas yang telah terdaftar sebagai pemilih, presentase dari pemuda yang terpilih dalam pemilihan terakhir di antara mereka yang terdaftar sebagai pemilih	
3	Pakistan	Memastikan penurunan fertilitas	Angka fertilitas total	Butt and Mehmood (2010)
		Pendidikan dan Pembangunan Pemuda	Pencapaian pendidikan, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan tinggi	
		Pembangunan angkatan kerja pemuda	Proporsi pemuda sebagai pegawai, bekerja sendiri, pembantu keluarga yang tidak dibayar	
		Partisipasi dan keterlibatan pemuda	Partisipasi pemuda di partai politik, partisipasi pemuda dalam organisasi kemahasiswaan, partisipasi pemuda di masyarakat / masyarakat	

No	Negara	Domain IPP	Indikator	Rujukan
		yaitu: (1) memper mempromosikan menghasilkan per (4) menangani ma rentan; (5) mendu olahraga dan rekr (8) kesehatan pen pemuda berbakat keterampilan hidi	lima belas prinsip kebijakan pekuat rasa bangga, kesadaran da integrasi nasional; (3) menduku ndapatan bagi pemuda, meman asalah kelompok pemuda yang kung pengembangan karakter; reasi; (7) pengembangan akade nuda; (9) kesukarelawanan sosia dan berkinerja tinggi; (11) perk up dan keluarga; (12) mentoring retarakan ketidaksetaraan gend	an motivasi; (2) ng prospek untuk nfaatkan bonus pemuda; terpinggirkan dan (6) mempromosikan mik dan intelektual; al; (10) insentif bagi kawinan remaja, g remaja; (13) pemuda
4	Malaysia	Pengembangan diri	Harga diri, efikasi diri, motivasi, inteligensi emosional, asertif, tanpa depresi, tanpa stres, integritas, agama	IPP Malaysia (2015)
		Potensi diri	Kepemimpinan, kewirausahaan, kreatif, kepekaan, kesadaran lingkungan	
		Waktu luang	Olahraga, klub dan asosiasi, aktivitas di waktu senggang	
		Perilaku menyimpang	Tidak minum, tidak berjudi, tidak terlibat dalam balapan ilegal, tidak ada vandalisme di fasilitas umum, tidak ada aktivitas seksual pranikah, tidak minum obat terlarang, tidak terlibat dalam hal-hal ilegal, tidak terlibat dalam membawa senjata, tidak terlibat dalam pencurian, tidak terlibat dalam pencurian, tidak terlibat dalam geng, tidak terlibat dalam geng, tidak terlibat dalam kejahatan cyber	

No	Negara	Domain IPP	Indikator	Rujukan
		Hubungan sosial	Hubungan dengan orang tua/ keluarga, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan pasangan	
		Identitas	Daya saing, identitas, patriotisme, kesatuan, integritas	
		Kesehatan	Tidak ada tekanan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada depresi, tidak ada kecenderungan bunuh diri, persepsi berat badan, tidak merokok, pola makan seimbang	
		Pendidikan	Prestasi, kurikuler, kokurikuler	
		Kesejahtera-an ekonomi	Keamanan keuangan, bebas hutang, melek keuangan, gaji, kemampuan kerja	
		Keamanan	Keamanan pribadi dan sekitarnya, keamanan internet	
		Partisipasi politik	Mengikuti perkembangan politik, membahas politik	
		Penetrasi media	Penetrasi media	

Tabel Lampiran I.2 Domain dan Indikator IPP di Luar Asia

No	Negara	Domain IPP	Indikator	Rujukan
1	Brazil	Pendidikan	Persentase pemuda yang buta huruf, persentase pemuda yang sekolah, persentase sekolah yang memadai, kualitas pendidikan	Jacobo, Unesco Brazil Office (nd)
		Kesehatan	Kematian dari penyebab- penyebab internal, kekerasan dan kehamilan di usia 11-19 tahun	
		Pendapatan	Pendapatan keluarga per kapita, kegiatan pemuda, pekerjaan rumah	
2	San Fransisco Bay Area and State of	Kesejahteraan Ekonomi Keluarga	Anak yang hidup dalam kemiskinan, rumah tangga yang mampu membeli rumah dengan harga rata-rata	Lee, Lamb and Land (2009)
	California, USA	Kesehatan	Angka kematian bayi, bayi berat lahir rendah, angka kematian anak/remaja, angka rawat inap akibat cedera, angka rawat inap akibat asma, perempuan yang mendapatkan perawatan antenatal trimester pertama	
		Keamanan/ Perhatian terhadap perilaku	Angka kelahiran remaja, angka penangkapan kejahatan anak-anak, angka penangkapan kejahatan anak-anak akibat alkohol dan obat terlarang	
		Pendidikan	Lulusan SMA yang menyelesaikan kursus persiapan kuliah, angka putus sekolah menengah atas, anak-anak dengan akses ke perawatan anak	
		Kesejahteraan emosional	Angka bunuh diri pada remaja, angka rawat inap akibat mencederai diri	

No	Negara	Domain IPP	Indikator	Rujukan
3	Canada - Composite Learning Index (CLI)	Belajar untuk tahu	Keterampilan membaca pada pemuda, tingkat putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah, partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi (PSE), pencapaian universitas, akses ke institusi belajar	Canadian Council of Learning - CCL (2010)
		Belajar untuk melakukan	Partisipasi dalam pelatihan terkait pekerjaan, partisipasi dalam pelatihan kerja terkait dari waktu ke waktu, tersedianya pelatihan di tempat kerja, akses ke pelatihan kejuruan	
		Belajar untuk hidup bersama	Kesukarelawanan, partisipasi dalam klub sosial dan organisasi lainnya, belajar dari kebudayaan lain, akses terhadap institusi komunitas	
		Belajar untuk menjadi	Paparan terhadap media, pembelajaran melalui olahraga, pembelajaran melalui kebudayaan, akses internet <i>broadband</i> , akses terhadap sumber daya budaya	
4	IPP Australia	Pendidikan	Tingkat pendidikan tertinggi, tidak mengikuti uji melek huruf, pencapaian melek huruf, tidak mengikuti uji berhitung, prestasi dalam berhitung.	IPP Australia (2016)
		Kesehatan dan kesejahteraan	Kekerasan, infeksi klamidia, pengaruh obat terlarang terakhir, tingkat bunuh diri	

No	Negara	Domain IPP	Indikator	Rujukan
		Ketenagakerja- an dan kesem- patan	NEET, rasio pengangguran pemuda	
		Partisipasi masyarakat	Acara budaya, kesukarelawan	
		Partisipasi politik	Organisasi politik, berpartisipasi sebagai penduduk Australia	
5	Barbados	Pendidikan	Lulus/ berpartisipasi dalam jenjang pendidikan tersier, penangguhan ujian masuk sekolah menengah, BSSE, program kesempatan kedua	
		Kesehatan dan Kesejahteraan	Kematian karena kekerasan, korban kekerasan, obesitas, HIV/IMS, percobaan bunuh diri, kesehatan mental, pemanfaatan layanan kesehatan gigi gratis bagi siswa	
		Ketenagaker- jaan	NEET, pengangguran berdasarkan kualifikasi, pemuda pelaku kekerasan, permohonan/persetujuan untuk perumahan dari pemerintah, kewirausahaan, tingkat fertilitas remaja	
		Partisipasi Politik	Proporsi pemilih, anggota partai politik, parlemen muda	
		Partisipasi Masyarakat	Kelompok olahraga, bimbingan bimbingan mentoring program, pertanyaan budaya survei pemuda, NIFCA	

0	A	

No	Negara	Domain IPP	Indikator	Rujukan
6	Fiji	Kesehatan	Tingkat prevalensi HIV/ AIDS, angka kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19, obesitas, konsumsi rokok, sumber air minum, akses fasilitas sanitasi	
		Pendidikan	Tingkat melek huruf, persentase PDB untuk pendidikan, angka penerimaan sekolah menengah atas, harapan hidup sekolah (primer sampai tersier)	
		Ketenagaker- jaan	Tingkat pertumbuhan ekonomi, status pekerjaan	
		Pendidikan Masyarakat	Survei IRSA Nat, Survei TIF Nat	
		Partisipasi Politik	Survei TIF, Penilaian BRIDGE	

Tabel Lampiran I.3 Domain dan Indikator IPP Organisasi Internasional

No	Negara	Domain IPP	Indikator	Rujukan
1	Global	Pendidikan	Pendaftaran pada pendidikan sekunder, angka melek huruf, familiar dengan digital	The Common- wealth (2016)
		Kesehatan dan Kesejahteraan	Kematian pemuda, gangguan jiwa, penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan obat, tingkat HIV, indeks kesejahteraan global	
		Ketenagakerja- an dan Kesempatan	NEET/ tidak dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan, rasio pemuda yang tidak bekerja, tingkat fertilitas remaja, rekening di lembaga keuangan	
		Partisipasi Politik	Adanya kebijakan pemuda, bendidikan pemilih, jajak pendapat resmi	
		Partisipasi Masyarakat	Waktu kegiatan kesukarelawanan, membantu orang asing	
2	Negara- negara Common-	Pendidikan	Rata-rata lama sekolah, pendidikan sebagai persen dari PDB, melek huruf pemuda	The Common- wealth (2013)
	wealth	Kesehatan dan Kesejahteraan	Angka kematian pemuda, penggunaan ganja, angka kehamilan remaja, prevalensi HIV, penggunaan tembakau	
		Ketenagakerja- an	Pemuda usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, rasio pemuda dengan pemuda bekerja berusia 15-24 tahun	
		Partisipasi Politik	Kebijakan dan representasi pemuda, pendidikan bagi pemilih, kemampuan pemuda untuk mengekspresikan pandangan politik	
		Partisipasi Masyarakat	Relawan muda, pemuda yang membantu orang asing	

No	Negara	Domain IPP	Indikator	Rujukan
3	Perserikatan Bangsa- Bangsa (United Nations)	Kesehatan	Persen penduduk usia 15-24 dengan pengetahuan HIV/ AIDS yang komprehensif dan tepat, akses kepada air minum bersih	UN (nd)
		Pengetahuan	Angka melek huruf usia 15- 24 tahun, rasio perempuan melek huruf terhadap laki-laki usia 15-24, tingkat kelulusan pendidikan menengah.	
		Standar Hidup yang layak	Angka pengangguran pada usia 15-24, penduduk usia 15- 24 tahun yang hidup kurang dari US \$ 1 per hari	
		Partisipasi	Pemungutan suara secara nasional, keberadaan dewan pemuda nasional	
4	Eropa – negara tidak spesifik	Domain/ aspek yang tidak didefinisikan secara spesifik	Pendidikan non-formal, kebijakan pelatihan pemuda, legislasi pemuda anggaran pemuda, kebijakan informasi pemuda, kebijakan multi level, penelitian pemuda, partisipasi (pemuda) (dalam masyarakat), kerjasama antar kementerian, inovasi (kreativitas dan inovasi pemuda), badan penasehat pemuda	European Youth Forum (2001)

LAMPIRAN II

Proses Perhitungan IPP

Metodologi untuk mengembangkan dan mengisi IPP Indonesia telah didesain supaya sejalan dengan indikator penting di tingkat global, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menggunakan data dengan kualitas terbaik yang tersedia saat ini. Namun, tantangan utama untuk mengembangkan sebuah IPP yang terpadu adalah terbatasnya ketersediaan beragam data yang konsisten dan komprehensif di seluruh provinsi serta keterpilahan berdasarkan gender. Keberagaman provinsi yang signifikan terlihat pada kondisi lahan, penduduk, tingkat pembangunan ekonomi, dan lokasi daerah. Kesulitan data yang perlu segera ditangani adalah dalam hal domain informasi dan teknologi dimana data demografi terbaik telah dipilih. Hasil utama dari proses ini adalah sebuah kumpulan ringkasan dari data yang tersedia dan juga data yang saat ini belum tersedia dari stok data yang ada.

Keterbatasan dalam Data dan Metode Imputasi

Isu keterbatasan data saat ini atau data pada tahun-tahun sebelumnya merupakan salah satu faktor dalam memutuskan metodologi yang akan digunakan, dimulai dari pemilihan indikator yang akan dimasukkan sampai metode penghitungan skor akhi. Namun demikian, ada banyak teknik empiris dan statistik yang dapat digunakan untuk menangani data yang tidak lengkap saat menyusun indeks yang komposit.

Tidak ada imputasi data yang digunakan dalam pengembangan IPP ini karena data yang dipilih umumnya tersedia setiap tahun dan semua data telah memiliki nilai. Bila nantinya diperlukan penghitungan ulang, maka di bawah ini tercantum beberapa metode yang telah didiskusikan pada fase desain, sebelum pengumpulan data dilakukan.

Tabel Lampiran II.1 Metode Imputasi Statistik³

Metode Penghitungan	Keterangan	Penerapan di IPP
Hot Deck Imputation	Menetapkan data yang tidak ada dengan nilai yang 'serupa' dengan poin data	IPP menggunakan pendekatan ini saat menetapkan beberapa indikator yang tidak ada dengan menggunakan nilai daerah di mana provinsi tersebut berada.
Substitusi (Substitution)	Mengganti data yang tidak ada dengan unit lain yang belum dipilih dalam sebuah sampel	Metode ini tidak diterapkan dalam IPP ini karena semua data yang tersedia telah digunakan.

Metode Penghitungan	Keterangan	Penerapan di IPP
Cold Deck Imputation	Mengganti data yang tidak ada dengan nilai dari sumber lain	IPP menerapkan metode penghitungan ini baik saat menggunakan data terbaru sebagai poin data saat ini dalam sebuah serial data, atau menggunakan tambahan statistik provinsi untuk mengisi data yang tidak ada.
Penghitungan rata-rata tak bersyarat (Unconditional Mean Imputation)	Mengganti data yang tidak ada dengan rata-rata dari sampel	Metode penghitungan ini tidak digunakan pada semua indikator di IPP ini karena sifatnya yang bervariasi dari 34 provinsi. Metode ini juga tidak digunakan di seluruh domain karena saat menghitung rata-rata pada berbagai indikator menimbulkan adanya asumsi tentang berbagai keterkaitan.
Penghitungan regresi (Regression Imputation)	Mengkorelasikan beberapa kombinasi dari beberapa indikator untuk menghitung data yang tidak ada	Dengan beberapa potensi indikator dan lima domain, tidak ada cara sederhana yang bisa dirumuskan untuk menghitung seluruh data IPP secara terpercaya.
Penghitungan meminimalisasi yang diharapkan (Expected Minimization Imputation)	Menggunakan pendekatan kemungkinan maksimum untuk menghitung data	Metode ini tidak digunakan akibat keberagaman berbagai negara dan indikator (Lihat penghitungan rata-rata tak bersyarat/unconditional mean imputation)
Penyesuaian Kuartil (Matching Quartiles)	Digunakan untuk menghitung data dari tren tahun- tahun sebelumnya yang selama ini telah diamati	Karena pengembangan indikator umumnya berjalan lambat, umumnya regresi dipandang tidak memberi nilai tambah dalam metode penghitungan tunggal.
Penghitungan Multipel (Multiple Imputation)	Menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo dalam menentukan hasil final yang kuat.	Bentuk paling dasar dari metode ini terjadi pada saat batas atas dan bawah dari IPP suatu provinsi dapat ditentukan. Rincian lebih lanjut dari metode ini terdapat dalam makalah metodologi.

Sumber: The Commonwealth (2016). National and Regional Toolkit, http://cmydiprod.uksouth.cloudapp.azure.com/sites/default/files/2016-10/National%20 YDI%20Toolkit.pdf

Penentuan Batas Maksimal dan Batas Minimum

Dalam menentukan skor untuk masingmasing indikator di tingkat nasional dan propinsi, maka langkah selanjutnya adalah penentuan batas maksimal dan minimal dari masing-masing indikator. Kesepakatan penentuan batas untuk masing-masing indikator dilakukan dengan berkonsultasi dengan para pakar dan kementerian terkait. Beberapa indikator dalam IPP, telah menggunakan ketentuan standar resmi dalam penentuan batas maksimal dan minimal, seperti indikator rata-rata lama bersekolah telah menggunakan standar yang telah ditentukan oleh PBB dalam IPM.

Dalam hal indikator tidak mempunyai ketentuan standar, penghitungan batas maksimal dan minimal dilakukan dengan menggunakan data empiris (sebaran data setiap propinsi), lalu diambil nilai maksimal, kemudian ditambahkan dua kali nilai standar deviasi (SD) dari indikator tersebut. Khusus untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda, penentuan batas atas menggunakan TPT pemuda negara Arab Saudi, yang merupakan TPT pemuda tertinggi di dunia pada tahun 2015 dengan skor 28. Tabel berikut menampilkan batas maksimal dan minimal dari masing-masing indikator.

Tabel Lampiran II.2 Batas Maksimum dan Minimum serta Dasar Penentuan Batas Tiap Indikator

No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Dasar Penentuan Batas				
Doma	Domain Pendidikan							
1	Rata-rata lama sekolah	0	15	Standar PBB dan sudah digunakan di IPM				
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	0	100	Standar				
3	APK Perguruan Tinggi	0	100	Standar				
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan								
4	Angka Kesakitan Pemuda	0	20	Pendekatan dari nilai maksimum data ditambah dua kali standar deviasi (SD)				
5	Pemuda Korban Kejahatan	0	3	Pendekatan dari nilai maksimum data ditambah dua kali SD				
6	Pemuda Merokok	0	36	Pendekatan dari nilai maksimum data ditambah dua kali SD				

No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Dasar Penentuan Batas				
7	Remaja Perempuan sedang Hamil	0	45	Pendekatan dari nilai maksimum data ditambah dua kali SD				
Doma	Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan							
8	Pemuda Wirausaha Kerah Putih (white collar)	0	2	Pendekatan dari nilai maksimum data ditambah dua kali SD				
9	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	0	28	TPT Pemuda tertinggi di Arab Saudi (28 persen)				
Doma	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan							
10	Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	0	100	Standar				
11	Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	0	45	Pendekatan dari nilai maksimum data ditambah dua kali SD				
12	Pemuda Berpendapat dalam Rapat Kemasyarakatan	0	25	Pendekatan dari nilai maksimum data ditambah dua kali SD				
Doma	Domain Gender dan Diskriminasi							
13	Perkawinan Usia Anak	0	45	Pendekatan dari nilai maksimum data ditambah dua kali SD				
14	Pemuda Perempuan sedang Bersekolah Menengah (SMA/ sederajat atau lebih tinggi) dan Perguruan Tinggi	25	100	Standar				
15	Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	0	60	Pendekatan dari nilai maksimum data ditambah dua kali SD				

Standardisasi Data

Keseluruhan data yang tersedia untuk semua indikator harus dinormalisasi terlebih dahulu supaya semua data tersebut dapat diolah dalam cara yang benar secara statistik dan dilakukan pembobotan sehingga data tersebut dapat memberikan hasil yang benar terhadap keseluruhan skor indeks.

Terdapat banyak metode normalisasi dan standarisasi data. Metode memberikan tanda

atau peringkat merupakan metode sederhana vang efektif dan tidak membutuhkan pengetahuan statistik yang mendalam. Pemberian tanda dalam IPP adalah suatu cara untuk mengatasi infomasi yang sepertinya tidak masuk akal. Untuk mempergunakan metode ini, setiap indikator dibuat skala antara 0 sampai 100, yang relatif terhadap keseluruhan set data. Untuk melakukan hal ini, perlu ditentukan nilai minimum dan maksimum yang sesuai untuk setiap set data perlu disepakati, sehingga semua nilai yang di bawah nilai minimum ditetapkan sebagai nol (0), dan semua nilai yang di atas nilai maksimum ditetapkan sebagai satu (1), dan semuanya akan diukur merata di antara 0 dan 1. Kumpulan data dari indikator yang berpotensi untuk digunakan dalam IPP dapat dilihat di Lampiran VI.

Dalam mengembangkan sebuah IPP, kita perlu untuk mempertimbangkan sifat data yang akan digunakan. Sifat suatu data memiliki arti positif jika data memiliki korelasi positif antara indikator dan arti dari pembangunan pemuda; dan memiliki arti negatif jika data memiliki korelasi negatif antara indikator dan arti pembangunan pemuda. Setiap indikator harus distandarisasi dengan menggunakan Persamaan 1 untuk data positif dan Persamaan 2 untuk data negatif.

Persamaan 1: Banding Equation

Banded
$$_{ji} = \frac{Indicator\ Value\ y_{ji} - Minimum\ Cut\ Off_{ji}}{Maximum\ Cut\ Off_{ji} - Minimum\ Cut\ Off_{ji}}$$
 $_{i=indikator\ j=domain}$

Fakta bahwa rata-rata lama bersekolah mengindikasikan asumsi implisit bahwa semakin tinggi rata-rata lama bersekolah menunjukkan situasi yang lebih baik dalam pembangunan pemuda. Namun, ada beberapa indikator dengan tingkat yang lebih tinggi seperti tingkat kematian, menunjukkan kasus yang kurang diinginkan untuk terjadi dalam pembangunan pemuda. Dalam kasus seperti ini, skor ditandai secara berlawanan dan dihitung dengan Persamaan 2.

Persamaan 2: Reverse Banded Equation

Reverse Banded
$$_{ji} = 1 - \frac{Indicator\ Value\ y_{ji} - Minimum\ Cut\ Off_{ji}}{Maximum\ Cut\ Off_{ji} - Minimum\ Cut\ Off_{ji}}$$
 $i = indikator \quad j = domain$

Segera setelah skor dari masing-masing indikator telah dihitung, skor domain dihitung dengan cara yang serupa dalam menghitung indikator dan menambahkan pembobotan. Skor untuk domain *j*-th dihitung dengan menggunakan Persamaan 3.

Persamaan 3: Penghitungan Skor Domain

$$Domain\ score_{j} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} Weighted\ Indicators_{ji}\ x\ Banded\ Score_{ji}}{\sum\limits_{i=1}^{n} Weighted\ Indicators_{ji}}$$
$$i = indikator \quad n = banyaknya\ indikator\ dalam\ domain$$

Segera setelah skor domain telah dihitung, indeks IPP dihitung dengan cara yang serupa dalam menghitung domain dan menambahkan pembobotan. Skor IPP untuk pemilahan data berdasarkan provinsi dan gender dihitung menggunakan Persamaan 4.

Persamaan 4: Penghitungan Skor IPP

YDI Score =
$$\frac{\sum\limits_{j=1}^{m} Weighted\ Domain_{j} x\ Domain\ Score_{j}}{\sum\limits_{j=1}^{m} Weighted\ Domain_{j}}$$
$$j = indikator \qquad m = banyaknya\ domain\ dalam\ indeks$$

Skor akhir dari IPP dalam Persamaan 4 digunakan untuk mengukur IPP Indonesia di tingkat national dan provinsi, serta pemilahan berdasarkan gender.

Pembobotan Indikator

Dalam menghitung domain dan skor akhir, pembobotan dilakukan untuk setiap indikator agar dapat menunjukkan tingkat kepentingan secara relatif terhadap indikator yang lain, dengan menggunakan metode yang tersedia. Oleh karena itu, kesepakatan di antara para pakar tentang bobot untuk seluruh domain dan indikator menjadi hal penting. Para pakar telah terlibat dalam menentukan pembobotan dengan menggunakan wawasan mereka tentang tingkat kepentingan dari masing-masing domain dalam konteks daerah. Metode pembobotan yang ada adalah sebagai berikut.

1. Penilaian para pakar

Penilaian para pakar adalah sebuah pendekatan untuk mendapatkan opini dari masing-masing pakar dengan keahlian tertentu. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan tinjauan secara cepat berdasarkan pengetahuan tentang suatu aspek tertentu dalam mengukur IPP.

2. Proses Hierarki Analisis (Analytical Hierarchy Process/AHP)

Proses Hierarki Analisis (AHP) adalah teknik yang terstruktur untuk mengelola dan menganalisis keputusan yang kompleks. AHP membantu para pengambil keputusan untuk menentukan pembobotan yang terbaik untuk domain dan indikator dari IPP dengan melakukan analisis masalah dalam kerangka kerja yang komprehensif dan rasional.

3. Pendekatan Keuntungan dari Keraguan (Benefit of the doubt αpproach/ BOD)

Pendekatan ini adalah aplikasi dari Dαtα Envelopment Analysis (DEA) terhadap indikator komposit berdasarkan keuntungan dari setiap domain dan indikator.

4. Pendapat umum/ opini publik.

Metode opini publik dalam mengukur IPP adalah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu negara mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran mayoritas masyarakat.

5. Proses Alokasi Anggaran (Budget Allocation Process/ BAP)

BAP dalam IPP adalah metode pembobotan indikator berdasarkan persentase dari anggaran untuk setiap domain dan indikator.

6. Metode Statistik Multivariasi (Multivariate Statistical Methods)

Metode ini digunakan untuk menganalisis gabungan perilaku dari berbagai variabel (indikator dalam IPP) yang dipilih secara Keanekaragaman dari sebuah random. variabel random akan dievaluasi secara bersamaan untuk mendeteksi perilaku dari berbagai indikator. Beberapa kemungkinan multivariatif metode statistik menentukan indeks adalah sebagai berikut: Principle components analysis (PCA), Factor Cluster analysis, analysis. Multivariate analysis of variance (MANOVA), Discriminant analysis, Data envelopment analysis (DEA), Unobserved components model (UCM) dan Conjoint analysis (CA).

IPP Indonesia harus diukur dengan pendekatan dan metode yang sesuai. Pembobotan indikator, dengan menggunakan metode statistik multivariate (multivariate statistical methods), dapat digunakan untuk mengukur IPP. Metode ini memungkinkan

pembobotan indikator berdasarkan sifat dari perilaku data untuk porsi perbedaannya (variance). Karena semua metode ini sepenuhnya adalah berdasarkan keberagaman data, dan tidak ada intervensi dari kerangka teori, maka lebih baik untuk menggabungkan metode statistik sederhana dengan penilaian para pakar.

IPP Indonesia dihitung dengan menggunakan metode PCA dan metode pembobotan yang seimbang (equal weighting) untuk dapat dibandingkan. Namun, akhirnya diputuskan untuk menggunakan equal weighting karena dapat menjawab semua argumen secara etika atau moral di masa yang akan datang tentang penentuan aspek yang lebih penting untuk pembangunan pemuda di Indonesia.

Tabel berikut menampilkan daftar pembobotan domain yang telah dipilih oleh The Commonwealth untuk IPP global. Dalam IPP Global 2016 terdapat tiga indikator yang terpilih sebagai indikator utama karena ketiga indikator tersebut paling selaras dengan paradigma Pembangunan Manusia Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan. Indikator lainnya dalam beberapa domain lainnya diberi pembobotan yang sama. Pembobotan pada IPP Indonesia sedikit berbeda dengan IPP Global dan ASEAN. Pembobotan IPP ASEAN digunakan sebagai dasar untuk pengukuran IPP Indonesia. Sebagai catatan, IPP ASEAN hanya memiliki dua indikator untuk partisipasi, sedangkan IPP Indonesia memiliki tiga indikator. Juga IPP Indonesia memiliki satu domain tambahan, yaitu Domain Gender dan Diskriminasi yang memiliki empat indikator.

Tabel Lampiran II.3 Pembobotan Domain untuk Mengukur IPP

Referensi IPP	Domain	% Bobot
IPP Global 2016	Domain 1: Pendidikan	25%
	Domain2: Kesehatan dan Kesejahteraan	25%
	Domain3: Lapangan Pekerjaan	25%
	Domain4: Partisipasi Politik	12.5%
	Domain5: Partisipasi Warganegara	12.5%
IPP ASEAN 2017	Domain 1: Pendidikan	30%
	Domain2: Kesehatan dan Kesejahteraan	30%
	Domain3: Ketenagakerjaan dan Kesempatan	30%
	Domain4: Partisipasi dan Keterlibatan	10%

Referensi IPP	Domain	% Bobot
IPP Indonesia 2017	Domain 1: Pendidikan	20%
	Domain2: Kesehatan dan Kesejahteraan	20%
	Domain3: Ketenagakerjaan dan Kesempatan	20%
	Domain4: Partisipasi dan Kepemimpinan	20%
	Domain5: Gender dan Diskriminasi	20%

RINGKASAN PROSES PENGHITUNGAN IPP INDONESIA

Secara singkat, langkah-langkah dalam finalisasi penghitungan IPP Indonesia adalah sebagai berikut:

(1) Penentuan indikator.

Dari keseluruhan indikator yang merupakan hasil kajian tahun 2016, dipilih sejumlah indikator dengan menggunakan Metode Analisis Komponen Utama, sehingga terpilih sebanyak 15 indikator.

(2) Penghitungan skor masing-masing indikator.

Penghitungan skor masing-masing indikator dilakukan berdasarkan batas maksimum dan minimum dari masing-masing indikator, yang telah ditetapkan sebelumnya. Skor terendah diberi nilai 1

dan tertinggi adalah 10. Untuk indikator yang bersifat positif, semakin tinggi nilai indikator maka akan semakin tinggi nilai skornya. Sedangkan indikator bersifat negatif berlaku sebaliknya.

(3) Penghitungan indeks masing-masing domain

Indeks masing-masing domain dihitung dengan rumus:

Indeks Domain =
$$\left(\frac{\text{score } X1 + ... + \text{score } Xn}{n} \right) \times 10$$

$$n = \text{banyaknya indikator masing-masing domain}$$

(4) Penghitungan skor IPP.

Skor IPP dihitung dengan menggunakan rumus:

LAMPIRAN III

DATA PENYUSUN IPP 2015-2016

- Tabel Lampiran III.1A Data Awal Penyusun IPP 2015: Domain1-2
- Tabel Lampiran III.1B Data Awal Penyusun IPP 2015: Domain 3-5
- Tabel Lampiran III.2A Data Awal Penyusun IPP 2015: Domain1-2
- Tabel Lampiran III.2B Data Awal Penyusun IPP 2015: Domain 3-5
- Tabel Lampiran III.3A Data Transformasi Penyusun IPP 2015
- Tabel Lampiran III.3B Data Transformasi Penyusun IPP 2016
- Tabel Lampiran III.4 Indeks Domain IPP 2015-2016

Tabel Lampiran III.1A Data Awal Penyusun IPP 2015: Domain 1-2

	De	omain 1: Pendidikan		Domain 2: Kesehatan dan Kesejahteraan						
Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah	APK Sekolah Menengah	APK PT	Angka Kesakitan Pemuda	Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	Pemuda Merokok	Remaja Perempuan Sedang Ham			
	X1*)	X2	Х3	X4	X5	Х6	Х7			
Aceh	11,06	91,09	34,34	8,48	0,52	24,28	10,33			
Sumatera Utara	10,48	90,18	21,70	5,78	1,02	24,68	16,52			
Sumatera Barat	10,36	86,65	32,11	8,81	1,15	29,76	25,50			
Riau	10,11	85,80	24,36	9,29	1,49	26,91	29,75			
Jambi	10,04	84,66	21,53	7,11	0,97	27,46	24,84			
Sumatera Selatan	9,76	84,01	15,19	7,15	1,36	30,19	31,13			
Bengkulu	10,28	86,03	29,46	9,29	1,47	29,72	23,83			
Lampung	9,59	88,87	10,21	10,36	1,25	31,38	20,64			
Kepulauan Bangka Belitung	9,02	82,49	9,16	7,74	1,02	29,16	8,44			
Bentung Kepulauan Riau	11,02	92,73	16,66	8,25	0,74	27,45	13,30			
DKI Jakarta	11,68	82,55	26,84	8,92	1,72	24,67	11,94			
Jawa Barat	9,76	81,01	17,76	7,76	1,12	30,02	14,06			
Jawa Tengah	9,82	87,20	15,97	10,99	0,94	26,14	25,98			
DI Yogyakarta	11,89	90,35	54,87	13,43	2,12	23,39	3,94			
Jawa Timur	10,05	85,95	18,34	11,09	0,94	25,83	19,28			
Banten	9,96	81,74	19,34	9,74	1,02	30,45	12,25			
Bali	11,06	92,19	26,50	12,71	1,11	22,07	14,54			
Nusa Tenggara	9,96	90,84	21,93	14,13	1,84	29,02	30,17			
Barat Nusa Tenggara	8,96	83,25	19,99	15,29	0,68	24,21	28,44			
Timur Kalimantan Barat	8,87	82,11	15,79	7,13	0,74	25,54	4,78			
Kalimantan Tengah	9,45	84,50	17,08	7,11	0,74	26,86	13,91			
Kalimantan Selatan	9,35	78,77	20,46	11,34	1,20	24,68	18,98			
Kalimantan Timur	10,70	94,55	23,83	5,81	0,47	22,09	0,80			
Kalimantan Utara	9,95	92,92	15,18	5,99	0,82	25,24	13,02			
Sulawesi Utara	•	88,86	23,26	10,32	•					
Sulawesi Tengah	10,44	87,34	26,16	10,64	1,06	24,86 29,69	24,71 30,71			
	9,71				1,22					
Sulawesi Selatan	9,93	82,15	33,01	8,89	0,85	23,71	14,89			
Sulawesi Tenggara	10,39	84,71	35,49	10,16	1,43	24,78	15,44			
Gorontalo	8,85	84,09	25,36	14,49	0,93	29,86	8,75			
Sulawesi Barat	8,90	82,33	21,20	11,42	0,58	25,57	15,76			
Maluku	10,95	91,58	36,60	6,03	1,34	22,90	23,56			
Maluku Utara	10,28	89,81	27,55	6,05	0,85	24,42	11,34			
Papua Barat	10,07	89,73	26,87	6,35	1,21	25,67	17,29			
Papua	7,17	70,65	13,24	5,47	1,20	23,32	11,41			

^{*)} Kecuali data untuk X1 yang dinyatakan dalam "tahun", seluruhnya dalam "persen"

Tabel Lampiran III.1B Data Awal Penyusun IPP 2015: Domain 3-5

	3: Lapangan mpatan Kerja	Domain 4: I	Partisipasi dan K	epemimpinan	Domain 5: Gender dan Diskriminasi			
Provinsi	Pemuda Wirausaha (white collar)	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial	Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Sosial	Pemuda Berpendapat dalam Rapat	Perkawinan Usia Anak	Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal
	X8*)	Х9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
Aceh	0,15	23,59	86,51	2,81	8,65	12,40	51,04	14,38
Sumatera Utara	0,21	16,05	79,55	9,51	4,65	15,35	43,41	19,16
Sumatera Barat	0,33	17,29	72,91	6,95	6,76	14,95	51,93	19,93
Riau	0,23	17,13	83,89	5,68	7,64	19,72	40,92	21,33
Jambi	0,25	9,94	87,81	6,62	5,20	25,45	37,95	19,90
Sumatera Selatan	0,19	14,78	78,61	3,72	4,67	26,58	32,37	18,95
Bengkulu	0,18	11,98	82,14	4,85	5,83	24,92	46,64	19,07
Lampung	0,12	13,68	82,79	3,40	2,65	18,26	28,34	14,34
Kep, Bangka Belitung	0,03	13,92	81,94	4,14	2,75	25,45	27,48	21,49
Kepulauan Riau	0,51	10,50	73,77	5,20	6,05	11,73	35,72	36,01
DKI Jakarta	0,56	14,31	74,39	3,08	3,43	14,65	34,78	46,81
Jawa Barat	0,25	20,52	80,77	3,32	5,30	25,86	32,57	23,70
Jawa Tengah	0,29	14,22	88,31	6,39	7,73	18,73	34,82	27,01
DI Yogyakarta	0,93	12,05	88,86	13,84	18,10	14,28	56,24	32,01
Jawa Timur	0,30	13,27	86,56	7,41	6,28	24,45	35,00	22,32
Banten	0,36	19,61	80,16	3,69	3,74	15,95	32,60	28,17
Bali	0,45	5,70	78,74	33,55	7,71	16,37	35,49	38,87
Nusa Tenggara	0,17	13,55	88,77	5,02	8,76	23,17	39,44	14,98
Barat Nusa Tenggara	0,12	10,01	83,27	6,27	6,49	19,23	37,29	11,94
Timur Kalimantan Barat	0,12	11,99	70,31	2,53	7,04	32,21	33,02	17,66
Kalimantan	0,21	9,72	73,70	2,46	3,88	33,56	30,76	21,66
Tengah Kalimantan	0,24	11,56	78,44	4,12	4,07	33,68	34,26	21,47
Selatan Kalimantan	0,24	17,05	77,25	3,63	6,21	31,13	42,28	23,99
Timur Kalimantan	0,38	12,34	69,57	5,62	5,61	30,05	34,83	26,17
Utara Sulawesi Utara	0,15	22,73	92,65	18,09	9,31	31,50	38,58	18,43
Sulawesi	0,30	10,58	78,62	5,46	6,03	31,91	40,77	17,13
Tengah Sulawesi	0,35	14,71	73,41	3,27	1,68	28,71	44,33	17,59
Selatan Sulawesi	0,34	12,91	79,68	3,26	6,72	30,24	45,34	13,61
Tenggara Gorontalo	0,32	11,43	88,76	2,92	5,50	26,21	41,20	17,67
Sulawesi Barat	0,06	7,71	80,63	7,69	2,85	34,22	36,64	14,87
Maluku	0,10	23,86	80,64	17,68	4,84	24,57	48,52	11,91
Maluku Utara	0,16	14,55	83,73		6,54	19,77	44,73	
Papua Barat				6,11				13,79
•	0,32	16,28	75,08	7,57	6,13	28,05	42,52	13,59
Papua Total	0,04	8,20 15,38	81,94 81,97	5,44	5,88	24,09	27,24 36,61	7,43 22,99

Keterangan: *) Data untuk X8 sampai X15 dinyatakan dalam "persen" **) SMA/ sederajat atau lebih tinggi .

Tabel Lampiran III.2A Data Awal Penyusun IPP 2016: Domain 1-2

-		Domain 1: Pendidikar	1	Domain 2: Kesehatan dan Kesejahteraan						
Provinsi	Rata- rata Lama Sekolah	APK Sekolah Menengah	АРК РТ	Angka Kesakitan Pemuda	Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	Pemuda Merokok	Remaja Perempuan Sedang Hamil			
_	X1	X2	Х3	X4	X5	Х6	Х7			
Aceh	11,22	93,66	35,24	6,91	0,53	22,97	14,96			
Sumatera Utara	10,82	91,89	24,31	5,87	0,99	22,53	43,31			
Sumatera Barat	10,66	88,05	34,36	9,38	1,20	27,46	10,78			
Riau	10,48	86,80	25,10	9,33	1,40	24,83	11,19			
Jambi	10,39	85,89	22,69	7,79	0,88	25,06	16,89			
Sumatera Selatan	10,05	85,79	18,36	6,19	1,25	28,28	10,90			
Bengkulu	10,61	87,11	33,61	8,99	1,55	28,36	16,04			
Lampung	9,86	88,62	13,52	8,57	0,99	30,65	24,80			
Kepulauan Bangka Belitung	9,75	82,00	11,47	8,28	0,30	25,75	25,75			
Kepulauan Riau	11,14	89,98	18,21	6,51	0,80	26,27	25,96			
DKI Jakarta	11,62	81,71	27,65	8,11	2,04	23,41	9,63			
Jawa Barat	9,80	80,59	20,63	8,82	0,96	28,06	9,48			
Jawa Tengah	10,10	88,26	16,48	9,50	1,00	24,79	22,33			
DI Yogyakarta	11,88	92,52	55,71	11,55	2,14	22,45	0,00			
Jawa Timur	10,19	87,15	23,52	8,46	0,89	25,26	16,32			
Banten	10,20	82,29	24,37	9,48	0,86	28,22	12,66			
Bali	11,05	91,48	27,02	10,56	0,68	20,42	37,43			
Nusa Tenggara	10,02	92,38	21,57	14,05	1,45	27,90	27,63			
Barat Nusa Tenggara Timur	9,18	85,02	22,71	11,26	0,70	22,07	27,50			
Kalimantan Barat	9,07	83,01	17,34	6,47	0,56	23,99	22,89			
Kalimantan Tengah	9,78	82,75	19,59	7,89	0,56	24,90	15,21			
Kalimantan Selatan	9,85	81,68	19,09	9,98	1,00	23,81	13,34			
Kalimantan Timur	10,81	95,32	26,43	4,83	0,97	22,59	4,82			
Kalimantan Utara	10,29	93,65	20,36	5,50	0,89	24,51	6,20			
Sulawesi Utara	10,87	88,01	25,87	8,18	1,13	24,30	11,02			
Sulawesi Tengah	10,25	86,68	29,66	9,08	1,52	28,04	19,47			
Sulawesi Selatan	10,20	83,52	34,54	7,63	0,90	22,74	18,03			
Sulawesi Tenggara	10,65	84,44	37,94	11,01	1,56	23,35	30,25			
Gorontalo	9,43	86,01	26,31	12,66	1,17	27,13	14,06			
Sulawesi Barat	9,49	82,11	23,14	8,46	0,72	24,51	14,88			
Maluku	11,34	91,31	38,94	4,64	1,32	21,14	5,56			
Maluku Utara	10,58	86,67	34,66	5,34	1,20	22,93	3,66			
Papua Barat	10,35	91,07	27,06	5,41	0,75	22,06	10,33			
Papua	7,60	69,70	17,14	4,80	1,13	19,59	8,43			
Indonesia	10,21	85,79	23,44	8,54	1,04	25,51	17,16			

 $\textbf{Keterangan: '}) \ \textbf{Kecuali data untuk X1 yang dinyatakan dalam "tahun", seluruhnya dalam "persen"}$

Tabel Lampiran III.2B Data Awal Penyusun IPP 2016: Domain 3-5

		apangan dan atan Kerja	Domain 4:	Partisipasi dan I	(epemimpinan	Domain 5: Gender dan Diskriminasi			
Provinsi	Pemuda Wirausaha (white collαr)	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial	Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Sosial	Pemuda Berpendapat dalam Rapat	Perkawinan Usia Anak	Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	Pemuda Perempua Bekerja di Sektor Formal	
	X8	Х9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	
Aceh	0,14	17,13	86,51	2,81	8,65	15,32	48,50	17,55	
Sumatera Utara	0,08	13,41	79,55	9,51	4,65	12,95	43,95	20,43	
Sumatera Barat	0,18	12,03	72,91	6,95	6,76	16,43	52,37	22,75	
Riau	0,30	15,89	83,89	5,68	7,64	21,38	39,72	22,12	
Jambi	0,11	8,63	87,81	6,62	5,20	29,86	37,39	18,45	
Sumatera Selatan	0,91	9,91	78,61	3,72	4,67	27,09	35,26	18,71	
Bengkulu	0,97	8,60	82,14	4,85	5,83	26,27	43,27	22,06	
Lampung	0,25	12,37	82,79	3,40	2,65	16,57	32,83	16,16	
Kep, Bangka Belitung	0,67	5,76	81,94	4,14	2,75	28,79	30,95	22,82	
Kepulauan Riau	0,00	10,87	73,77	5,20	6,05	19,83	37,28	36,81	
DKI Jakarta	0,53	12,50	74,39	3,08	3,43	14,21	34,48	43,04	
Jawa Barat	0,20	19,84	80,77	3,32	5,30	23,23	33,31	25,38	
Jawa Tengah	0,25	12,72	88,31	6,39	7,73	20,70	36,63	26,90	
DI Yogyakarta	0,53	8,11	88,86	13,84	18,10	13,29	57,20	30,62	
Jawa Timur	0,35	11,26	86,56	7,41	6,28	22,07	36,95	24,24	
Banten	0,28	18,10	80,16	3,69	3,74	16,32	35,10	32,14	
Bali	0,93	5,99	78,74	33,55	7,71	23,15	39,42	36,67	
Nusa Tenggara Barat	0,00	10,27	88,77	5,02	8,76	25,97	40,44	21,53	
Nusa Tenggara Timur	0,19	8,40	83,27	6,27	6,49	20,79	37,56	16,43	
Kalimantan Barat	0,20	10,73	70,31	2,53	7,04	30,86	33,03	16,84	
Kalimantan Tengah	0,15	11,37	73,70	2,46	3,88	30,94	33,20	17,81	
Kalimantan Selatan	0,36	13,61	78,44	4,12	4,07	33,94	35,40	19,10	
Kalimantan Timur	1,41	16,29	77,25	3,63	6,21	30,40	40,35	23,82	
Kalimantan Utara	0,00	11,11	69,57	5,62	5,61	31,89	38,34	32,19	
Sulawesi Utara	0,43	17,00	92,65	18,09	9,31	25,36	41,17	18,03	
Sulawesi Tengah	0,44	7,23	78,62	5,46	6,03	30,20	38,04	21,30	
Sulawesi Selatan	0,04	10,86	73,41	3,27	1,68	29,47	44,71	16,89	
Sulawesi Tenggara	0,32	5,92	79,68	3,26	6,72	29,32	44,87	15,78	
Gorontalo	0,46	6,75	88,76	2,92	5,50	27,83	41,45	22,36	
Sulawesi Barat	0,18	7,80	80,63	7,69	2,85	26,22	35,93	16,17	
Maluku	0,23	16,62	80,64	17,68	4,84	23,64	49,30	19,36	
Maluku Utara	0,41	10,74	83,73	6,11	6,54	23,40	46,05	14,73	
Papua Barat	0,16	15,13	75,08	7,57	6,13	31,68	42,30	19,38	
Papua	0,10	7,05	81,94	5,44	8,62	22,73	28,18	8,06	
Indonesia	0,30	13,44	81,97	5,86	5,88	22,35	37,71	24,07	

Keterangan: *) Data untuk X8 sampai X15 dinyatakan dalam "persen" **) SMA/ sederajat atau lebih tinggi .

Tabel Lampiran III.3A Data Transformasi Penyusun IPP 2015

Provinsi		D1			D2				D3			D4			D5	
	X1	X2	Х3	X4	X5	Х6	X7	X8	Х9	X10	X11	X12	X13	X14	X1	
Aceh	8	10	4	6	9	4	8	1	2	9	1	4	8	4	3	
Sumatera Utara	7	10	3	8	7	4	7	2	5	8	3	2	7	3	4	
Sumatera Barat	7	9	4	6	7	2	5	2	4	8	2	3	7	4	4	
Riau	7	9	3	6	6	3	4	2	4	9	2	4	6	3	4	
Jambi	7	9	3	7	7	3	5	2	7	9	2	3	5	2	4	
Sumatera Selatan	7	9	2	7	6	2	4	1	5	8	1	2	5	1	4	
Bengkulu	7	9	3	6	6	2	5	1	6	9	2	3	5	3	4	
Lampung	7	9	2	5	6	2	6	1	6	9	1	2	6	1	3	
Kepulauan Bangka Belitung	7	9	1	7	7	2	9	1	6	9	1	2	5	1	4	
Kepulauan Riau	8	10	2	6	8	3	8	3	7	8	2	3	8	2	7	
DKI Jakarta	8	9	3	6	5	4	8	3	5	8	1	2	7	2	8	
Jawa Barat	7	9	2	7	7	2	7	2	3	9	1	3	5	2	4	
Jawa Tengah	7	9	2	5	7	3	5	2	5	9	2	4	6	2	5	
DI Yogyakarta	8	10	6	4	3	4	10	5	6	9	4	8	7	5	6	
Jawa Timur	7	9	2	5	7	3	6	2	6	9	2	3	5	2	4	
Banten	7	9	2	6	7	2	8	2	3	9	1	2	7	2	5	
Bali	8	10	3	4	7	4	7	3	8	8	8	4	7	2	7	
Nusa Tenggara Barat	7	10	3	3	4	2	4	1	6	9	2	4	5	2	3	
Nusa Tenggara Timur	6	9	2	3	8	4	4	1	7	9	2	3	6	2	2	
Kalimantan Barat	6	9	2	7	8	3	9	1	6	8	1	3	3	2	3	
Kalimantan Tengah	7	9	2	7	8	3	7	2	7	8	1	2	3	1	4	
Kalimantan Selatan	7	8	3	5	6	4	6	2	6	8	1	2	3	2	4	
Kalimantan Timur	8	10	3	8	9	4	10	2	4	8	1	3	4	3	4	
Kalimantan Utara	7	10	2	8	8	3	8	2	6	7	2	3	4	2	5	
Sulawesi Utara	7	9	3	5	7	4	5	1	2	10	5	4	3	2	4	
Sulawesi Tengah	7	9	3	5	6	2	4	2	7	8	2	3	3	3	3	
Sulawesi Selatan	7	9	4	6	8	4	7	2	5	8	1	1	4	3	3	
Sulawesi Tenggara	7	9	4	5	6	4	7	2	6	8	1	3	4	3	3	
Gorontalo	6	9	3	3	7	2	9	2	6	9	1	3	5	3	3	
Sulawesi Barat	6	9	3	5	9	3	7	1	8	9	2	2	3	2	3	
Maluku	8	10	4	7	6	4	5	1	2	9	4	2	5	4	2	
Maluku Utara	7	9	3	7	8	4	8	1	5	9	2	3	6	3	3	
Papua	5	8	2	8	6	4	8	1	8	9	2	4	5	1	2	
Papua Barat	7	9	3	7	6	3	7	2	5	8	2	3	4	3	3	
Indonesia	7	9	3	6	7	3	6	2	5	9	2	3	5	2	4	

Tabel Lampiran III.3B Data Transformasi Penyusun IPP 2016

Provinsi	D1)2)3		D4	D5			
Provinsi	X1	X2	Х3	X4	X5	Х6	Х7	Х8	Х9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
Aceh	8	10	4	7	9	4	7	1	4	9	1	4	7	4	3
Sumatera Utara	8	10	3	8	7	4	1	1	6	8	3	2	8	3	4
Sumatera Barat	8	9	4	6	6	3	8	1	6	8	2	3	7	4	4
Riau	7	9	3	6	6	4	8	2	5	9	2	4	6	2	4
Jambi	7	9	3	7	8	4	7	1	7	9	2	3	4	2	4
Sumatera Selatan	7	9	2	7	6	3	8	5	7	8	1	2	4	2	4
Bengkulu	8	9	4	6	5	3	7	5	7	9	2	3	5	3	4
Lampung	7	9	2	6	7	2	5	2	6	9	1	2	7	2	3
Kepulauan Bangka Belitung	7	9	2	6	9	3	5	4	8	9	1	2	4	1	4
Kepulauan Riau	8	9	2	7	8	3	5	1	7	8	2	3	6	2	7
DKI Jakarta	8	9	3	6	4	4	8	3	6	8	1	2	7	2	8
Jawa Barat	7	9	3	6	7	3	8	2	3	9	1	3	5	2	5
Jawa Tengah	7	9	2	6	7	4	6	2	6	9	2	4	6	2	5
DI Yogyakarta	8	10	6	5	3	4	10	3	8	9	4	8	8	5	6
Jawa Timur	7	9	3	6	8	3	7	2	6	9	2	3	6	2	5
Banten	7	9	3	6	8	3	8	2	4	9	1	2	7	2	6
Bali	8	10	3	5	8	5	2	5	8	8	8	4	5	2	7
Nusa Tenggara Barat	7	10	3	3	6	3	4	1	7	9	2	4	5	3	4
Nusa Tenggara Timur	7	9	3	5	8	4	4	1	7	9	2	3	6	2	3
Kalimantan Barat	7	9	2	7	9	4	5	2	7	8	1	3	4	2	3
Kalimantan Tengah	7	9	2	7	9	4	7	1	6	8	1	2	4	2	3
Kalimantan Selatan	7	9	2	6	7	4	8	2	6	8	1	2	3	2	4
Kalimantan Timur	8	10	3	8	7	4	9	8	5	8	1	3	4	3	4
Kalimantan Utara	7	10	3	8	8	4	9	1	7	7	2	3	3	2	6
Sulawesi Utara	8	9	3	6	7	4	8	3	4	10	5	4	5	3	4
Sulawesi Tengah	7	9	3	6	5	3	6	3	8	8	2	3	4	2	4
Sulawesi Selatan	7	9	4	7	7	4	6	1	7	8	1	1	4	3	3
Sulawesi Tenggara	8	9	4	5	5	4	4	2	8	8	1	3	4	3	3
Gorontalo	7	9	3	4	7	3	7	3	8	9	1	3	4	3	4
Sulawesi Barat	7	9	3	6	8	4	7	1	8	9	2	2	5	2	3
Maluku	8	10	4	8	6	5	9	2	5	9	4	2	5	4	4
Maluku Utara	8	9	4	8	6	4	10	3	7	9	2	3	5	3	3
Papua	6	7	2	8	7	5	9	1	8	9	2	4	5	1	2
Papua Barat	7	10	3	8	8	4	8	1	5	8	2	3	3	3	4
Indonesia	7	9	3	6	7	3	7	2	6	9	2	3	6	2	5

Tabel III.4 Indeks Domain IPP Provinsi 2015-2016

Provinsi			Tahun 2015				Tahun 2016					
Provinsi	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5		
Aceh	73,33	67,50	15,00	46,67	50,00	73,33	67,50	25,00	46,67	46,67		
Sumatera Utara	66,67	65,00	35,00	43,33	46,67	70,00	50,00	35,00	43,33	50,00		
Sumatera Barat	66,67	50,00	30,00	43,33	50,00	70,00	57,50	35,00	43,33	50,00		
Riau	63,33	47,50	30,00	50,00	43,33	63,33	60,00	35,00	50,00	40,00		
Jambi	63,33	55,00	45,00	46,67	36,67	63,33	65,00	40,00	46,67	33,33		
Sumatera Selatan	60,00	47,50	30,00	36,67	33,33	60,00	60,00	60,00	36,67	33,33		
Bengkulu	63,33	47,50	35,00	46,67	40,00	70,00	52,50	60,00	46,67	40,00		
Lampung	60,00	47,50	35,00	40,00	33,33	60,00	50,00	40,00	40,00	40,00		
Kep, Bangka Belitung	56,67	62,50	35,00	40,00	33,33	60,00	57,50	60,00	40,00	30,00		
Kepulauan Riau	66,67	62,50	50,00	43,33	56,67	63,33	57,50	40,00	43,33	50,00		
DKI Jakarta	66,67	57,50	40,00	36,67	56,67	66,67	55,00	45,00	36,67	56,67		
Jawa Barat	60,00	57,50	25,00	43,33	36,67	63,33	60,00	25,00	43,33	40,00		
Jawa Tengah	60,00	50,00	35,00	50,00	43,33	60,00	57,50	40,00	50,00	43,33		
DI Yogyakarta	80,00	52,50	55,00	70,00	60,00	80,00	55,00	55,00	70,00	63,33		
Jawa Timur	60,00	52,50	40,00	46,67	36,67	63,33	60,00	40,00	46,67	43,33		
Banten	60,00	57,50	25,00	40,00	46,67	63,33	62,50	30,00	40,00	50,00		
Bali	70,00	55,00	55,00	66,67	53,33	70,00	50,00	65,00	66,67	46,67		
Nusa Tenggara Barat	66,67	32,50	35,00	50,00	33,33	66,67	40,00	40,00	50,00	40,00		
Nusa Tenggara Timur	56,67	47,50	40,00	46,67	33,33	63,33	52,50	40,00	46,67	36,67		
Kalimantan Barat	56,67	67,50	35,00	40,00	26,67	60,00	62,50	45,00	40,00	30,00		
Kalimantan Tengah	60,00	62,50	45,00	36,67	26,67	60,00	67,50	35,00	36,67	30,00		
Kalimantan Selatan	60,00	52,50	40,00	36,67	30,00	60,00	62,50	40,00	36,67	30,00		
Kalimantan Timur	70,00	77,50	30,00	40,00	36,67	70,00	70,00	65,00	40,00	36,67		
Kalimantan Utara	63,33	67,50	40,00	40,00	36,67	66,67	72,50	40,00	40,00	36,67		
Sulawesi Utara	63,33	52,50	15,00	63,33	30,00	66,67	62,50	35,00	63,33	40,00		
Sulawesi Tengah	63,33	42,50	45,00	43,33	30,00	63,33	50,00	55,00	43,33	33,33		
Sulawesi Selatan	66,67	62,50	35,00	33,33	33,33	66,67	60,00	40,00	33,33	33,33		
Sulawesi Tenggara	66,67	55,00	40,00	40,00	33,33	70,00	45,00	50,00	40,00	33,33		
Gorontalo	60,00	52,50	40,00	43,33	36,67	63,33	52,50	55,00	43,33	36,67		
Sulawesi Barat	60,00	60,00	45,00	43,33	26,67	63,33	62,50	45,00	43,33	33,33		
Maluku	73,33	55,00	15,00	50,00	36,67	73,33	70,00	35,00	50,00	43,33		
Maluku Utara	63,33	67,50	30,00	46,67	40,00	70,00	70,00	50,00	46,67	36,67		
Papua	50,00	65,00	45,00	50,00	26,67	50,00	72,50	45,00	50,00	26,67		
Papua Barat	63,33	57,50	35,00	43,33	33,33	66,67	70,00	30,00	43,33	33,33		
Indonesia	63,33	55,00	35,00	46,67	36,67	63,33	57,50	40,00	46,67	43,33		

Didukung oleh:



